

LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 8 PACITAN



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Dalam rangka mencukupi kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKj.IP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :



**Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pelaksanaan RPJMD.

**Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Matrik sasaran strategik yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 adalah 16 (Enam belas) sasaran strategik dari 7 (tujuh) tujuan strategik atas 4 (empat) misi untuk mencapai visi.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 -2021 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2017 sebesar 117,01%. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “*SANGAT BAIK*”. Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8.98%. Penurunnya capaian ini dikarenakan terdapat perubahan target dan indikator akibat penyesuaian sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016 - 2021. Selain itu karena di tahun 2017 Kabupaten Pacitan mengalami bencana alam, berupa banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.683.793.675.192,74 dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.655.537.179.548,19 kurang dari target sebesar Rp.28.256.495.644,55 atau mencapai 98,32 %.



Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategik tersebut terutama disebabkan karena :

- Pemahaman dan komitmen berbagai lapisan dan komponen masyarakat serta aparatur yang relatif belum merata mengenai berbagai kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
- Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif yang mempengaruhi sendi – sendi perekonomian dan pembangunan daerah.

Peningkatan dan perbaikan kinerja akan terus dilakukan dengan cara meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban dalam bentuk :

- Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memberikan sumbangan pemikiran, kritik, saran dan informasi agar dalam pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
- Koordinasi, informasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan masing – masing unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan acuan dalam perumusan arah kebijakan pemerintah kabupaten yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
- Meningkatkan peran serta lembaga – lembaga masyarakat dan swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sehingga kegiatan pembangunan akan mampu menumbuhkembangkan kreativitas dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pacitan untuk mandiri, maju dan semakin sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Surat Pernyataan Reviu</b>	<b>iii</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan	6
E. Struktur Organisasi	19
F. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017	24
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>26</b>
A. Visi	27
B. Misi	28
C. Rencana Strategis	30
D. Rencana Kinerja Tahun 2017	31
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	33
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>35</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	35
B. Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017	156
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>241</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pacitan	
2. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017	
5. Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	



6. Daftar Penghargaan (Hasil Capaian Kinerja) Yang Diterima  
Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang



Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LKj.IP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana telah dirangkum dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15.A Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan dan penetapan/perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKj.IP Kabupaten Pacitan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj.IP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017 yaitu tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2017.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres tersebut memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral



dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 kepada seluruh *stakeholders*.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun Anggaran 2017;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2017, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2017;



16. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017;

#### **D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan**

##### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat Daya Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di antara  $07^{\circ} 55'$  -  $08^{\circ} 17'$  Lintang Selatan  $110^{\circ} 55'$  -  $111^{\circ} 25'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.389,8716 Km<sup>2</sup> atau 138.987,16 Ha, yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang terjal.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu luas 71,86 Km<sup>2</sup>.

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :



- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km<sup>2</sup> atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km<sup>2</sup> atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km<sup>2</sup> atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km<sup>2</sup> atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm<sup>3</sup>, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

## 2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel Jumlah Penduduk  
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

No	USIA	TAHUN 2017						Ket
		L	%	P	%	JUMLAH	%	
1.	0-4Thn	10.174	3,47	9.599	3,32	19.773	3,40	
2.	5-9Thn	18.505	6,31	17.348	6,01	35.853	6,16	
3.	10-14Thn	19.847	6,76	18.719	6,48	38.566	6,62	
4.	0-14 Thn	48.526	16,54	45.666	15,81	94.192	16,18	
5.	15-19Thn	21.431	7,30	20.018	6,93	41.449	7,12	
6.	20-24Thn	22.298	7,60	20.883	7,23	43.181	7,42	
7.	25-29Thn	21.465	7,31	20.209	7,00	41.674	7,16	
8.	30-34Thn	22.087	7,53	20.866	7,22	42.953	7,38	
9.	35-39Thn	21.840	7,44	20.835	7,21	42.675	7,33	
10.	40-44Thn	18.935	6,45	18.960	6,56	37.895	6,51	
11.	45-49Thn	23.396	7,97	23.594	8,17	46.990	8,07	
12.	50-54Thn	21.208	7,23	21.973	7,61	43.181	7,42	
13.	55-59Thn	20.219	6,89	20.577	7,12	40.796	7,01	
14.	60-64Thn	16.137	5,50	16.407	5,68	32.544	5,59	
15.	65-69Thn	12.908	4,40	12.192	4,22	25.100	4,31	
16.	70-74Thn	8.173	2,79	9.042	3,13	17.215	2,96	
17.	15-65 Thn	230.097	78,41	225.556	78,09	455.653	78,25	
18.	75 Thn keatas	14.823	5,05	17.607	6,10	32.430	5,57	
		<b>293.446</b>	<b>100,00</b>	<b>288.829</b>	<b>100,00</b>	<b>582.275</b>	<b>100,00</b>	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2016 mencapai 582.275 jiwa terdiri atas 293.446 jiwa penduduk laki – laki dan 288.829 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 tahun – 64 tahun) jumlahnya sebesar 455.653 jiwa atau mencapai 78.25% total penduduk yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari



pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat)..

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017**

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Pertanian/ Perkebunan	197.803	33,97
2	Peternakan	129	0,02
3	Perikanan / Kelautan	1.363	0,23
4	Pertambangan/ Industri	191	0,03
5	Perdagangan	3.920	0,67
6	Angkutan/ Transportasi	127	0,02
7	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	58.504	10,05
8	Jasa – jasa	1.752	0,30
9	Pemerintahan	10.838	1,86
10	Kesehatan	301	0,05
11	Pendidikan	2.398	0,41
12	Keagamaan	32	0,01
13	Lain - lain	93.467	16,05
	- Pensiunan	4.119	0,71
	- Belum/tdk bekerja	89.746	15,41
	- Mengurus rumah tangga	34.182	5,87
	- Pelajar mahasiswa	83.403	14,32
		<b>582.275</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 33,97%. Selanjutnya



dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumberdaya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2017**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak mempunyai ijazah	144.627	24,84
2	Tamat SD	225.109	38,66
3	Tamat SLTP	112.714	19,36
4	Tamat SLTA/ sederajat	78.528	13,49
5	Tamat D2	2.806	0,48
6	Tamat D3/ Akademi	2.310	0,40
7	Tamat Diploma IV/ S1/ S2/ S3	16.181	2,78
<b>Jumlah</b>		<b>582.275</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

## 1. Kondisi Ekonomi

### a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan secara umum dari berbagai komoditi Tahun 2016 sebagai berikut :



1. **Pertanian**, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk siam / keprok;
2. **Tanaman perkebunan**, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, panili, melinjo, jahe, kunyit, laos, temu lawak, kencur, janggolan, aren, kapas, jarak pagar, nilam;
3. **Ternak**, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur dan itik/entok;
4. **Kehutanan**, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono dan bambu;
5. **Energi dan Sumber Daya Mineral**, terdiri dari :
  - a. **Batubara**
  - b. **Mineral logam** : timah putih, nikel, timah hitam, mangan, tembaga, seng, emas, pasir besi, batu besi
  - c. **Mineral bukan logam** : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker, fosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophyllit, fosil kayu, kalsedon/ agate, kristal kuarsa, rijang, jasper
  - d. **Batuan** : ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/ tanah liat
6. **Pariwisata**, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Potensi Pariwisata di Kabupaten Pacitan Tahun 2017**

No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
1.	Wisata Pantai	Pantai Teleng Ria	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km
		Pantai Watukarung	Desa Watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Kasap	Desa \Watukarung, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Segara Anakan	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	30 Km
		Pantai Tamperan	Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan	3 Km



No.	Jenis Wisata	Lokasi		Jarak dari Pusat Kota
		Pantai Srau	Desa candi, Kec. Pringkuku	25 Km
		Pantai Taman	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	32 Km
		Pantai Wawaran	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	15 Km
		Pantai Klayar	Desa Widoro, Kec. Donorojo	53 Km
		Pantai Dhaki	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro	48 Km
		Pantai Buyutan	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Banyu Tibo	Desa Widoro, Kec. Donorojo	45 Km
		Pantai Pancer Door	Kel. Ploso, Kec. Pacitan	3 Km
		Pantai Kali Wuluh	Desa Klesem, Kec. Kebonagung	20 Km
		Pantai Soge	Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo	28 Km
		Pantai Pidakan	Desa Jetak, Kec. Tulakan	25 Km
2.	Wisata Goa	Goa Tabuhan	Desa Wareng, Kec. Punung	40 Km
		Goa Gong	Desa Bomo, Kec. Punung	30 Km
		Goa Putri	Desa Kendal, Kec. Punung	29 Km
3.	Wisata Sejarah / Budaya	Monumen Panglima Besar Jendral Soedirman	Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan	50 Km
		Monumen Tumpak Rinjing	Desa Dadapan, Kec. Pringkuku	12 Km
4.	Wisata Rekreasi	Pemandian Air Hangat	Desa Karangrejo, Kec. Arjosari	15 Km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

7. **Kelautan dan Perikanan**, sebagaimana berikut :

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri, Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang, Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila



8. **Perdagangan**, sebagaimana berikut :

Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan rincian di masing – masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah, Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah, Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

9. **Perindustrian**, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Potensi Perindustrian di Kabupaten Pacitan Tahun 2017**

No.	Uraian	Lokasi
1.	Batu Aji/Akik	Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan
2.	Gula merah	Kebonagung, Donorojo, Tulakan
3.	Keramik dan Gerabah Seni	Kebonagung
4.	Batik Tulis	Ngadirojo, Pacitan
5.	Batu Bata	Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo
6.	Kapur Tohor	Kebonagung
7.	Industri Makanan Olahan	Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari, Tegalombo Pringkuku, Punung
8.	Meubelair	Kec. Pacitan
9.	Anyaman bambu	Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

b. **Pertumbuhan Ekonomi / PDRB**

Pertumbuhan ekonomi/ Pendapatan Domestik Regional Brutto Kabupaten Pacitan tahun 2016, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2017**

NO	URAIAN	TAHUN	
		2015*	2016**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,25
2	PDRB ADHK (juta Rp.)	9.489.076,9	10.004.168,51



NO	URAIAN	TAHUN	
		2015*	2016**
3	PDRB ADHB (juta Rp.)	12.766.618,7	14.150.697,91
4	Penduduk Miskin (%)	15,49	15,42
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,97	0,94
6	Laju Inflasi (dari harga konsumen) (%)	3,45	3,8
7	Pendapatan per kapita (rupiah)	23.120.000	25.689.890
8	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	71,18	71,24
9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,89	7,1
10	Angka Melek Huruf P15 Tahun + (%)	91,54	91,6
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,74	65,92

Sumber :Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

\*) = Angka diperbaiki

\*\*\*) = Angka Proyeksi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,25% sedangkan tahun 2016 mencapai 5,21%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas politik serta peluang sektor ekonomi ke arah positif.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak pada tahun 2016 jumlah PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga *berlaku* mencapai Rp. 12.766,6187 milyar dan meningkat menjadi Rp. 14.150.697,91 milyar pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 10,84%. Sedangkan PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga *konstan* tahun 2016 mencapai Rp. 9.489,0769 milyar dan meningkat menjadi Rp. 10.004.168,51 milyar pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 5,42%.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 5,21% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2017 mencapai 5,25%, hal tersebut dikarenakan agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif.

Jumlah penduduk miskin dengan kondisi tahun 2016 sejumlah 15,49% dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2017 mencapai 15,42 % atau mengalami penurunan sebesar 0,5%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 0,97 % dan menurun pada tahun 2017 mencapai 0,94 %, hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Pacitan banyak dibangun Pabrik triplek sehingga membutuhkan karyawan serta pekerjaan padat karya.

Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 3,45 %, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,7 % atau mengalami peningkatan sebesar 7,2%.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai Rp. 23.120.000 dan meningkat menjadi Rp. 25.698.890 pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 11,15 %.

Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 71,18 dan turun menjadi 71,24 pada Tahun 2017.

Angka rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 6,89 dan meningkat menjadi 7,1 pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,1.



Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 91,54 dan meningkat menjadi 91,6 pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 3,05.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 65,74 dan meningkat menjadi 65,92 pada tahun 2017 atau naik sebesar 0,27 .

➤ **PDRB ADHK**

PDRB ADHK merupakan pertumbuhan riil yang tidak terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi. PDRB ADHK tahun 2016 mencapai Rp.9.489.076.900.000 meningkat pada tahun 2017 mencapai Rp. 10.004.168.510.000 adapun perkembangan PDRB ADHK tahun 2015-2016 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel PDRB ADHK Kabupaten Pacitan  
Tahun 2016 - 2017 (dalam juta)**

NO	SEKTOR	2016*	%	2017**	%
1	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	2.566.546,40	27,05	2.652.271,16	26,51
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	559.135,40	5,89	581.246,52	5,81
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	642.973,90	6,78	672.141,70	6,72
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3.625,80	0,04	3.738,88	0,04
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	8.802,20	0,09	9.232,91	0,09
6	KONSTRUKSI	1.369.671,00	14,43	1.445.531,29	14,45
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1.649.679,80	17,39	1.765.282,84	17,65
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	230.224,50	2,43	251.902,16	2,52
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	194.410,10	2,05	210.163,48	2,10
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	629.608,60	6,64	680.479,45	6,80
11	JASA KEUANGAN DAN	182.409,10	1,92	196.953,40	1,97



	ASURANSI				
12	REAL ESTATE	158.843,70	1,67	168.845,52	1,69
13	JASA PERUSAHAAN	26.942,90	0,28	28.648,87	0,29
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	428.681,30	4,52	443.228,46	4,43
15	JASA PENDIDIKAN	477.227,50	5,03	512.461,32	5,12
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	93.683,00	0,99	100.773,92	1,01
17	JASA LAINNYA	266.611,80	2,81	281.266,61	2,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.489.076,90</b>	<b>100,00</b>	<b>10.004.168,51</b>	<b>100,00</b>

Ket : \*) Angka Diperbaiki  
\*\*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHK Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor pertanian yang mencapai 27,52%; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,19%; Bangunan/ konstruksi 14,38%; Industri Pengolahan 6,80%; Informasi dan Komunikasi 6,49%; Pertambangan dan Penggalian 5,95%; Jasa Pendidikan 4,97%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,51%; Jasa Lainnya 2,83%; Transportasi dan Pergudangan 2,35%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,01%; Jasa Keuangan dan Asuransi 1,90%; Real Estate 1,67%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,99%; Jasa Perusahaan 0,28%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,09%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,04%

#### ➤ **PDRB ADHB**

PDRB ADHB merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Adapun capaian PDRB ADHB masing masing sektor di Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2017 sebagaimana tabel berikut :



**TABEL PDRB ADHB Kabupaten Pacitan  
Tahun 2016 - 2017 (dalam juta)**

NO	SEKTOR	2016*	%	2017**	%
1	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	3.800.379,60	29,77	4.191.677,44	29,62
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	736.098,60	5,77	807.953,23	5,71
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	831.741,60	6,51	907.546,82	6,41
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3.630,90	0,03	3.831,53	0,03
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	11.365,20	0,09	12.516,22	0,09
6	KONSTRUKSI	1.941.039,10	15,20	2.166.800,52	15,31
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	2.111.231,50	16,54	2.360.897,04	16,68
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	280.931,70	2,20	320.535,70	2,27
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	264.555,80	2,07	303.006,28	2,14
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	690.313,60	5,41	759.348,64	5,37
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	253.266,80	1,98	288.148,37	2,04
12	REAL ESTATE	193.240,80	1,51	212.887,35	1,50
13	JASA PERUSAHAAN	34.339,70	0,27	38.023,88	0,27
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	537.158,10	4,21	573.181,90	4,05
15	JASA PENDIDIKAN	619.581,50	4,85	694.199,61	4,91
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	115.308,20	0,90	129.094,15	0,91
17	JASA LAINNYA	342.436,00	2,68	381.049,24	2,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.766.618,70</b>	<b>100</b>	<b>14.150.697,91</b>	<b>100</b>

Ket : \*) Angka Diperbaiki

\*\*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa, PDRB ADHB Kabupaten Pacitan didominasi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 29,62%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,68%; Konstruksi 15,31%; Industri Pengolahan 6,41%; Pertambangan dan Penggalian 5,71%; Informasi dan Komunikasi 5,37%; dan Jasa Pendidikan 4,91%.



## E. Struktur Organisasi

Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan perangkat daerahnya sesuai kebutuhan. Dengan kewenangan tersebut, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dari pelaku di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan meliputi Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perangkat daerah di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007)

### 1. Susunan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016), dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Daerah, Tipe B;**
- b. **Sekretariat DPRD, Tipe B;**



**c. Inspektorat, Tipe A;**

**d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:**

- 1) Dinas Pendidikan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan :
  - a) Bidang pendidikan;
  - b) Bidang kebudayaan.
- 2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan :
  - a) Bidang Pariwisata; dan
  - b) Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Dinas Kesehatan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 4) Dinas Sosial, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
  - a) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - b) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari:



- a) Sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;  
dan
  - b) Sub bidang kebakaran.
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
- a) Bidang Penanaman Modal; dan
  - b) Bidang Energi Sumber Daya Mineral.
- 10) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
- a) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - b) Bidang Tenaga Kerja; dan
  - c) Bidang Transmigrasi.
- 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
- a) Bidang Perindustrian; dan
  - b) Bidang Perdagangan
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
- a) Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - b) Bidang Statistik; dan
  - c) Bidang Persandian.
- 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
- a) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
  - b) Bidang Pertanahan.
- 15) Dinas Perhubungan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;



- 16) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 17) Dinas Pangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 18) Dinas Perikanan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 19) Dinas Pertanian, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- 20) Dinas Perpustakaan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;
  - a) Bidang Perpustakaan; dan
  - b) Bidang Kearsipan.

**e. Badan Daerah, terdiri dari :**

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 4) Badan Pendapatan Daerah, Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pendapatan; dan
- 5) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

**f. Kecamatan, terdiri dari:**

- 1) Kecamatan Donorojo dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Punung dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Pringkuku dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Pacitan dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A;



- 6) Kecamatan Arjosari dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Tegalombo dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Nawangan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Bandar dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Tulakan dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A; dan
- 12) Kecamatan Sudimoro dengan Tipe A.

## **2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Lembaga Teknis Daerah**

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- b. Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran



Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007) sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga secara keseluruhan terdapat 6 badan daerah, 20 dinas daerah, 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 2 lembaga teknis daerah dan 12 kecamatan sehingga total ada 43 Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan

#### **F. Sistematika LKj.IP Tahun 2017**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2021. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya faktor-faktor yang menyebabkan kinerja (*performance*) tidak tercapai ataupun kinerja yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sistematika penulisan yang dipakai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKj.IP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika LKj.IP Tahun 2017



**BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017**

- A. Visi
- B. Misi
- C. Rencana Strategis
- D. Rencana Kinerja
- E. Penetapan Kinerja

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- B. Realisasi Keuangan Tahun 2017

**BAB IV : PENUTUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Pemerintah Kabupaten Pacitan. Kewajiban menyusun perencanaan strategik diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dokumen perencanaan strategik Kabupaten Pacitan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, perencanaan jangka menengah tersebut disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun kedepan serta penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut otomatis Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Pacitan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan RPJMD dimaksud, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021.



## A. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan yang telah dirumuskan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021 adalah :

### **“ MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT ”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Pacitan secara terpadu.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

**“MAJU”** : Mengandung makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju kondisi ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

**“SEJAHTERA”** : Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan social baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa



keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan social sebaik baiknya.

Kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel

## **B. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Pemerintah Kabupaten Pacitan dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.



Untuk mewujudkan visi “**Maju Dan Sejahtera Bersama Rakyat**”, maka ditetapkan misi Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- 1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat;**
- 3. Membangun Perekonomian Masyarakat Dengan Menggerakkan Potensi Daerah Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai ;**
- 4. Meningkatkan Kesalehan Sosial Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat;**

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan tersebut maka disusunlah peta keterkaitan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pacitan**

<b>VISI : MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT</b>		
<b>MISI I : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance	1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik</li> <li>• Pemeringkatan E-Government (PeGi)</li> </ul>
	2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK</li> <li>• Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah</li> <li>• Nilai LPPD</li> </ul>
<b>MISI II : Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata Rata Lama Sekolah</li> <li>• Harapan Lama Sekolah</li> <li>• Nilai Rata Rata Ujian - SD - SMP</li> </ul>
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Harapan Hidup</li> <li>• Angka Kematian ibu</li> <li>• Angka Kematian bayi</li> <li>• Persentase Balita Gizi Buruk</li> </ul>
2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1. Menurunnya Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Kemiskinan</li> </ul>
	2. Menurunnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Pengangguran Terbuka</li> </ul>



	Pengangguran	
	3. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> </ul>
<b>MISI III : Membangun Perekonomian Masyarakat Dengan Mengerakkan Potensi Daerah Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	1. Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laju Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Tingkat Inflasi</li> <li>PDRB Per Kapita</li> </ul>
	2. Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Koperasi Mandiri</li> <li>Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru</li> </ul>
	3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pertumbuhan Industri</li> </ul>
	4. Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Kunjungan Wisatawan</li> </ul>
	5. Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan</li> </ul>
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)</li> </ul>
3. Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Yang Mendukung Aktifitas Pembangunan Secara Berkelanjutan	1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap</li> <li>Persentase Penduduk Berakses Air Bersih</li> </ul>
	2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</li> </ul>
<b>MISI IV : Meningkatkan Kesalehan Sosial Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Meningkatkan Kualitas Dan Kerukunan Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat	1. Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Konflik Bernuansa SARA</li> <li>Angka Kriminalitas</li> <li>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban</li> </ul>

### C. Rencana Strategis

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya – upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak tetapi berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran



Pemerintah Kabupaten. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra (RPJMD) didasari asumsi – asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun aransemen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan di dalam Dokumen Renstra (RPJMD) selengkapnya dituangkan dalam formulir perencanaan stratejik (**Lampiran I : Form RS / Rencana Strategis**)

#### **D. Rencana Kinerja Tahun 2017**

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2017 perencanaannya berdasarkan RPJMD Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016. Program - program yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang telah ditetapkan dalam:



1. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 tahun 2017; dan
2. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2017;

Peraturan Bupati tentang RKPD dan perubahannya tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2017;
4. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 tahun 2017;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017;

Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur Peraturan



Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 mencakup 150 program dan 877 kegiatan, dengan rincian Urusan Wajib 155 program dan 767 kegiatan sedangkan untuk Urusan Pilihan sebanyak 39 program dan 110 kegiatan.

Perencanaan kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2016 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja (**Lampiran II : Rencana Kinerja Tahun 2017**)

#### **E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari Musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD yang disahkan menjadi Peraturan Daerah

Dokumen penetapan kinerja tersebut disusun setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Di tingkat SKPD dokumen penetapan kinerja disusun oleh Kepala SKPD paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diserahkan untuk dilaksanakan, yang berisi janji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD),



di tingkat Kabupaten dokumen penetapan kinerja disusun oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam tahun 2016 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja ***(Lampiran III : Penetapan Kinerja Tahun 2017)***



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pacitan melaksanakan kewajiban menyusun akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017**

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021 yang mengacupada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2021.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, serta membandingkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: a). Nilai 85 s.d  $\geq$  100 kategori Sangat Baik; Nilai 75 s.d  $<$ 85 kategori Baik; Nilai 65 s.d  $<$ 75 kategori Cukup Baik; Nilai 50 s.d  $<$ 65 kategori Sedang; dan Nilai 0 s.d  $<$ 50 kategori Kurang.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan disusun menurut klasifikasi sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2017 sebesar 117.01 %. Capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “SANGAT BAIK”. Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8.98%. Penurunnya capaian ini dikarenakan terdapat perubahan target dan indikator akibat penyesuaian sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016 - 2021. Selain itu karena di tahun 2017 Kabupaten Pacitan mengalami bencana alam, berupa banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian capaian indikator kinerja per-sasaran Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran  
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017**

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
		2017	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	100**	Sangat Baik
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	100.8	Sangat Baik
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	105.22	Sangat Baik
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	97.59	Sangat Baik
6	Menurunnya Pengangguran	100	Sangat Baik
7	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	143.05	Sangat Baik
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	141.39**	Sangat Baik
9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	91.32	Sangat Baik
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	85.91	Sangat Baik
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	100.03	Sangat Baik
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	89.47**	Sangat Baik
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	318.6	Sangat Baik
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	104.88	Sangat Baik
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	97.67	Sangat Baik
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	96.21	Sangat Baik
<b>Rata Rata Capaian Kinerja</b>		<b>117.01</b>	<b>Sangat Baik</b>

Ket : \*\*) Angka Proyeksi

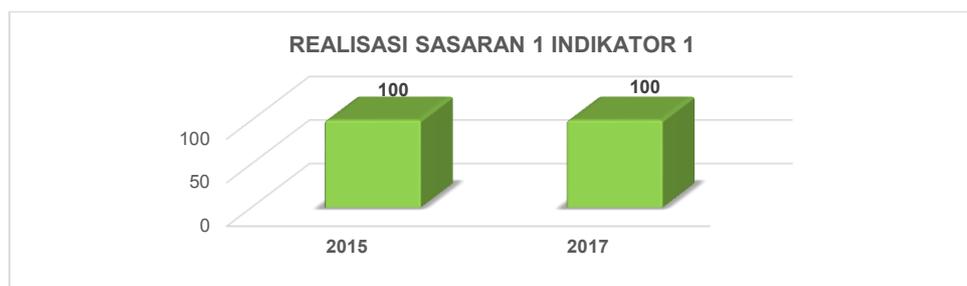
## 1. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN



Sasaran “**Meningkatnya pelayanan publik yang prima**” diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik. Pencapaian sasaran “**Meningkatnya pelayanan publik yang prima**” yang capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut :

**Tabel Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 1**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PD dengan hasil survei IKM minimal baik	100	100	100	100

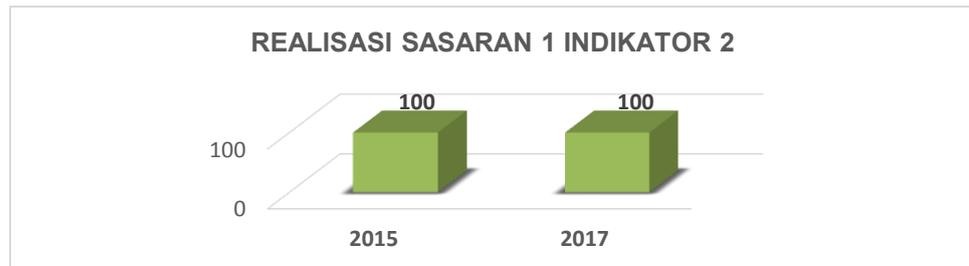


Target Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran 1 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik” (100%).



**Tabel Capaian Sasaran 1 Indikator Kinerja 2**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Pemeringkatan E-Government (PeGi)	100	Baik	Baik	100



Target Pemeringkatan E-Government (PeGi) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran1 indikator 2 termasuk kategori “Sangat baik” (100%).

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil**

**1. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk**

Indikator Kinerja Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0.91 % atau mencapai 0,95% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan dengan dukungan program Kegiatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pelayanan perekaman KTP-el di 12 Kecamatan dan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- Sosialisasi kebijakan kependudukan
- Pelayanan Pro Aktif kepada masyarakat (PPA) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan



Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 0,95% atau 441.923 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 3.22% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

## **2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran**

Indikator Kinerja bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan dengan didukung adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 8 Menteri, Peraturan Bupati tentang fasilitasi kepemilikan Akta Kelahiran anak di sarana pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pro Aktif (PPA) ke Desa/Kelurahan, dan pelayanan sidang langsung di Desa (SILADES).

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 100 % atau 491.223 Dokumen dan mengalami sama sebesar 100 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

## **3. Rasio Pasangan Berakte Nikah**

Indikator Kinerja pasangan berakte nikah pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan hanya menangani Akta Nikah bagi penduduk yang Non Muslim.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 100 % atau 274 Pasang dan mengalami sama sebesar 100 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

## **4. Persentase Kepemilikan KTP**

Indikator Kinerja Persentase kepemilikan KTP pada tahun 2017 sebesar 92.25% atau mencapai 95.47% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan didukung adanya kegiatan:



- Pelayanan perekaman KTP-el di 12 Kecamatan dan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 95.47 % atau 441.923 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 3.22 % apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

#### **5. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk**

Indikator Persentase Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk tahun 2017 sebesar 83.61% atau mencapai 84.15% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan

- Adanya kegiatan Sidang langsung di Desa (SILADES) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 84.15% atau 491.223 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 0.21% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

#### **6. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**

Indikator Ketersediaan DataBase Kependudukan skala Provinsi pada Tahun 2017 sudah ada dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

#### **7. Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga (%)**

Indikator Kinerja Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2017 sebesar 96.95% atau mencapai 98.10% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan didukung adanya kegiatan :

- Pelayanan Pro Aktif kepada masyarakat (PPA) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan.
- Pelayanan di 12 Kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan.



Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 98.10% atau 204.014 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 1.15% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

#### **8. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

Indikator Kinerja Penerapan KTP Nasional berbasis NIK pada awal periode tahun 2011 telah dilaksanakan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai akhir tahun 2017 telah dilaksanakan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

#### **9. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

##### **- KTP**

Indikator Kinerja penerbitan KTP pada tahun 2017 sebesar 92.25% atau mencapai 95.47% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan Pelayanan perekaman KTP-el di 12 Kecamatan dan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 95.47% atau 441.923 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 3.22% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

##### **- Kartu Keluarga**

Indikator Kinerja Penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2017 sebesar 96.95% atau mencapai 98.10% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan Pelayanan Pro Aktif kepada masyarakat (PPA) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan

- Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan



Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 98.10 % atau 204.014 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 1.15% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya

- **Akta Kelahiran**

Indikator penerbitan akta kelahiran pada tahun 2017 sebesar 84.15% atau mencapai 84.36% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan adanya kegiatan Sidang langsung di Desa (SILADES) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan, maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 84.36% atau 491.223 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 0.21% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Akta Kematian**

Indikator penerbitan akta kematian pada tahun 2017 sebesar 55.60% atau mencapai 56.99% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dikarenakan

- Pelayanan Pro Aktif kepada masyarakat (PPA) ke Desa-Desa se Kabupaten Pacitan
- Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pacitan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 56.99% atau 10.465 Dokumen dan mengalami peningkatan sebesar 1.39% apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

**b. Komunikasi dan Informatika**

**1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Local**

Jumlah surat kabar nasional/lokal : tahun 2017 ditargetkan jumlah surat kabar yang beredar dan dibaca oleh masyarakat Kabupaten Pacitan sebanyak 8 (delapan) surat kabar, namun



demikian ada (dua) surat kabar yang sudah tidak beredar di Kabupaten Pacitan sehingga tinggal ada 6 (enam) surat kabar.

## **2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal**

Jumlah Penyiaran radio/TV: antara tahun 2015 dan sampai akhir tahun 2016 banyak stasiun radio yang bermunculan sehingga kami targetkan sekitar 32 stasiun radio dan tv lokal yang berdiri di Kabupaten Pacitan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya peraturan pemerintah tentang larangan pemakaian frekuensi tanpa ijin serta dibarengi dengan monitoring dan balmon jawa timur maka banyak radio yang secara sadar maupun dengan terpaksa harus sebelum memperoleh ijin penyiaran.

## **3. Website Milik Pemerintah Daerah**

Website milik pemerintah saat awal RPJMD 2015 sudah tersedia. Target 2017 ada yaitu untuk memperbaharui lampiran, isian, keamanan sebagai penunjang media berbasis elektronik, sehingga mampu menjadi media pelayanan Informasi Publik. Kendala yang ada di setiap OPD adalah belum sinerginya operator website OPD sehingga website kurang uptodate.

## **4. Persentase Jaringan Komunikasi Dan Informatika Yang Terintegrasi.**

Pembangunan jaringan komunikasi dan informatika yang berbasis internet akan lebih efektif dan efisien dalam segi pengelolaannya apabila dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Karena sistem elektronik yang dikembangkan secara mandiri dapat diakses secara lokal tanpa membebani belanja bandwidth yang disewa melalui Penyedia Jasa Internet (ISP). Persentase jaringan komunikasi dan informatika yang terintegrasi dapat diketahui dari perbandingan unit kerja yang telah tersambung jaringan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan. Kondisi saat ini telah



terhubung 88 unit kerja yang terhubung dari 214 unit kerja yang direncanakan.

#### **5. Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi**

Pengembangan aplikasi sistem informasi merupakan pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Persentase pengembangan aplikasi sistem informasi dapat diketahui dari perbandingan Aplikasi yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu di Pusat Data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Kondisi saat ini telah dikembangkan 13 Aplikasi yang terhubung dari 31 OPD yang menangani urusan pemerintah daerah.

#### **6. Jumlah Informasi Publik Daerah Yang Terpublikasi Media**

Jumlah informasi publik daerah yang terpublikasikan pada periode 2015 sejumlah 210 publikasi. Target yang direncanakan tahun 2017 sebanyak 294 publikasi. Adapun realisasi dilapangan mampu mencapai 313 publikasi. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang keterbukaan informasi publik termasuk SDM dan aktifnya petugas pelayanan informasi mencari data untuk transparansi ke setiap Perangkat Daerah.

#### **7. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat: Kebutuhan akan informasi semakin meningkat, hal inilah yang mendorong KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai pengelola informasi untuk disebarkan kepada masyarakat. Dalam rangka hal tersebut kami dalam melakukan pembinaan mengedepankan pentingnya informasi lewat pembuatan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Mengingat luasnya cakupan tersebut, melalui KIM warga masyarakat desa didorong untuk menjadi jurnalis warga yang hasil dari



peliputannya bisa diunggah melalui website KIM dan akan Menjadi Kebanggaan tersendiri jika hasilnya karyanya bisa dilihat oleh kalayak banyak. Website KIM juga dioptimalkan fungsinya untuk mengunggah hasil-hasil industry masyarakat setempat sebagai media pemasaran yang modern.

**c. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**1. Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat**

Indikator Kinerja Persentase aparatur yang mengikuti diklat pada tahun 2017 sebesar 25,63.% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 sebesar 25,39% dikarenakan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Pengiriman Peserta sesuai dengan yang perencanaan bahkan ada beberapa Diklat yang melebihi dari target yang

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kegiatan Pendidikan Pelatihan Prajabatan (LPJ), Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsi Bagi PNS Daerah, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Kegiatan Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jumlah CPNS Daerah yang dikirim mengikuti diklat Prajabatan
- Jumlah Pejabat eselon II III, dan IV yang mengikuti diklat struktural
- Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi
- Jumlah PNS Daerah yang mengikuti diklat fungsional
- Jumlah SDM Aparatur yang diukur kompetensinya

**2. Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur**

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur pada tahun 2017 sebesar 19,28% atau mencapai



96,40% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 20,00% capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan Pelaksanaan Pembinaan PNS dan tenaga Non PNS serta penurunan kasus – kasus Pelanggaran Disiplin sudah dilaksanakan dengan baik

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Kegiatan Pembinaan PNS dan Non PNS dari yang ditargetkan sebanyak 530 Orang, Capaian Kinerjanya 510 Orang dan Kegiatan Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin yang ditargetkan 44 Orang pengelola Kepegawian dan 11 Orang PNS Indisipliner Realisasinya 43 Pengelola Kepegawian dan 5 Orang PNS Indisipliner dan 6 Orang Masih dalam Proses. Output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah PNS dan Tenaga Non PNS yang dibina
- Jumlah ASN bermasalah yang mendapatkan pembinaan mental Jumlah

### **3. Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja Persentase aparatur yang mengikuti diklat pada tahun 2017 sebesar 35,97% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 sebesar 33,87% dikarenakan pelaksanaan Kegiatan yang mendukung Capaian Kinerja tersebut sesuai dengan perencanaan hanya saja ada beberapa dokumen yang belum maksimal seperti kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS karena tidak bisa diprediksi

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS, Kegiatan Penempatan PNS, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Kegiatan



Administrasi Kepegawaian, Kegiatan Administrasi Pensiun, Kegiatan Pemeliharaan Arsip PNS, Kegiatan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah peserta yang lulus Ujian seleksi CPNS
- Jumlah diterbitkannya SK Mutasi, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK KGB dan Jumlah PAK yang diterbitkan
- Jumlah aplikasi SIMPEG yang dipelihara
- Jumlah Buku Laporan Kepegawaian yang diterbitkan
- Jumlah dokumen kepegawaian yang diterbitkan, Pengembangan Kepemimpinan dan Kajian Tunjangan Kinerja
- Jumlah dokumen Pensiun yang diterbitkan
- Jumlah Arsip yang dipelihara
- Jumlah ASN yang menyusun Penilaian Prestasi kerja

#### **4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat**

Indikator kinerja indeks kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target tahun 2017 yang dicapai melalui kegiatan peningkatan pelayanan publik dengan agenda kegiatan antara lain rapat sosialisasi survei kepuasan masyarakat, penyusunan laporan dari masing-masing perangkat daerah dan penyusunan laporan pemerintah kabupaten. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik. Output yang dihasilkan adalah laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Gubernur Jawa Timur.



## **5. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SOP**

Pada tahun 2016, semua perangkat daerah sudah menyusun dan menerapkan SOP. Kemudian pada akhir tahun 2016 terjadi perubahan perangkat daerah, dengan terbitnya Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang berlaku pada tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut sudah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan SOP kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pacitan.

Sampai dengan akhir tahun 2017 semua perangkat daerah sudah menerapkan SOP, utamanya adalah untuk pekerjaan rutin administrasi perkantoran. Terdapat 17 (tujuh belas) perangkat daerah yang sudah melaporkan hasil penyusunan ke Bagian Organisasi, sedangkan lainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Namun demikian semua perangkat daerah (100%) sudah menerapkan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam memberikan pelayanan.

### **d. Persandian Daerah**

#### **1. Persentase Informasi Daerah Yang Wajib Diamankan Dengan Persandian**

Indikator kinerja persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian merupakan perbandingan antara informasi daerah yang wajib diamankan dengan informasi daerah yang telah diamankan dimana kondisi pada tahun awal periode RPJMD tahun 2015 adalah 100%. Pada tahun 2017 ditargetkan capaian indikator kinerja persentase informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian sebesar 100%, hingga akhir tahun 2017 capaian indikator kinerja terealisasi 100%. Hal ini didukung oleh adanya pengamanan berita biasa dan berita rahasia dalam 1 tahun yang wajib diamankan sebanyak 27 informasi dan 27 informasi yang telah diamankan.



**e. Statistik**

**1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"**

Sesuai indikator kinerja pada urusan statistik membuat buku "kabupaten pacitan dalam angka" yang berisi berbagai data dan informasi seputar Kabupaten Pacitan yang dianalisis secara sederhana guna membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Pacitan. Sesuai target dan realisasi capaian tahun 2017 buku "kabupaten dalam angka" dapat diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

**2. Buku "PDRB Kabupaten"**

Buku PDRB Kabupaten Pacitan merupakan publikasi tahunan yang menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Pacitan secara deskriptif. Dalam buku ini disajikan tabel-tabel PDRB ADHB dan ADHK dalam nilai nominal dan persen. Serta disajikan konsep, definisi, ruang lingkup dan metode penghitungan PDRB menurut lapangan usaha dan menurut pengeluaran. Sesuai target dan realisasi capaian tahun 2017 buku "PDRB kabupaten" dapat diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

**3. Jumlah Dokumen Data/ Informasi/ Statistik Sektoral Yang Dihasilkan**

Jumlah dokumen yang dihasilkan pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 3 dokumen. Pada akhir tahun 2017 jumlah dokumen data/informasi/statistik sektoral yang dihasilkan terealisasi sebanyak 3 dokumen, hal tersebut terdiri dari; 1). Profil Statistik Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2017; 2). Profil Statistik Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2017 serta Buku Pacitan Dalam Angka tahun 2017.



**f. Kearsipan**

**1. Pengelolaan Arsip Secara Baku**

Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 sebesar 72,3 % atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 72,3%.Capaian Kinerja pada tahun 2017 didukung program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan :

- Pembinaan Arsip Desa dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan arsip desa/ kelurahan, pada tahun 2017 telah berhasil membina 96 desa di kabupaten Pacitan sehingga arsip desa yang dikelola bisa tertata secara baku dan sesuai standar.

Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD dengan indikator kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD , pada tahun 2017 ini telah membina 94 pengelola kearsipan Perangkat Daerah di kabupaten Pacitan

**2. Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Jumlah peserta pengelola kearsipan pada tahun 2017 sebesar 200 orang, atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 200 orang.Capaian kinerja pada tahun 2017 ini didukung program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan:

- Pembinaan Arsip Desa dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan arsip desa/ kelurahan, pada tahun 2017 telah berhasil membina 96 desa di kabupaten Pacitan, dimana masing -masing desa ada 1-2 pengelola yang dibina.

Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD dengan indikator kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD , pada tahun 2017 ini telah membina 94 pengelola kearsipan Perangkat Daerah di kabupaten Pacitan.



### **3. Jumlah Arsip In Aktif Yang Dikelola**

Jumlah arsip inaktif yang dikelola pada tahun 2017 sebesar 4581 box atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 4581 box. Capaian kinerja pada tahun 2017 ini didukung Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah dengan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip daerah.

### **4. Jumlah Arsip Stastis Yang Dipelihara**

Jumlah arsip statis yang dipelihara pada tahun 2017 sebesar 123 box atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 123 box. Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.

### **5. Persentase Perangkat Daerah dan Desa Yang Menerapkan Arsip Secara Baku**

Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2017 sebesar 73,36 % atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017.

Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan :

- Pembinaan Arsip Desa
- Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah

## **g. Perpustakaan**

### **1. Jumlah Perpustakaan**

Jumlah Perpustakaan pada tahun 2017 sebesar 450 perpustakaan atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 450 unit, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut :



- Pengembangan Minat Budaya Baca, dengan indikator kegiatan jumlah lomba perpustakaan yang dilaksanakan, sehingga mendorong desa/ kelurahan di Kabupaten Pacitan untuk megembangkan minat budaya baca kepada masyarakat dengan menambah sarana perpustakaan desa/ kelurahan.

Pembinaan Perpustakaan Sekolah, dengan indikator kegiatan jumlah perpustakaan sekolah yang dibina, mampu mendorong para pemangku kebijakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Pacitan untuk mengembangkan perpustakaan sekolah sekaligus mendorong anak didiknya untuk gemar membaca sehingga akan membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah

## **2. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2017 sebesar 27.932 buku atau mencapai 108,2 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 25.816 buku, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Tahun 2017 ini didukung program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan :

Pelayanan Perpustakaan Umum dengan indikator kegiatan pemenuhan pelayanan perpustakaan umum, sehingga kebutuhan pemustaka akan buku yang diinginkan dapat terpenuhi.

## **3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2017 sebesar 77.512 orang atau mencapai 100,16 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 77.389 orang , capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Jumlah pengunjung perpustakaan ini mengalami peningkatan sebesar



8.097 orang , jika dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 69.415 pengunjung.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan :

- Pengembangan Minat Budaya Baca, dengan indikator kegiatan jumlah lomba perpustakaan yang dilaksanakan. Dengan diadakannya lomba perpustakaan, mendorong perpustakaan desa dan sekolah untuk berpacu menjadikan perpustakaan yang dikelolanya menjadi perpustakaan yang maju, kreatif , serta mampu mengikuti perkembangan jaman, sehingga bisa meningkatkan minat berkunjung ke perpustakaan.
- Pembinaan perpustakaan sekolah dengan indikator kegiatan jumlah perpustakaan sekolah yang dibina. Dengan adanya pembinaan perpustakaan sekolah, mampu mengedukasi pengelola perpustakaan sekolah tentang bagaimana cara membuat perpustakaan sekolah yang nyaman dan mampu memenuhi kebutuhan pemustaka di lingkungan sekolah , sehingga mampu mendongkrak kunjungan ke perpustakaan.
- Pelayanan perpustakaan umum dengan indikator kegiatan pemenuhan pelayanan perpustakaan umum, mampu mendorong peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah kabupaten Pacitan secara signifikan. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Pacitan sebesar 35.632 pengunjung , atau menyumbang 45,97 % dari jumlah total jumlah pengunjung perpustakaan (77.512 orang).

Pelayanan perpustakaan keliling, dengan indikaor kegiatan terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling,



dengan sasaran desa dan sekolah- di kabupaten Pacitan yang jauh dari pusat kota dan belum mempunyai perpustakaan.

#### **h. Kearsipan**

##### **1. Pengelolaan Arsip Secara Baku**

Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2017 sebesar 72,3 % atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 72,3%.

Capaian Kinerja pada tahun 2017 didukung program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan :

- Pembinaan Arsip Desa dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan arsip desa/ kelurahan, pada tahun 2017 telah berhasil membina 96 desa di kabupaten Pacitan sehingga arsip desa yang dikelola bisa tertata secara baku dan sesuai standar.

Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD dengan indikator kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD , pada tahun 2017 ini telah membina 94 pengelola kearsipan Perangkat Daerah di kabupaten Pacitan

##### **2. Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Jumlah peserta pengelola kearsipan pada tahun 2017 sebesar 200 orang, atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 200 orang.

Capaian kinerja pada tahun 2017 ini didukung program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan :

- Pembinaan Arsip Desa dengan indikator kegiatan terlaksananya pembinaan arsip desa/ kelurahan, pada tahun 2017 telah berhasil membina 96 desa di kabupaten Pacitan, dimana masing -masing desa ada 1-2 pengelola yang dibina.

Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan terlaksananya Bimbingan Teknis Kearsipan



Perangkat Daerah , pada tahun 2017 ini telah membina 94 pengelola kearsipan Perangkat Daerah di kabupaten Pacitan

### **3. Jumlah Arsip In Aktif Yang Dikelola**

Jumlah arsip inaktif yang dikelola pada tahun 2017 sebesar 4581 box atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 4581 box.

Capaian kinerja pada tahun 2017 ini didukung Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah dengan kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip daerah.

### **4. Jumlah Arsip Statis Yang Dipelihara**

Jumlah arsip statis yang dipelihara pada tahun 2017 sebesar 123 box atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 123 box.

Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

### **5. Persentase PD Dan Desa Yang Menerapkan Arsip Secara Baku**

Persentase PD dan desa yang menerapkan arsip secara baku pada tahun 2017 sebesar 73,36 % atau 100 % dari target RPJMD tahun 2017.

Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan :

- Pembinaan Arsip Desa
- Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah

#### **i. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

##### **1. Cakupan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana**

Indikator Kinerja Cakupan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana pada tahun 2017 sebesar 7% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan target RPJMD sesuai dengan realisasi



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana sehingga Jumlah Desa yang mampu dan tanggap dalam penanggulangan bencana pada tahun 2017 sebanyak 4 desa.

## **6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

### **1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Di Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota pada tahun 2017 0,001 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian indikator ini sudah mencapai target RPJMD. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, melalui kegiatan :

- Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
- Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan bahaya kebakaran.
- Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional pemadam kebakaran

Untuk mewujudkan sasaran 1 tersebut didukung melalui 17 (tujuhbelas) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 90.598.131.762,00 yang telah terealisasi senilai Rp 87.291.125.401,00 atau 96,35% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.307.006.361,00.



Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 1 :

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
1	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,187,297,688.00	2,064,760,016.00	94.40	122,537,672.00
		Program Pengembangan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika	2,242,210,399.00	2,104,612,073.00	93.86	137,598,326.00
		Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	238,137,012.00	234,306,575.00	98.39	3,830,437.00
		Program Penyelenggaraan Persandian Daerah	47,900,000.00	47,866,250.00	99.93	33,750.00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39,114,236,938.00	37,428,950,493.00	95.69	1,685,286,445.00
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23,835,747,750.00	22,915,814,081.00	96.14	919,933,669.00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,342,431,325.00	3,251,736,031.00	97.29	90,695,294.00
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	2,619,106,300.00	2,510,766,370.00	95.86	108,339,930.00
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (BKD)	1,874,783,950.00	1,829,462,981.00	97.58	45,320,969.00
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,916,785,250.00	1,833,071,042.00	95.63	83,714,208.00
		Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah	137,400,000.00	135,188,000.00	98.39	2,212,000.00
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	160,655,000.00	159,610,900.00	99.35	1,044,100.00
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	112,872,275.00	110,275,400.00	97.70	2,596,875.00



	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	656,890,000.00	655,973,513.00	99.86	916,487.00
	Penyebarluasan Informasi Publik Dan Kerja Sama Media Massa	487,824,750.00	485,809,150.00	99.59	2,015,600.00
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	10,736,820,000.00	10,647,258,051.00	99.17	89,561,949.00
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	887,033,125.00	875,664,475.00	98.72	11,368,650.00
		90,598,131,762.00	87,291,125,401.00	96.35	3,307,006,361.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 1 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 1 tahun 2017 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 1 yang pada tahun 2017 mencapai 96,35%.



**SASARAN STRATEGIS 2**

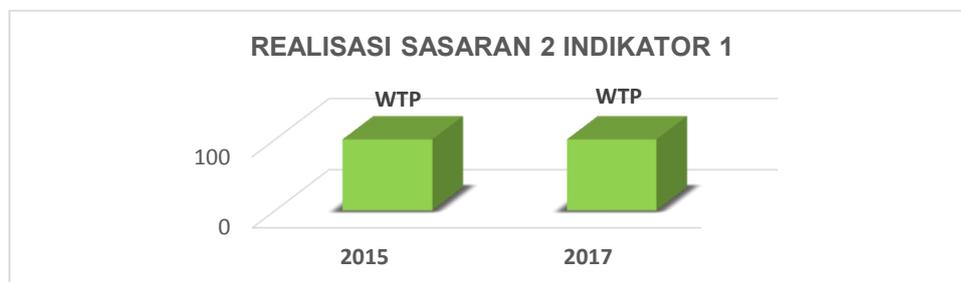
*Meningkatnya Transparansi,  
Akuntabilitas Kinerja Dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sasaran “**Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah**” diarahkan untuk mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Kinerja sasaran “**Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

**TabelCapaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 1**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	100	WTP	WTP	100

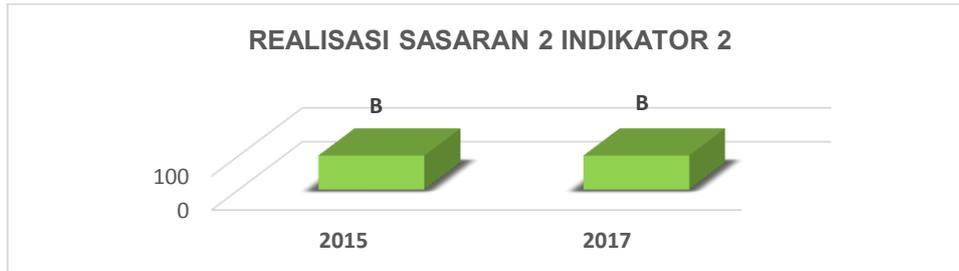


Target opini BPK dilingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 100% (untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016), dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Apabila dilihat dari capaian indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran1 Indikator 1 termasuk kategori “Sangat baik” (100%). Sedangkan untuk hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran Tahun 2017 belum terbit, Karena pada saat ini pemeriksaan sedang berlangsung.



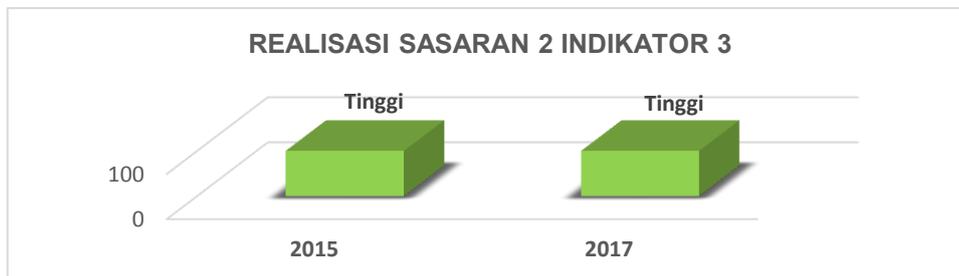
**Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 2**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	100	B	100	100



**Tabel Capaian Sasaran 2 Indikator Kinerja 3**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai LPPD	100	Tinggi	100	100



Untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas Kinerja Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain:

**a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**1. Opini Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah**

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Pacitan untuk tahun 2017 yang diperiksa pada tahun 2018 ini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sedangkan laporan keuangan tahun 2016 yang diperiksa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah



daerah sesuai dengan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 98/S-HP/XVIII.SBY/05/2017 Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2017. Hal ini tentunya merupakan hasil dari upaya dan kerja keras seluruh komponen dan seluruh pihak sehingga prestasi tersebut dapat diraih kembali setelah pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pacitan juga mendapatkan predikat WTP.

Indikator kinerja Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2017 mencapai kurang dari 90 hari atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 didukung dengan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dengan out put sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan tahun 2016 beserta lampiran
- Tersusunnya laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
- Tersusunnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## **2. Hasil Nilai Evaluasi SAKIP**

Sedangkan dalam bidang akuntabilitas kinerja, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 64,05 atau predikat predikat "B" (BAIK) sesuai dengan Surat Menteri PAN&RB Nomor B/228/AA.05/2018 Tanggal 23 Januari 2018. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja meskipun memerlukan sedikit perbaikan. Dalam pencapaian ini memang sangat diperlukan komitmen bersama dalam upaya peningkatan nilai akuntabilitas



kinerja tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan yaitu dengan melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka masa jabatan Kepala Daerah yang baru dan memenuhi rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Menteri PAN dan RB. Selain melaksanakan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan juga melaksanakan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021.

### **3. Persentase Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi**

Indikator kinerja Persentase kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi pada tahun 2017 sebesar 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target tahun 2017 yang dicapai melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan agenda kegiatan antara lain Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan konsultasi tertulis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kegiatan Pengembangan Kapasitas Dan Kapabilitas Unit Kerja Kelembagaan dengan agenda kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anjab dan ABK; Kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah dengan agenda kegiatan Rapat Kerja Bupati.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Output yang dihasilkan adalah laporan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari masing-masing Perangkat Daerah, Laporan



Hasil Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Rapat Kerja Bupati

**4. Persentase Kebijakan Pemerintahan Umum Yang Diterbitkan**

Indikator kinerja Persentase kebijakan pemerintahan umum yang diterbitkan tahun 2017 mencapai 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 didukung dengan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan dengan out put adalah Tersusunnya dokumen rupa bumi untuk 2 kecamatan yaitu Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar.

**5. Persentase Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Indikator kinerja Persentase Persentase regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2017 mencapai 26,32 % atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 26,32%. Capaian kinerja tahun 2017 didukung dengan kegiatan Penyusunan kebijakan bidang pemerintahan desa dengan out put :

- Peraturan Daerah tentang pencabutan atas beberapa Perda desa yang tidak berlaku.
- Peraturan Bupati tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
- Peraturan Bupati tentang struktur organisasi pemerintaha desa.
- Rancangan Peraturan Bupati tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan kewenangan desa

**6. Persentase Tertib Administrasi Pembangunan**

Indikator Kinerja 100% Tertib administrasi pembangunan pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudahmencapai



target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui pencapaian dari 3 kegiatan yang maksimal.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan dan kegiatan sebagai berikut : dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Koordinasi pelaksanaan administrasi pembangunan dengan output Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2017 sebesar 20% dan telah dicapai sebesar 20%
- Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan output Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan data sismontep sbg bahan evaluasi atas kinerja Bupati sebesar 20.00% dan telah dicapai sebesar 20.00%.
- Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dengan output Jumlah sasaran fisik yang dimonitor sebesar 100 paket dan telah dicapai sebesar 20%

#### **7. Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui ULP**

Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui ULP pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 167% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah melampaui target RPJMD tahun 2017 dikarenakan Optimalisasi program dan kegiatan di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Pacitan.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan dan 2 (dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan pemilihan barang dan jasa melalui



Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP) dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Implementasi e-Procurement dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui ULP dengan target 125 (seratus dua puluh lima) paket pekerjaan.
- Terlaksananya pemilihan penyedia barang jasa melalui e-proc, asistensi dan konsultasi RUP dengan target 100% dan 130 orang

#### **8. Cakupan Perjanjian Kerjasama Yang Ditangani**

Cakupan jumlah perjanjian kerjasama/Kesepakatan bersama (MoU) yang ditandatangani baik perjanjian kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan lembaga tingginegeri/swastapadatahun 2017menghasilkanebanyak 20 dokumen120%, dengan demikian telah melebihi target yang ditentukan yaitu 60% dari10 dokumen setiaptahun.

#### **9. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Diterbitkan**

Indikator Kinerja Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 45,95 % atau mencapai 44,75 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan serta telah tercapainya outcome sebagaimana tertuang dalam DPA OPD.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring bidang administrasi perekonomian dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Tersusunnya juknis Rastra 2017 dan terlaksananya perumusan kebijakan investasi



- Terlaksananya rapat koordinasi KP3 Kab. Pacitan dan Evaluasi pelaksanaan Program Minapolitan Lintas Sektor
- Terlaksananya monitoring industry kecil pedesaan, monitoring dan pelaporan harga sembakau, Rakor TPID kab. Pacitan, Rakor penanganan masalah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan
- Terlaksananya rapat koordinasi dan studi banding pelaksanaan pengembangan wisata daerah dan fasilitasi KUR

#### **10. Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Yang Diterbitkan**

Indikator Kinerja Persentase Kebijakan bidang sumber daya alam yang diterbitkan pada tahun 2017 sebesar 42,86 % atau mencapai 42 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan serta telah tercapainya outcome sebagaimana tertuang dalam DPA OPD.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring bidang administrasi perekonomian dengan output yang dihasilkan sebagai berikut : Terlaksananya koordinasi bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

#### **11. Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Diterbitkan**

Indikator kinerja Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diterbitkan pada tahun 2017 mencapai 42,86% atau telah mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 yaitu sebesar 24,86%. Capaian tersebut didukung dengan kegiatan memfasilitasi panata usahaan :

- Bantuan Sosial
- Bantuan Keuangan



- Bantuan Hibah

## **12. Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan**

Indikator Kinerja Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 63,72% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program dan kegiatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Tersusunnya dokumen Rancangan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## **13. Keterpaduan Program Pemerintah**

Indikator kinerja Keterpaduan program pemerintah pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD yaitu sebesar 100%.

## **14. Persentase Penyampaian Informasi Tentang Cukai Kepada Masyarakat Dan/ Pemangku Kepentingan**

Indikator Kinerja Persentase penyampaian informasi tentang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 95,90 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan kegiatan telah terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan serta telah tercapainya outcome sebagaimana tertuang dalam DPA OPD.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya koordinasi, pembuatan juklak, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).



## 15. Persentase Pengawasan Dan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan :

### - **Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT**

Indikator kinerja Pengawasan PKPT / Non PKPT pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, artinya capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan *out put* yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Laporan Hasil Reviu LKD;
- Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP OPD;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Perceraian.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 masih dapat mempertahankan capaian yang sama yakni 100%.

### - **Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan**

Indikator kinerja Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada tahun 2017 sebesar 90,5% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, artinya capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan *out put* yang dihasilkan adalah jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017



terjadi peningkatan sebanyak 0,34% yakni dari 90,16% menjadi 90,5%.

#### **16. Persentase Pemeriksa Pengawasan Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pengawas**

Indikator kinerja Persentase Pemeriksa Pengawasan yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengawas pada tahun 2017 sebesar 52,38% atau terjadi kelebihan sebesar 7,38% dari target RPJMD tahun 2017 yang telah ditetapkan, yakni sebesar 45%. Capaian atas kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan, dengan *out put* yang dihasilkan adalah jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti Diklat/ Bimtek Pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada awal periode RPJMD, data menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 9,88% yakni dari 42,5% menjadi 52,38%.

#### **17. Persentase Pedoman Sisdur Pengawasan Yang Disusun**

Indikator kinerja Persentase Pedoman Sisdur Pengawasan yang Disusun pada tahun 2017 sebesar 22% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 yang telah ditetapkan, artinya capaian tersebut sudah sama dengan target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut didukung dengan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan *out put* yang dihasilkan adalah jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan.

#### **18. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang disusun pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 yang telah ditetapkan, artinya capaian tersebut sudah sama dengan target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut



didukung dengan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan *out put* yang dihasilkan adalah jumlah dokumen penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 masih dapat mempertahankan capaian yang sama yakni sebesar 100%.

#### **19. Persentase Raperda Yang Ditetapkan Bersama**

Indikator Kinerja Prosentase Raperda yang ditetapkan bersama pada tahun 2017 sebesar 7 Perda atau mencapai 87.50% dari target 8 Raperda, atau 71.55% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan banyak Raperda yang pembahasannya pada bulan Desember tahun 2017, sehingga untuk penetapan Raperda diperkirakan tahun 2018

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda

#### **20. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan pada tahun 2017 mencapai nilai Baik ( B ), sesuai dengan terget tahun 2017 sudah memenuhi target yaitu 100%. Kecamatan di Kabupaten Pacitan sejumlah 12 pada tahun 2017 ini memperoleh nilai rata-rata kepuasan masyarakat Baik (B) , bahkan ada beberapa kecamatan yang mendapatkan nilai A (sangat baik) yaitu Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Pringkuku.

#### **21. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat Waktu**

Indikator kinerja Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Yang Tepat Waktu tahun 2017 mencapai



100% atau sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 yaitu 100%. Hal tersebut didukung dengan sistem pelayanan surat menyurat yang ada di bagian umum sudah sesuai dengan SOP dan tepat waktu pelayanan.

## **22. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik**

Indikator Kinerja Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik pada tahun 2017 sebesar 73,09 % atau mencapai 154,29 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan dan Administrasi Desa, kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ada 178 aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan dan administrasi desa.
- Ada 178 orang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa serta yang mendapatkan pembinaan dan monitoring keuangan desa.
- 210 orang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pelatihan Siskeudes ( Sistem keuangan Desa ).



### **23. Persentase Barang/ Aset Daerah Yang Teregistrasi**

Indikator Kinerja Persentase barang/ aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 karena semua barang daerah sampai dengan akhir bulan Desember 2017 sudah teregistrasi mencapai 100%.

### **24. Persentase Kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi) Yang Dimanfaatkan**

Indikator Kinerja Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan Diseminasi yang dimanfaatkan pada tahun 2017 sebesar 95% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Kelitbangan / Inovasi Daerah

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan Penelitian, Pengkajian Aktual dan Diseminasi dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pengkajian Aktual Bidang Sosial dan Pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (9 dokumen)
- Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (7 dokumen)
- Diseminasi Bidang Inovasi dan Teknologi (2 Paket Diseminasi)
- Bimtek Bidang Inovasi dan Teknologi (60 Orang).
- Koordinasi Penelitian Pembangunan Daerah (3 Kali Raker)



**25. Cakupan Pendapatan Daerah**

Indikator kinerja Cakupan pendapatan daerah pada tahun 2017 sebesar 1,6 trilyun atau mencapai 114.3 % dari target RPJMD yaitu sebesar 1,4 trilyun, hal tersebut karena adanya usaha inteksifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.

**26. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Indikator Kinerja Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025.

**27. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA**

Indikator Kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudahmencapai target RPJMD tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

**28. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA**

Indikator Kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudahmencapai target RPJMD tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.



**29. Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKP**

Indikator Kinerja Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKP sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

**30. Persentase Dokumen Dan Data Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Dihasilkan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase dokumen dan data perencanaan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan pada tahun 2017 sebesar 52,94 % atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 yang dicapai melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, didukung kegiatan sebagaimana berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
2. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya/
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
4. Penyusunan Analisis, Strategi dan Kerangka Regulasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
5. Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
6. Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka Regulasi Penanggulangan Kemiskinan; dan
7. Penyusunan Indikator Daerah Bidang Sosial Budaya

**31. Persentase Dokumen Dan Data Perencanaan Bidang Perekonomian Yang Dihasilkan**

Capaian Indikator Kinerja Persentase dokumen dan data perencanaan bidang perekonomian pada tahun 2017 sebesar



59,32 % atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 yang dicapai melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian didukung dengan 6 (enam) kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
3. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
5. Penyusunan Analisis, Strategi dan Kerangka Regulasi Pembangunan Bidang Ekonomi;
6. Penyusunan database Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

**32. Persentase Dokumen Dan Data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) Yang Dihasilkan**

Indikator Kinerja Persentase dokumen dan data Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yang dihasilkan sebesar 46,67 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan kegiatan Fasilitasi Perencanaan di wilayah strategis dan cepat tumbuh.

**33. Persentase Dokumen Dan Data Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah Dan SDA**

Indikator Kinerja Persentase dokumen dan data perencanaan bidang prasarana wilayah dan SDA pada tahun 2017 sebesar 66,20 % atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, dengan dukungan 6 (enam) kegiatan antara lain :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam;



2. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
4. Penyusunan Analisis, Strategi dan Kerangka Regulasi Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
6. Fasilitasi, Koordinasi dan Analisis Perencanaan Tata Ruang Daerah.

**b. Pertanahan**

**1. Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat**

Indikator Kinerja Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat pada tahun 2017 sebesar 38,17.% atau mencapai 88,2% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan melalui kegiatan Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program / kegiatan Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan output yang dihasilkan sebagai berikut : Presentase tanah aset daerah yang bersertifikat.



**c. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**1. Persentase Desa Dengan Administrasi Baik**

Indikator Kinerja Persentase Desa dengan Administrasi Baik pada tahun 2017 sebesar 80,72 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan dan Administrasi Desa, kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ada 178 aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan dan administrasi desa
- Ada 178 orang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa serta yang mendapatkan pembinaan dan monitoring keuangan desa.
- 210 orang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pelatihan Siskeudes ( Sistem keuangan Desa ).

Untuk mewujudkan sasaran 2 tersebut didukung melalui 26 (dua puluh enam) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 58.548.635.269,00 yang telah terealisasi senilai Rp 52.234.255.386,00 atau 89,22% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.314.379.883,00.



Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 2 :

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH bidang pemerintahan umum	695,717,000.00	686,015,800.00	98.61	9,701,200.00
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	5,730,729,000.00	5,258,511,442.00	91.76	472,217,558.00
		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Bidang Administrasi Pemerintahan	463,559,625.00	456,149,667.00	98.40	7,409,958.00
		Program Peningkatan Kerjasama Daerah	301,708,000.00	272,292,075.00	90.25	29,415,925.00
		Program koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi bidang administrasi pembangunan	777,822,562.00	758,909,270.00	97.57	18,913,292.00
		Program koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bidang administrasi perekonomian	511,243,500.00	437,632,775.00	85.60	73,610,725.00
		Program koordinasi, fasilitasi, dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat	449,928,625.00	430,671,935.00	95.72	19,256,690.00
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	671,569,187.00	667,934,470.00	99.46	3,634,717.00
		Program Sosialisai Ketentuan di Bidang Cukai	250,000,000.00	238,362,500.00	95.35	11,637,500.00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	220,135,000.00	203,662,700.00	92.52	16,472,300.00
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	20,863,562,000.00	17,203,889,717.00	82.46	3,659,672,283.00



	Program perencanaan pembangunan daerah	2,393,542,000.00	2,289,818,510.00	95.67	103,723,490.00
	Program perencanaan sosiai dan budaya	1,206,824,500.00	1,192,134,100.00	98.78	14,690,400.00
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,108,409,500.00	1,100,399,500.00	99.28	8,010,000.00
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	190,620,000.00	189,142,000.00	99.22	1,478,000.00
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1,143,460,000.00	1,130,280,000.00	98.85	13,180,000.00
	Program Kelitbangan/Inovasi Daerah	1,547,868,000.00	1,538,745,950.00	99.41	9,122,050.00
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7,057,095,250.00	6,963,529,910.00	98.67	93,565,340.00
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	3,738,037,450.00	3,716,163,790.00	99.41	21,873,660.00
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	5,070,000,000.00	3,669,281,962.00	72.37	1,400,718,038.00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,628,060,445.00	1,583,438,409.00	97.26	44,622,036.00
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1,236,259,500.00	1,162,513,462.00	94.03	73,746,038.00
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	542,350,000.00	512,400,552.00	94.48	29,949,448.00
	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	77,030,000.00	50,870,000.00	66.04	26,160,000.00



	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	155,640,000.00	93,191,200.00	59.88	62,448,800.00
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	517,464,125.00	428,313,690.00	82.77	89,150,435.00
		58,548,635,269.00	52,234,255,386.00	89.22	6,314,379,883.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 2 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 2 tahun 2017 mencapai 100,00% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yang pada tahun 2017 mencapai 89,22%.



**TUJUAN2:**

**MENINGKATNYA PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

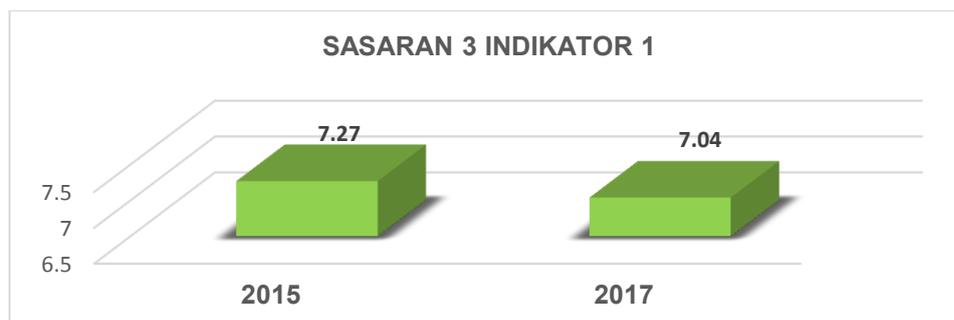
**SASARAN STRATEGIS3**

**Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan**

Sasaran “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan” diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan. Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 1:**

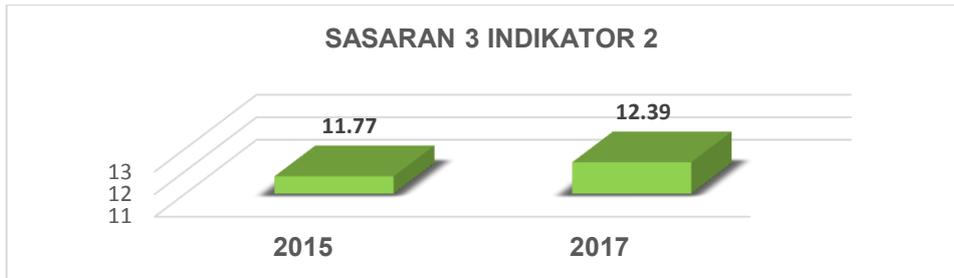
NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Rata Rata Lama Sekolah	7.27	7.31	7.04	96.31





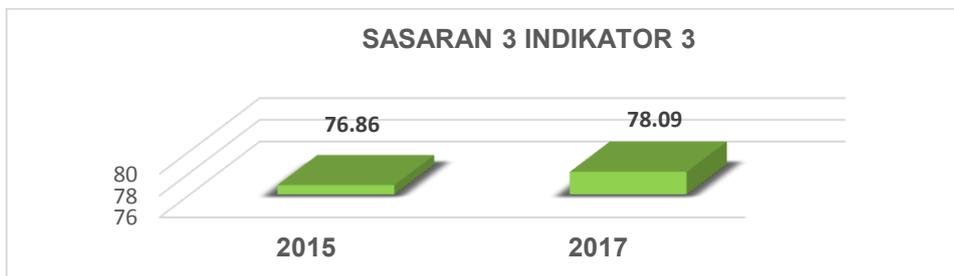
**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 2:**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	11.77	12.08	12.39	102.57



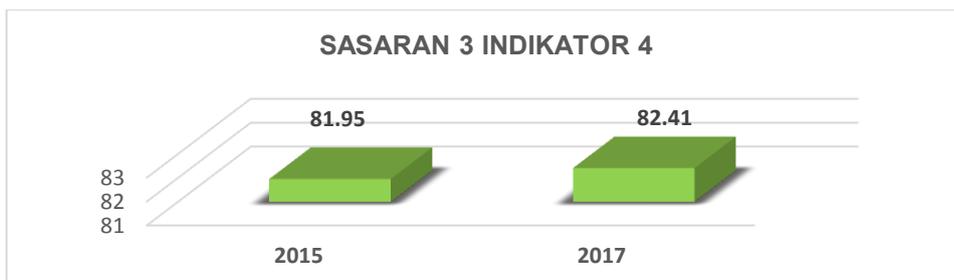
**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 3 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SD	76.86	77.14	78.09	101.23



**Tabel Capaian Sasaran 3 Indikator Kinerja 4 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai rata rata ujian SMP	81.95	82.23	82.41	100.22





Untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Pendidikan**

**1. APK PAUD**

Indikator Kinerja APK PAUD pada tahun 2017 sebesar 80,46% atau mencapai 100,30% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan anak usia dini dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah gedung PAUD yang dibangun
- Workshop kegiatan PAUD
- Tersalurkannya bantuan operasional penyelenggaraan PAUD

**2. Angka Partisipasi Murni (APM)**

**- SD/MI**

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 99,07% atau mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah gedung sekolah yang dibangun
- Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
- Pemberian hadiah juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi

**- SMP/MTs**

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 85,19% atau mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut



sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah gedung sekolah yang dibangun
- Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
- Pemberian hadiah juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi

### 3. Persentase Angka Kelulusan

#### - SD/MI

Indikator Kinerja Angka Kelulusan SD/MI sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- lomba siswa berprestasi
- Lomba di bidang kreativitas siswa dan kesenian
- Try Out Ujian Nasional dan Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional

#### - SMP/MTs

Indikator Kinerja Angka Kelulusan SD/MI sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Lomba siswa berprestasi
- Lomba di bidang kreativitas siswa dan kesenian
- Try Out Ujian Nasional dan Monitoring Pelaksanaan Ujian Nasional



#### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

##### - SD/MI/Paket A

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A sebesar 103,14% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah gedung sekolah yang dibangun
- Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
- Pemberian hadiah juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi

##### - SMP/MTs/Paket B

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B sebesar 98,75% atau mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah gedung sekolah yang dibangun
- Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
- Pemberian hadiah juara kelas dan peraih nilai ujian tertinggi

#### 5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Indikator Kinerja Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 7,04 tahun atau mencapai 96,31% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017. Tidak tercapainya capaian tersebut karena adanya perubahan metode perhitungan untuk menentukan rata-rata lama sekolah dari BPS. Metode yang



lama menggunakan penduduk 15 tahun ke atas sedangkan metode baru menggunakan penduduk 25 tahun ke atas.

#### **6. Angka Melek Huruf (AMH) Pada Usia 15 s/d 59 th**

Indikator Kinerja Angka Melek Huruf pada usia 15 s.d 59 tahun pada tahun 2017 sebesar 93,47% atau mencapai 100,15% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pendidikan non formal dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan Lembaga kursus
- Pelaksanaan ujian kejar paket
- Pembinaan lembaga pendidikan non formal

#### **7. Persentase Guru Yang Berkualifikasi Minimal S1**

##### **- SD/MI**

Indikator Kinerja Persentase guru yang berkualifikasi minimal S1 jenjang SD/MI sebesar 91,88% atau mencapai 104,41% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Verifikasi dan pembekalan PLPG serta pembinaan guru bersertifikasi
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- Penilaian angka kredit
- Pengembangan SIM PTK dan pembinaan PTK PNF

##### **- SMP/MTs**

Indikator Kinerja Persentase guru yang berkualifikasi minimal S1 jenjang SMP/MTs sebesar 96,01% atau mencapai 100,27% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan



program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Verifikasi dan pembekalan PLPG serta pembinaan guru bersertifikasi
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- Penilaian angka kredit
- Pengembangan SIM PTK dan pembinaan PTK PNF

#### **8. Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan**

Indikator Kinerja Nilai indeks kepuasan masyarakat bidang pendidikan sebesar 81,11% atau mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program manajemen pelayanan pendidikan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Sosialisasi Peraturan di Bidang Pendidikan
- Lokakarya survey pengaduan masyarakat

#### **b. Kepemudaan Dan Olah Raga**

##### **1. Jumlah Pemuda Pelopor**

Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 sebanyak 158 pemuda pelopor yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 target tersebut dapat dicapai melalui pembinaan pemuda pelopor dan pemilihan Calon Paskibraka di tingkat Kabupaten dan Propinsi

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Peranserta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Pemuda dan Kegiatan Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka

Dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Pembinaan Organisasi Pemuda yang dapat menghasilkan pemuda pelopor
- Seleksi Peserta Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi

## 2. Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi

Indikator Kinerja Persentase Cabang Olah Raga yang berprestasi pada tahun 2017 sebesar 62 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 yang pada tahun 2017 ditarget prosentase Cabang Olah Raga Berprestasi ini sebesar 62 % sehingga apabila kita bandingkan antara target dan realisasi terdapat capaian sebesar 100 %

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah dan Kegiatan Pembinaan Olah Raga yang Berkembang dimasyarakat kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Kabupaten
- Pemilihan Atlet Berprestasi
- Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat

Untuk mewujudkan sasaran 3 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 84.807.935.850,00 yang telah terealisasi senilai Rp 76.321.849.061 atau 89.99% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.486.086.789,00.

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 3**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,728,302,000.00	2,714,825,400.00	99.51	13,476,600.00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	76,497,499,099.00	68,239,108,957.00	89.20	8,258,390,142.00



	Program Pendidikan Non Formal	528,556,233.00	524,509,654.00	99.23	4,046,579.00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,773,306,084.00	1,685,176,600.00	95.03	88,129,484.00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,754,493,471.00	1,748,667,150.00	99.67	5,826,321.00
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	466,235,963.00	464,207,900.00	99.57	2,028,063.00
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1,059,543,000.00	945,353,400.00	89.22	114,189,600.00
		84,807,935,850.00	76,321,849,061.00	89.99	8,486,086,789.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 3 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 3 tahun 2017 mencapai 100,08% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yang pada tahun 2017 mencapai 89,99%.



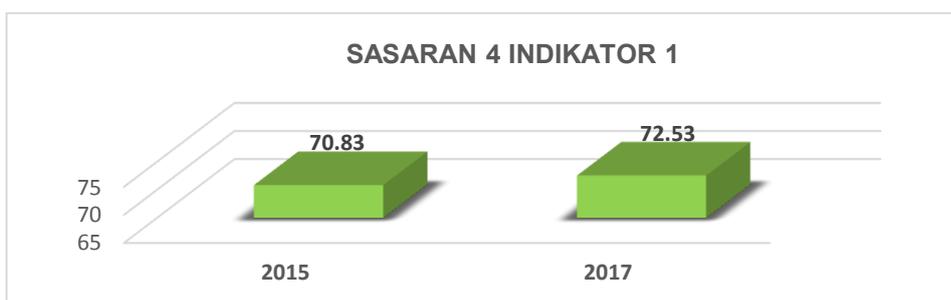
**SASARAN STRATEGIS4**

*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

Sasaran “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Pacitan. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” capaian indikator kerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

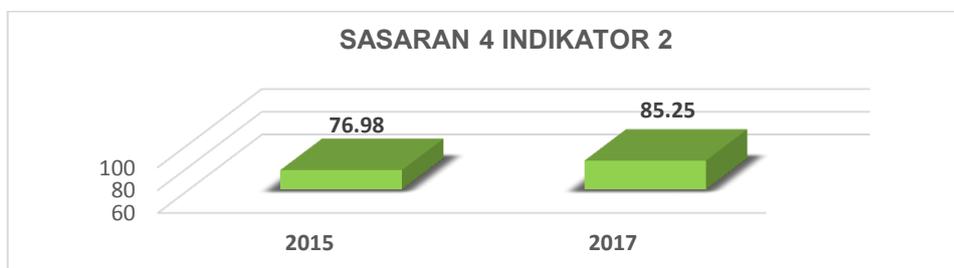
**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 1 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	70.83	71	72.53	102.15



**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 2 :**

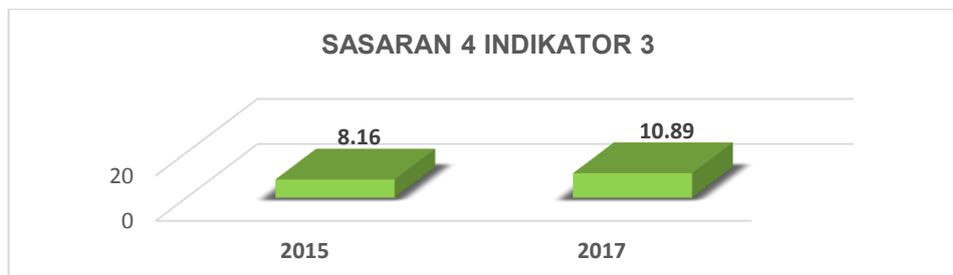
NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian ibu	76.98	76.42	85.25	89.64





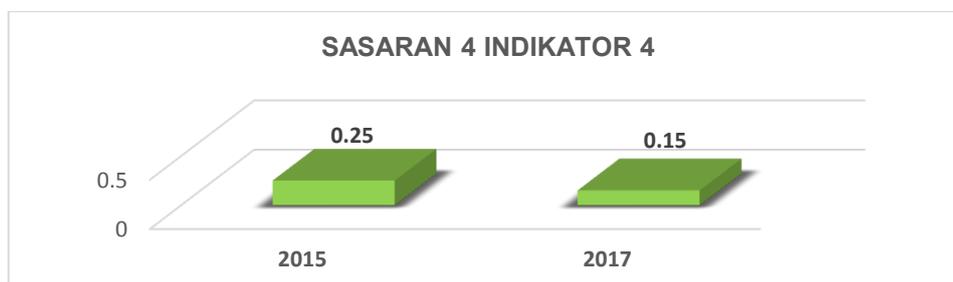
**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 3 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian bayi	8.16	8.25	10.89	75.76



**Tabel Capaian Sasaran 4 Indikator Kinerja 4 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0.25	0.23	0.15	153.33



Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Kesehatan**

**1. Cakupan Gedung Puskesmas/Pustu Dalam Kondisi Baik**

Indikator Cakupan Gedung Puskesmas/Pustu pada tahun 2015 mencapai 37,18% dengan kondisi sampai dengan tahun 2017 mencapai 47,44 per 1000 penduduk.

Capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 47,44 atau 100% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian ini telah



memenuhi target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah sarana prasarana Puskesmas yang terpelihara
- Jumlah Pustu direhab
- Jumlah Puskesmas yang direhab
- Jumlah pembangunan Poskesdes Kelurahan
- Jumlah rehabilitasi polindes/poskesdes

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2017 mencapai 47,44% Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan belum berhasil memenuhi kebutuhan sarana kesehatan sesuai standar di Kabupaten Pacitan

## **2. Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Representatif**

- **Persentase Ruang Rawat Inap Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja persentase Ruang Rawat Inap Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis dan kantor Rumah Sakit dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 75% atau mencapai 105,88% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui adanya pembangunan gedung baru maupun rehabilitasi bangunan lama.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program pengadaan , peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata / kegiatan sebagai berikut :



- Pembangunan instalasi pengolahan limbah, dengan output tersedianya jaringan instalasi pengolah limbah, gedung incenerator dan kelengkapannya.
- Pembangunan Gedung Kantor, dengan output tersedianya gedung kantor dan gedung penunjang rumah sakit yang representatif ( tahap awal struktur pondasi)
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK), dengan output tersedianya gedung rawat jalan dalam kondisi baik.
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD/ kegiatan sbb :
  - Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan, dengan output : pemeliharaan gedung dan bangunan rumah sakit.
  - Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan output tersedianya rumah dinas rumah sakit, gedung IPS/IPL, dan gedung ex ruang mawar untuk ruang laboratorium.
- Program pembinaan Lingkungan sosial bidang kesehatan/kegiatan sebagai berikut :
  - Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya, dengan output Tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok (pembangunan gedung radiologi).



- **Persentase Kelayakan Peralatan Pelayanan Pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik)**

Indikator Kinerja persentase kelayakan peralatan pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis (kondisi baik) pada tahun 2017 sebesar 89,80% atau mencapai 104,42% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui adanya pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata/ kegiatan sbb :
  - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit, dengan output tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit
- Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan/ kegiatan sbb :
  - Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya, dengan output Tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok

- **Persentase Jumlah Ambulance/Mobil Jenazah Yang Berfungsi Dengan Baik**

Indikator kinerja persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik pada tahun 2017 sebesar 88,9% atau mencapai



111,13% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui adanya pekerjaan pemeliharaan ambulance/ mobil jenazah.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD/kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan, dengan output Cost recovery rate

### **3. Persentase Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Indikator kinerja persentase penyediaan sarana pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 88,42% atau mencapai 118,73% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui adanya pengadaan alat-alat kedokteran umum yang bersumber dana dari DBHCHT.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan/ kegiatan Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya, dengan output Tersedianya peralatan kesehatan untuk penanganan penyakit akibat dampak rokok

### **4. Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Dengan Kebutuhan**

Indikator Ketersediaan Obat Sesuai Dengan Kebutuhan pada awal periode tahun 2015 mencapai 95% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 98,20%.



Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 98,20% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Obat dan Perbekalan Kesehatan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Jumlah pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi
- Jumlah pengadaan obat penunjang kesehatan
- Jumlah Operasional pelayanan obat dan perbekalan kesehatan di GFK
- Jumlah puskesmas dilayani pendistribusian obat

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 95% dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 98,20%, telah terjadi peningkatan selama 2 tahun sebesar 3,20%. Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan

#### **5. Persentase Kunjungan Puskesmas/Visit Rate**

Indikator Kunjungan Puskesmas/Visit Rate pada awal periode tahun 2015 mencapai 85,75% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 95,24%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 95,24% atau 109,79% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Puskesmas yang alkesnya dikalibrasi
- Jumlah puskesmas dilakukan pembinaan Program Pelayanan Kesehatan



- Jumlah unit pelayanan pelaksana pelayanan kesehatan dasar
- Operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
- Jumlah Sampel yang diperiksa
- Jumlah sasaran Evaluasi JKN Ke FKTP
- Jumlah unit pelaksana teknis menyelenggarakan pelayanan JKN
- Persentase kunjungan peserta BPJS ke FKTP
- Jumlah unit pelaksana teknis melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- Jumlah upaya kesehatan BOK yang dilaksanakan di Puskesmas
- Jumlah sarana prasarana Puskesmas yang terpelihara
- Jumlah Pustu direhab
- Jumlah Puskesmas yang direhab

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 85,75% sampai dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 95,24%, telah terjadi peningkatan selama 2 tahun sebesar 9,49%. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berhasil meningkatkan pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Pacitan

#### **6. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit**

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit pada tahun 2017 sebesar 14,62% atau mencapai 137,92% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui pemenuhan kebutuhan insentif dokter spesialis/ dokter umum.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program upaya kesehatan masyarakat / kegiatan peningkatan derajat



kesehatan masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan insentif dokter spesialis definitif
- Jasa pelayanan spesialis residen
- Jasa spesialis MOU dan dokter umum

#### **7. Persentase Karyawan Yang Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam Dalam Setahun**

Indikator kinerja persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun pada tahun 2017 sebesar 47,85% atau mencapai 106,26% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui adanya kegiatan outbond bagi pegawai/karyawan yang belum mengikuti.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan /kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis, dengan output jumlah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan

#### **8. Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar**

Indikator Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 23,68%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 23,68% atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan
- Jumlah sasaran Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas
- Jumlah dokumen data kesehatan



- Jumlah puskesmas dilakukan pendampingan Akreditasi Puskesmas
- Jumlah Puskesmas dengan Tingkat Kinerja PKP Baik
- Jumlah Perijinan Puskesmas

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2017 sebesar 23,68% Pemerintah Kabupaten Pacitan belum berhasil meningkatkan standarisasi puskesmas di Kabupaten Pacitan

#### **9. Cost Recovery Rate**

Indikator kinerja persentase jumlah ambulance/mobil jenazah yang berfungsi dengan baik pada tahun 2017 sebesar 78,33% atau mencapai 195,83% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan/ dicapai melalui peningkatan pelayanan sehingga mampu meningkatkan belanja .

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program sebagai berikut :

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD di dukung dengan kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan, dengan output Cost recovery rate. Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan output Cost recovery rate

#### **10. Cakupan Rumah Sehat**

Indikator Cakupan Rumah Sehat pada dengan kondisi sampai dengan tahun 2017 mencapai 75,13 per 1000 penduduk.

Capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 75,13 atau 100,17% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian ini telah memenuhi target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Jumlah pelaksanaan Tatanan Kabupaten Sehat
- Jumlah Titik Pantau Kabupaten Sehat yang Dibina
- Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
- Persentase KK disurvei KS
- Jumlah Desa Siaga Aktif Strata Madya Yang Dibina

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 mencapai angka 73,11% dan sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 75,13%. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan Cakupan Rumah Sehat yang ada di Kabupaten Pacitan.

#### **11. Cakupan Desa Siaga Aktif berstrata PURI**

Indikator Cakupan Desa Siaga Aktif pada awal periode tahun 2015 mencapai 8,77% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2017 mencapai 23,39%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 23,39% atau mencapai 199% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
- Persentase KK disurvei KS
- Jumlah Desa Siaga Aktif Strata Madya Yang Dibina
- Jumlah kader posyandu mendapat insentif
- Jumlah Posyandu Strata Madya yang dibina
- Jumlah Taman Posyandu Optimal

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 8,77% dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 23,39%, angka disini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan Desa Siaga Aktif berstrata PURI



## **12. Persentase Penanganan Penyakit Menular (Diare, DBD, Tb Paru dan pneumonia balita)**

Indikator Persentase Penanganan Penyakit Menular (Diare, DBD, TB Paru dan Pneumonia Balita) pada awal tahun 2015 adalah 100% dan sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 100% yang artinya seluruh penyakit menular telah mendapatkan penanganan.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 100% atau 100% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah fogging fokus demam berdarah
- Jumlah petugas/kader dilatih Fogging
- Prosentase bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
- Prosentase KLB ditangani < 24 jam
- Prosentase Puskesmas melaksanakan DQS
- Jumlah Pelatihan/Bimtek Penanganan Program P2
- Jumlah penemuan pasien TB
- Jumlah penemuan dan penanganan Pneumonia Balita
- Jumlah penemuan dan penanganan Diare

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 100% dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 100%, telah memenuhi target selama 2 tahun sebesar 100%. Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil melakukan penanganan terhadap penyakit menular yang ada di Kabupaten Pacitan

## **13. Cakupan Pelayanan Balita Gizi Buruk**

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2015 mencapai 100% dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 100%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 dan telah memenuhi target RPJMD



tahun 2017 dengan dukungan program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Motivator ASI yang dilatih
- Jumlah pembentukan KP ASI
- Jumlah pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gizi
- Jumlah kasus Balita Gizi Buruk
- Jumlah kasus Bumil Gizi Buruk

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 100% sampai dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 100%, telah terjadi capaian yang selalu tercapai target selama 2 tahun sebesar 100%.. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil memberikan penanganan terhadap balita yang mengalami gizi buruk, sehingga target nasional telah terpenuhi.

#### **14. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**

Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang pada awal periode tahun 2015 mencapai 99,83%, dengan kondisi sampai akhir tahun 2017 mencapai 100%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 100% atau 100,15% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian Kinerja ini telah memenuhi target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Persentase ibu bersalin yang memanfaatkan Jampersal
- Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang disediakan
- Jumlah Fasilitator Kelas Ibu
- Jumlah sasaran Monev PENAKIB/ Program GARSIA

Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 99,83% sampai akhir tahun 2017 mencapai 100%, telah terjadi peningkatan selama 2 tahun sebesar 0,017. Penurunan angka disini berarti Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meningkatkan jumlah kasus persalinan oleh tenaga kesehatan



dan meminimalkan persalinan oleh dukun di Kabupaten Pacitan.

#### **15. Cakupan Pelayanan Anak Balita Paripurna**

Indikator Cakupan Pelayanan Anak Balita pada tahun 2015 mencapai 86,6% dan kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 91,45%.

Capaian kinerja ini pada tahun 2017 mencapai 91,96% atau 105,45% dari target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja ini belum melampaui target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Persentase ibu bersalin yang memanfaatkan Jampersal
- Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang disediakan
- Jumlah Fasilitator Kelas Ibu
- Jumlah sasaran Monev PENAKIB/ Program GARSIA

Maka capaian kinerja sampai akhir tahun 2017 mencapai 91,96%. Pemerintah Kabupaten Pacitan belum berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap anak balita secara paripurna.

#### **16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut**

Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut pada awal periode tahun 2015 mencapai 55,11% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 88,34%.

Capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 88,34% atau 152,31% dari target RPJMD tahun 2017 dengan dukungan program Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah Posbindu PTM dibentuk
- Jumlah Pelatihan/Bimtek Petugas PTM
- Jumlah Posyandu Lansia



Maka capaian kinerja selama periode tahun 2015 sebesar 55,11% dan sampai akhir tahun 2017 mencapai 88,34%. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usia lanjut.

**b. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**1. Persentase Sekolah Dan Organisasi Kepemudaan Yang Mendapatkan KIE Reproduksi Remaja**

Indikator Kinerja Persentase Sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE Reproduksi Remaja pada tahun 2017 sebesar 35,20 % atau mencapai 101 % dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 35%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan yaitu Program Kesehatan Reproduksi Remaja / Kegiatan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dan
- Meningkatnya pelayanan PUS yang ingin ber KB

Pada tahun 2017 jumlah sekolah dan organisasi kepemudaan yang mendapatkan KIE tentang KRR sebanyak 62 Sekolah dan Organisasi Kepemudaan sedangkan jumlah sekolah dan organisasi kepemudaan yang ada adalah sebanyak 176 sekolah dan organisasi kepemudaan.

**2. Persentase Sekolah Dan Pondok Pesantren Yang Telah Membentuk PIK-R**

Indikator Kinerja Persentase Sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK-R pada tahun 2017 sebesar 18,6 % atau mencapai 124 % dari target RPJMD tahun



2017 yaitu 15%, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR / kegiatan pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dan kegiatan Fasilitasi pendataan keluarga output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya pelayanan informasi dan konseling KRR
- Tersedianya informasi data keluarga di Desa/Kelurahan tiap-tiap keluarga

Pada tahun 2017 jumlah sekolah dan pondok pesantren yang telah membentuk PIK R adalah sebanyak 37 Sekolah dan Pondok Pesantren sedangkan jumlah sekolah dan pondok pesantren adalah sebanyak 198 sekolah dan pondok pesantren.

### **3. Cakupan PUS Anggota UPPKS Yang Ber KB Mandiri**

Indikator Kinerja Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri pada tahun 2017 sebesar 74,1 % atau mencapai 100,27 % dari target RPJMD tahun 2017 yaitu sebesar 73,9%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB/KR yang mandiri / kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin dan kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS (Pos Daya)dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi kelompok UPPKS 60 orang
- Terpilihnya posdaya berprestasi



Pada tahun 2017 jumlah anggota UPPKS yang ber KB mandiri adalah sebanyak 1.215 akseptor sedangkan jumlah PUS anggota kelompok UPPKS sebanyak 1.640 orang

#### **4. Cakupan Kelompok BKB Holistik Integratif ber KB**

Indikator Kinerja Cakupan kelompok BKB Holistik Integratif ber KB pada tahun 2017 sebesar 43,90 % atau mencapai 118 % dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 37,20%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/kegiatan yaitu Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU kegiatan Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU dengan output yang dihasilkan Terbentuknya Taman Posyandu

Pada tahun 2017 jumlah anggota BKB adalah sebanyak 7.829 orang sedangkan jumlah pasangan usia subur anggota BKB Holistik Integratif di Kabupaten Pacitan sebanyak 17.795 orang.

Untuk mewujudkan sasaran 4 tersebut didukung melalui 19 (Sembilan Belas) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 162.939.648.303,00 yang telah terealisasi senilai Rp 156.226.536.602,75 atau 95,88% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.713.111.100,25



Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 4

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	17,449,839,000.00	16,790,831,242.00	96.22	659,007,758.00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah Sakit paru-paru/rumah sakit mata	13,022,354,293.00	12,368,476,139.00	94.98	653,878,154.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	3,836,410,609.00	3,704,401,637.00	96.56	132,008,972.00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,635,000,000.00	6,123,887,928.00	92.30	511,112,072.00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	40,774,425,701.00	32,197,727,232.00	78.97	8,576,698,469.00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	1,876,880,000.00	1,863,850,000.00	99.31	13,030,000.00
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	274,075,000.00	272,858,650.00	99.56	1,216,350.00
		Program standarisasi pelayanan kesehatan	4,985,756,000.00	4,466,162,158.00	89.58	519,593,842.00
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	65,435,000,000.00	71,468,090,662.75	109.22	(6,033,090,662.75)
		Program pengembangan lingkungan sehat	595,000,000.00	492,248,400.00	82.73	102,751,600.00
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,805,000,000.00	1,595,174,960.00	88.38	209,825,040.00
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	720,000,000.00	701,121,040.00	97.38	18,878,960.00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	570,000,000.00	493,493,963.00	86.58	76,506,037.00
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2,417,189,000.00	1,151,766,041.00	47.65	1,265,422,959.00
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	60,000,000.00	54,258,000.00	90.43	5,742,000.00
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	34,903,125.00	34,804,300.00	99.72	98,825.00		



	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	23,564,075.00	23,560,500.00	99.98	3,575.00
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	2,411,351,000.00	2,410,923,250.00	99.98	427,750.00
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	12,900,500.00	12,900,500.00	100.00	-
		162,939,648,303.00	156,226,536,602.75	95.88	6,713,111,700.25

Dari tabel capaian kinerja sasaran 4 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 4 tahun 2017 mencapai 105,22% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yang pada tahun 2017 mencapai 95.88% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.713.111.100,25.



**TUJUAN 3 :**

**Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

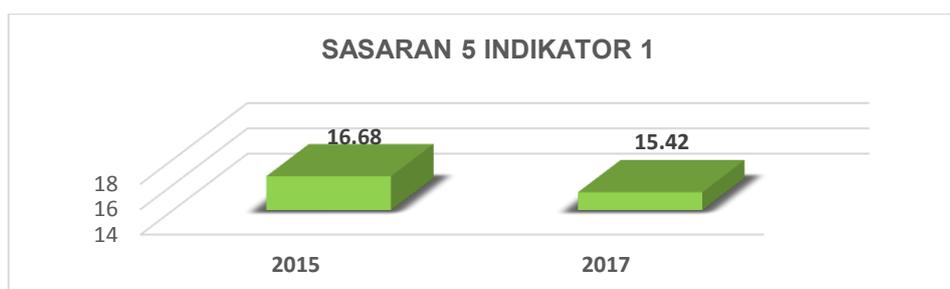
**SASARAN STRATEGIS5**

**Menurunnya Angka Kemiskinan**

Sasaran “**Menurunnya Angka Kemiskinan**” diarahkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemberdayaan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja. Pencapaian kinerja sasaran Kinerja sasaran “**Menurunnya Angka Kemiskinan**” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut :

**Tabel Target Kinerja Sasaran 5**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	16.68	15.8	15.42	97.59



Untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**1. Cakupan Jumlah Kader Dalam Kelompok Tribina**

Indikator Cakupan Jumlah Kader dalam Kelompok Tribina pada tahun 2017 sebesar 46,10% atau mencapai 104,53% dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 44,10%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/kegiatan Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga / kegiatan Pelatihan Kader dan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pelatihan ketrampilan tenaga pendamping kelompok tribina dan PPKS sebanyak 235 orang

Pada tahun 2017 jumlah kader tribina terlatih sebanyak 2.441 orang sedangkan jumlah seluruh kader tribina di Kabupaten Pacitan sebanyak 5.305 orang.

## **2. Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**

Indikator Kinerja Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need) pada tahun 2017 sebesar 8,16% atau mencapai 110,29% dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 9%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/kegiatan yaitu Program Keluarga Berencana / kegiatan penyediaan pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Tersedianya alat obat kontrasepsi
- Tersedianya sarana pelayanan KB

Pada tahun 2017 jumlah unmeet need sebanyak 9.960 orang sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 121.911 orang.

## **3. Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Indikator Kinerja Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat pada



tahun 2017 sebesar 8,28 % atau mencapai 165,6 % dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 5 %, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Keluarga Berencana kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Tersedianya alat kontrasepsi impant 1 batang sebanyak 165 set

Pada tahun 2017 jumlah Pemasangan kontrasepsi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah sebanyak 165 set sedangkan jumlah akseptor implant sebanyak 1.991 orang

#### **4. Persentase Angkatan Kerja Perempuan**

Indikator Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 sebesar 76,40 % atau mencapai 96,1 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 yaitu 79,50 % . ( - 3,1 )

Hal tersebut terjadi karena antara lain adanya ketentuan moratorium di lingkup pemerintah daerah, sehingga sampai saat ini belum ada peluang penerimaan angkatan kerja di instansi pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pacitan sebanyak 172.814 orang sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan usia 15 tahun keatas sebanyak 226.195 orang.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan / kegiatan Fasilitasi peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) , Pembinaan organisasi wanita, dalam rangka pengentasan



kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan

**b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**1. Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Mendapat Bantuan Modal**

Indikator Kinerja persentase peningkatan usaha mikro yang mendapat bantuan modal pada awal periode tahun 2015 mencapai 1,43 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,01 % atau mencapai 1,44 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kegiatan fasilitasi dana bergulir dengan output yang dihasilkan adalah jumlah koperasi, LKM dan Usaha Mikro penerima dana bergulir

**2. Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru**

Indikator Kinerja persentase peningkatan jumlah wirausaha baru pada awal periode tahun 2015 mencapai 3,07 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,41 % atau mencapai 3,48 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, kegiatan Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu ( PLUT ), dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.



**c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**1. Persentase permukiman layak huni**

Indikator Kinerja Persentase layak huni pada tahun 2017 sebesar 99,79 % atau mencapai 99,83 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .dikarenakan/dicapai melalui kegiatan Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa Peningkatan jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Pembangunan MCK . Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman / Kegiatan Peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum dengan output yang dihasilkan adalah Adanya permukiman yang layak huni

**d. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)**

Indikator Kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD) pada tahun 2017 sebesar 6,28 % atau mencapai 103,12% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dan Kegiatan Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Ada 12 SD dan 54 PAUD di desa di Kabupaten Pacitan yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- Ada 70 desa dengan tertib administrasi bantuan keuangan dan hibah di Kabupaten Pacitan
- Ada 21 desa yang mendapatkan program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur dengan BRTSM, PFK, PK2
- Ada 171 LPMD/K yang mendapatkan pelatihan peran fungsi kelembagaan

## **2. Persentase pertumbuhan lembaga ekonomi pedesaan**

Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Lembaga Ekonomi Pedesaan pada tahun 2017 sebesar 2,42 % atau mencapai 104 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) pedesaan dan gelar TTG, kegiatan Pembinaan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) dan kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ada 6 BUMDesa yang dibimbing dalam rangka peningkatan SDM bagi pengelola BUMDesa dan terpilihnya juara LOmba BUMDesa
- Ada 1 event gelar TTG tingkat Nasional yang diikuti yaitu di kota Palu, Sulawesi Tengah
- Ada 2 desa yang mendapatkan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
- Ada 76 peserta pembinaan pengelolaan Pasar Desa dan terpilihnya Juara Lomba Pasar Desa.



### **3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**

Indikator Kinerja Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 sebesar 117 % atau mencapai 432 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ada 3 kecamatan dan 12 desa yang mendapatkan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- Ada 12 kecamatan yang melaksanakan kegiatan BBGRM dan terpilihnya desa Wareng Kecamatan Punung sebagai juara Lomba Gotong Royong dan mewakili ke Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi Jawa Timur

#### **e. Transmigrasi**

##### **1. Persentase transmigran yang ditempatkan**

Indikator Kinerja persentase transmigrasi yang ditempatkan pada awal periode tahun 2015 mencapai 100 % tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Fasilitasi Transmigrasi, kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dengan output yang dihasilkan



adalah jumlah transmigran dan bantuan fasilitas penempatan transmigran

**f. Tenaga Kerja**

**1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Indikator persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada awal periode tahun 2015 mencapai 75 % tidak mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan cenderung stabil sebesar 75 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan kualitas dan produktivitas Angkatan Kerja, kegiatan Pelatihan Masyarakat Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan output yang dihasilkan adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan pakan ternak

**2. Persentase Pembinaan Tenaga Kerja**

Indikator Kinerja persentase pembinaan tenaga kerja pada awal periode tahun 2015 mencapai 100 % tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun 2017 dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, dengan output yang dihasilkan adalah jumlah peserta yang dilatih teknik otomotif sepeda motor, teknik las fabrikasi, dan teknik bangunan furniture

Untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung melalui 9 (Sembilan) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.6.723.852.145,00 yang telah terealisasi senilai Rp 6.016.028.101,00



atau 89.47% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 707.824.044.00

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 5**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	45,797,000.00	45,789,500.00	99.98	7,500.00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	300,000,000.00	293,713,200.00	97.90	6,286,800.00
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	2,662,000,000.00	2,481,068,750.00	93.20	180,931,250.00
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	317,932,250.00	317,225,220.00	99.78	707,030.00
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	217,389,687.50	192,382,600.00	88.50	25,007,087.50
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,005,758,382.50	579,237,155.00	57.59	426,521,227.50
		Program Keluarga Berencana	1,886,315,750.00	1,820,198,176.00	96.49	66,117,574.00
		Program pelayanan kontrasepsi	202,522,075.00	201,436,500.00	99.46	1,085,575.00
		Program Fasilitasi Transmigrasi	86,137,000.00	84,977,000.00	98.65	1,160,000.00
			6,723,852,145.00	6,016,028,101.00	89.47	707,824,044.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 5 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 5 tahun 2017 mencapai 97.59% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 5 yang pada tahun 2017 mencapai 89.47% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 707.824.044.00



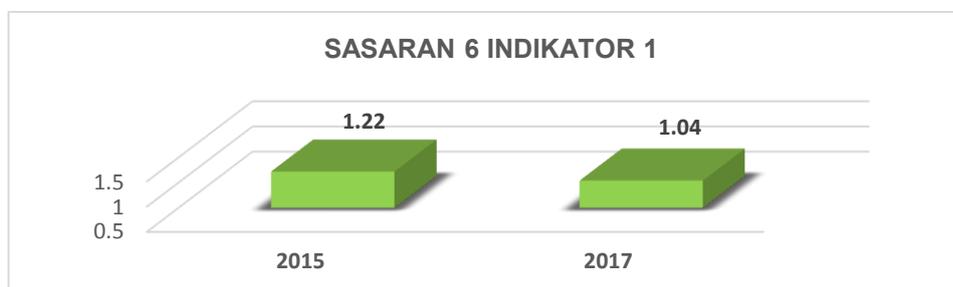
**SASARAN STRATEGIS6**

**Menurunnya Pengangguran**

Sasaran “**Menurunnya Pengangguran**” diarahkan untuk menumbuhkan minat usaha dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “**Menurunnya Pengangguran**” capaian indikator kinerja dapat dilihat dari sebagai berikut:

**Tabel Target Kinerja Sasaran 6**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.22	1.04	1.04	100



Untuk menurunkan pengangguran di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

**1. Persentase Angkatan Kerja Perempuan**

Indikator Kinerja Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 sebesar 76,40 % atau mencapai 96,1 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 yaitu 79,50 % . ( - 3,1 )



Hal tersebut terjadi karena antara lain adanya ketentuan moratorium di lingkup pemerintah daerah, sehingga sampai saat ini belum ada peluang penerimaan angkatan kerja di instansi pemerintah daerah.

Pada tahun 2017 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Pacitan sebanyak 172.814 orang sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan usia 15 tahun keatas sebanyak 226.195 orang.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan / kegiatan Fasilitasi peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Pembinaan organisasi wanita, dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan permodalan dan sarana produksi dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan

**b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**1. Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru**

Indikator Kinerja persentase peningkatan jumlah wirausaha baru pada awal periode tahun 2015 mencapai 3,07 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,41 % atau mencapai 3,48 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, kegiatan Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu ( PLUT ), dengan output yang dihasilkan adalah Terlaksananya kegiatan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.



## c. Tenaga Kerja

### 1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada awal periode tahun 2015 mencapai 75 % tidak mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan cenderung stabil sebesar 75 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan kualitas dan produktivitas Angkatan Kerja, kegiatan Pelatihan Masyarakat Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan output yang dihasilkan adalah jumlah peserta pelatihan pembuatan pakan ternak

### 2. Persentase Pembinaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja persentase pembinaan tenaga kerja pada awal periode tahun 2015 mencapai 100 % tidak mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun 2017 dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan, kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, dengan output yang dihasilkan adalah jumlah peserta yang dilatih teknik otomotif sepeda motor, teknik las fabrikasi, dan teknik bangunan furniture.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung melalui 4 (empat) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.2.096.517.900,00 yang telah terealisasi senilai Rp 2.027.940.145,00 atau 96.73% dari pagu anggarannya, dari



pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 68.577.755,00

**Tabel Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran 6**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
6	Menurunnya Pengangguran	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	405,656,900.00	402,733,065.00	99.28	2,923,835.00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	410,302,000.00	402,031,000.00	97.98	8,271,000.00
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	580,559,000.00	529,272,080.00	91.17	51,286,920.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan	700,000,000.00	693,904,000.00	99.13	6,096,000.00
			2,096,517,900.00	2,027,940,145.00	96.73	68,577,755.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 6 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 6 tahun 2017 mencapai 100% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 6 yang pada tahun 2017 mencapai 96.73% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 68.577.755,00.



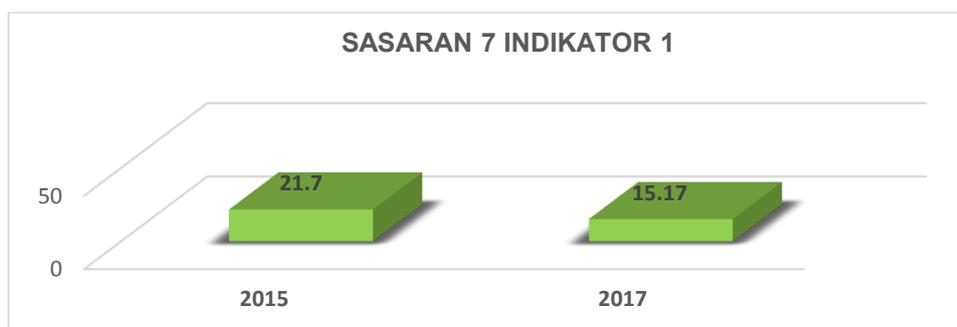
**SASARAN STRATEGIS7**

*Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*

Sasaran “**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” diarahkan untuk peningkatan peran perempuan dan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial. Pencapaian sasaran “**Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**” capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	21.7	21.7	15.17	143.05



Untuk menurunkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Sosial**

**1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Bantuan**

Indikator Kinerja Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan



pada tahun 2017 sebesar 50288 atau mencapai 84,83 dari target RPJMD tahun 2017, 59276 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 84,83 %.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan : Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskis ,KAT dan penyandangP MKS lainnya,Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial ,Pemberdayaan Kelembagaan Kesos dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Penyandang PMKS yang menerima bantuan tahun 2017.

**2. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten / Kota Yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat**

Indikator Kinerja Persentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat pada tahun 2017 sebesar 903 atau mencapai 40,13 % dari target RPJMD tahun 2017, 60 % capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 40,13 %

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah korban bencana yang penerima bantuan selama masa tanggap darurat tahun 2017

**3. Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina**

Indikator Kinerja Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina pada tahun 2017 sebesar 810 atau mencapai 54% dari target RPJMD tahun 2017, 80% capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 54 %.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskis ,KAT dan penyandang PMKS lainnya,Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial dengan



gan output yang dihasilkan adalah Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Dibina tahun 2017

#### **4. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pemberdayaan**

Indikator Kinerja Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan pada tahun 2017 sebesar 97 atau mencapai 60,62 % dari target RPJMD tahun 2017, 66,9 % capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 60,62 %

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskis ,KAT dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan gan output yang dihasilkan adalah Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan tahun 2017

#### **b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

##### **1. Persentase Advokasi Dan Fasilitasi PUG Dan Anak**

Indikator Kinerja Advokasi dan fasilitasi PUG dan anak pada tahun 2017 sebesar 38,19 % atau mencapai 100,5 % dari target RPJMD tahun 2017 yaitu 38%, capaian tersebut telah mencapai target RPJMD tahun 2017 adalah 38% . (+0,19%).

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Meningkatnya dokumen profil gender dan anak
- Meningkatnya jumlah peserta forum anak Kabupaten , Kecamatan, Desa /Kelurahan.



- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran anak atas hak-haknya
- Terpilihnya perwakilan anak Pacitan sebagai pengurus forum anak tingkat nasional.
- Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat , pemerintah , DU/DI atas hak-hak anak yang terwujud dalam eksistensi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

Pada tahun 2017 jumlah advokasi dan fasilitasi PUG adalah sebanyak 104.933 orang sedangkan jumlah perempuan dan anak adalah sebanyak 338.337 orang

## **2. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih**

Indikator Kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2017 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 adalah 100%. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti oleh pelayanan terpadu sebanyak 17 kasus sedangkan jumlah kasus yang dilaporkan ke unit pelayanan terpadu yaitu 17 kasus.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak / kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kegiatan Peningkatan SDM Tim pelaksana P2TP2A, dengan output yang dihasilkan adalah :

- Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak.
- Meningkatnya ketrampilan SDM Tim pelaksana P2TP2A



### 3. Persentase Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Indikator Kinerja Persentase Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2017 sebesar 88,50 atau mencapai 101,59 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Ada 33 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang mendapatkan pelatihan usaha ekonomi produktif dan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif.
- Ada 171 desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Untuk mewujudkan sasaran7 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.22.566.345.882,50 yang telah terealisasi senilai Rp 2.286.952.753,00 atau 89.11% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 279.393.129,50

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 7**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
7	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpendil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya	594,007,270.00	587,027,650.00	98.82	6,979,620.00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	362,250,000.00	357,636,500.00	98.73	4,613,500.00



	Program pembinaan eks penyandang penyakit sostal (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	155,887,000.00	152,810,500.00	98.03	3,076,500.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	399,420,000.00	396,927,000.00	99.38	2,493,000.00
	Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender Dan Anak	61,427,600.00	61,379,600.00	99.92	48,000.00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	82,353,000.00	73,314,650.00	89.02	9,038,350.00
	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	911,001,012.50	657,856,853.00	72.21	253,144,159.50
		2,566,345,882.50	2,286,952,753.00	89.11	279,393,129.50

Dari tabel capaian kinerja sasaran 7 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 7 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 7 tahun 2017 mencapai 143.05% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 7 yang pada tahun 2017 mencapai 89.11% dan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 279.393.129,50.



**TUJUAN 4 :**

*“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah”*

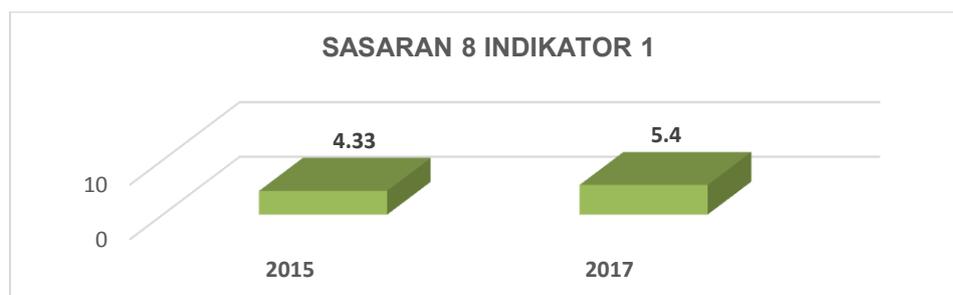
**SASARAN STRATEGIS8**

*Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah*

Sasaran **“Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah”** diarahkan untuk meningkatkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena sampai dengan diterbitkannya LKj.IP Kabupaten Pacitan Tahun 2017 data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum dirilis, maka pencapaian sasaran **“Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah”** untuk realisasi indikator kinerjanya merupakan angka proyeksi dan dapat dilihat dari sebagai berikut

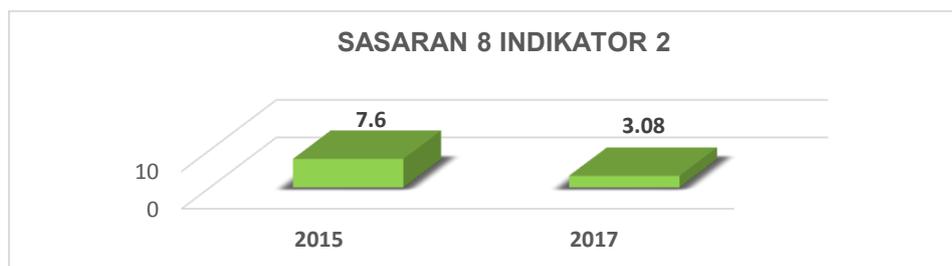
**Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 1**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.33	5.63	5.4 **	95.91



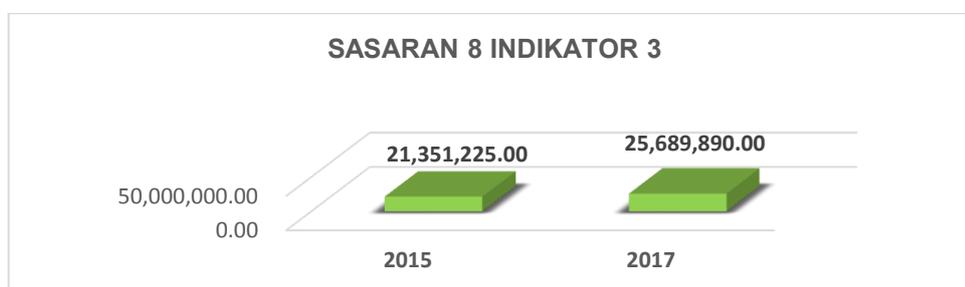
**Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 2**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Inflasi	7.6	7.03	3.08 **	228.25



Tabel Target Kinerja Sasaran 8 Indikator 3

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	PDRB Per Kapita	21,351,225.00	25,686,898.00	25,689,890.00 **	100.01



Untuk Memperkuat Kondisi Perekonomian Daerah di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Penanaman Modal**

**1. Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah)**

Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah) pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.138.317.096.973,00 atau mencapai 156% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dicapai melalui meningkatnya realisasi investasi PMDN berskala nasional, PMDN Non Fasilitas, APBD II, APBD I dan APBN.

Capaian kinerja Tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan peningkatan manajemen investasi Daerah Kabupaten Pacitan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :



- Terealisasinya nilai investasi swasta yang melakukan kegiatan penanaman modal;
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pembangunan; dan
- Terealisasinya nilai investasi pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 156% atau Rp. 1.138.317.096.973,00 dan mengalami peningkatan.

## **2. Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN**

Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (%) pada tahun 2017 sebesar 7.6% atau mencapai 152% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan output yang dihasilkan adalah Naiknya realisasi investasi.

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 152% atau 7.6 persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN

## **3. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan iklim investasi dan realisasi dengan kegiatan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan



Terpadu Satu Pintu dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Pengajuan izin yang diproses sesuai standart pelayanan

#### **4. Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja)**

Indikator Kinerja Lama proses izin usaha Penanaman Modal (hari kerja) pada tahun 2017 sebesar 2 hari kerja atau mencapai 40% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan iklim investasi dan realisasi dengan kegiatan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan output yang dihasilkan adalah Ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standart layanan

Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 40% atau 2 hari kerjadan capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 100% atau 2.727 surat izin dan mengalami peningkatan.

#### **5. Jumlah Perda / Perbup Dan Kebijakan Yang Mendukung Iklim Investasi**

Indikator Kinerja Jumlah Perda / Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi pada tahun 2017 sebesar 2 dokumen atau mencapai 50% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 ketersediaan regulasi yang masih relevan untuk mendukung iklim investasi

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program peningkatan iklim investasi dan realisasi dengan output yang dihasilkan adalah terpenuhinya regulasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 50% atau 2 dokumen dan mengalami penurunan sebesar 50%.



**b. Energi Dan Sumber Daya Mineral**

**1. Persentase Permohonan Izin Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Dilayani**

Indikator kinerja Persentase permohonan izin energi dan sumber daya mineral yang dilayani pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa “Kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi”, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 sudah tidak boleh mengeluarkan izin terkait dengan masalah energy dan sumber daya mineral baik izin baru, perubahan maupun izin perpanjangan.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energy dan Sumber Daya Mineral dengan kegiatan Fasilitasi izin ESDM dengan output yang dihasilkan adalah Pemenuhan fasilitasi pengajuan izin ESDM dan capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 100%.



### c. Perdagangan

#### 1. Persentase Komoditas Perdagangan Yang Diawasi Peredarannya

Indikator kinerja persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2017 didukung dengan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan kegiatannya antara lain Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Peningkatan layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP, Sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan output yang di hasilkan sebagai berikut :

- Jumlah pengawasan peredaran barang penting dan jasa
- Terlaksananya layanan tera dan tera ulang alat UTTP
- Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen

#### 2. Persentase Rata-Rata Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Persentase rata rata pasar daerah dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 85% atau mencapai 103,03% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 82,5%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2017 didukung Program Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah, Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah dengan output yang dihasilkan adalah

- Jumlah Rehap dan pemeliharaan pasar daerah
- Jumlah pasar yang terbina/terevaluasi



### **3. Omset Penjualan Komoditas Unggulan**

Indikator Kinerja Omzet Penjualan komoditas unggulan pada tahun 2017 sebesar 762 Milyard atau mencapai 101.19% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 753 Milyar, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2017 didukung Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan diantaranya yaitu : Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, Revitalisasi Pasar Daerah, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Jumlah pameran produk unggulan daerah,
- Jumlah paket sembako bagi masyarakat kurang mampu melalui tersedianya paket sembako murah
- Jumlah pasar daerah yang direvitalisasi

### **4. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**

Indikator Kinerja Persentase cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2017 sebesar 13,75 % atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian Kinerja tahun 2017 didukung Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan dengan Output yang dihasilkan adalah Jumlah pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

### **5. Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal**

Indikator Kinerja Persentase Barang Kena Cukai Ilegal pada tahun 2017 sebesar 0.1 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 0,1% capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2017 didukung dengan Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang



Perdagangan dengan kegiatannya yaitu Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai dengan Output yang di hasilkan adalah Jumlah Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai dan atau yang tidak dilekati Pita Cukai

Untuk mewujudkan sasaran8 tersebut didukung melalui 8 (delapan) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.2.566.345.882,50 yang telah terealisasi senilaiRp 2.286.952.753,00 atau 89.11% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 279.393.129.50

**TabelCapaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 8**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
8	Menguatnya Kondisi Perekonomian Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	280,960,000.00	270,924,250.00	96.43	10,035,750.00
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	540,734,500.00	539,947,100.00	99.85	787,400.00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	40,036,500.00	40,029,500.00	99.98	7,000.00
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	211,930,387.00	211,858,700.00	99.97	71,687.00
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	1,450,000,000.00	1,449,498,900.00	99.97	501,100.00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2,596,570,000.00	2,578,723,800.00	99.31	17,846,200.00
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	50,000,000.00	49,695,000.00	99.39	305,000.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	50,000,000.00	48,870,400.00	97.74	1,129,600.00
			5,220,231,387.00	5,189,547,650.00	99.41	30,683,737.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 8 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 8 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 8 tahun 2017



mencapai 141.39 % atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 8 yang pada tahun 2017 mencapai 89.11% akan tetapi masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 279.393.129.50



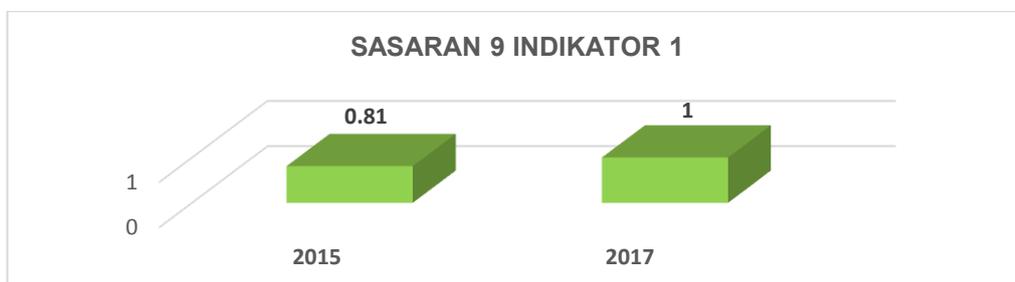
**SASARAN STRATEGIS9**

**Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi**

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi” diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi. Pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi”** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut

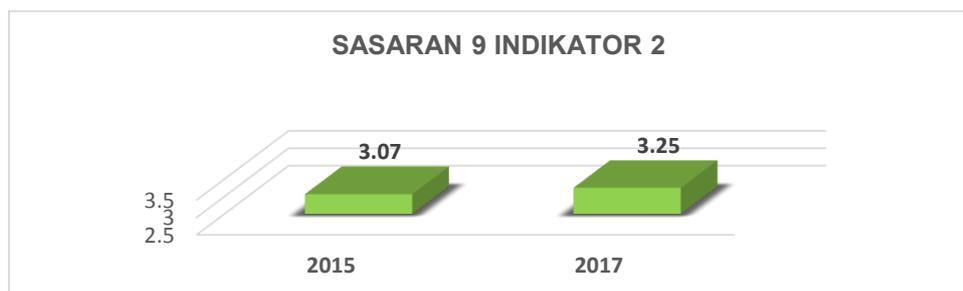
**Tabel Kinerja Sasaran 9 Indikator 1 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Mandiri	0.81	1.21	1	82.64



**Tabel Kinerja Sasaran 9 Indikator 2 :**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru	3.07	3.25	3.25	100



Untuk Meningkatkan Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung bidang urusan, yaitu :

**a. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**1. Persentase Koperasi Mandiri**

Indikator Kinerja persentase koperasi mandiri pada awal periode tahun 2015 mencapai 0,81 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,40 % atau mencapai 1,21 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Diklat Teknis Perkoperasian dan Penilaian Kesehatan KSP/USP, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Jumlah sosialisasi bagi anggota koperasi
2. Jumlah pengurus koperasi yang dibina
3. Jumlah yang mengikuti diklat pengawas, juru buku dan kompetensi pengelola koperasi
4. Jumlah KSP / USP yang dinilai

**2. Persentase Usaha Mikro Yang Dibina**

Indikator Kinerja persentase usaha mikro yang dibina pada awal periode tahun 2015 mencapai 3,47 % mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,01 % atau



mencapai 3,48 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro, dengan output yang dihasilkan adalah terlaksananya kegiatan bimtek UMKM

Untuk mewujudkan sasaran 9 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.310.100.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp 302.580.000,00 atau 97.57% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.520.000,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 9**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
9	Meningkatnya Kemandirian Usaha Mikro dan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	252,000,000.00	247,530,000.00	98.23	4,470,000.00
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	58,100,000.00	55,050,000.00	94.75	3,050,000.00
			310,100,000.00	302,580,000.00	97.57	7,520,000.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 9 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 9 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 9 tahun 2017 mencapai 91.32% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 9 yang pada tahun 2017 mencapai 97.57% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.520.000,00



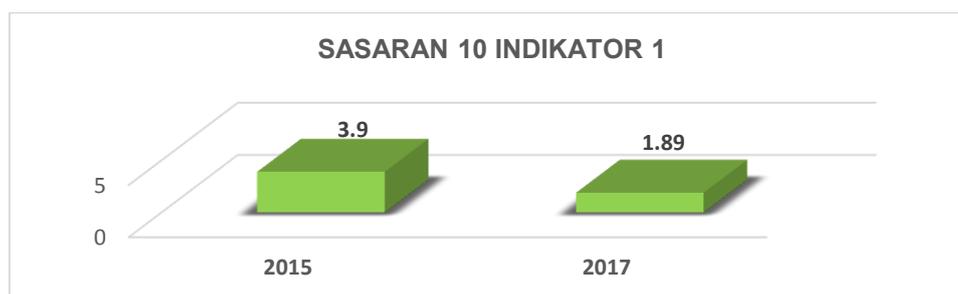
**SASARAN STRATEGIS 10**

**Meningkatnya Kinerja Sektor Industri**

Sasaran “**Meningkatnya Kinerja Sektor Industri**” diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan industry di Kabupaten Pacitan. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kinerja Sektor Industri**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel Kinerja Sasaran 10**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan Industri	3.9	2.2	1.89	85.91



Untuk Meningkatkan Kinerja Sektor Industri di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung bidang urusan, yaitu :

**a. Perindustrian**

**1. Jumlah Industri Kecil Menengah Dan Kerajinan**

Indikator Kinerja jumlah Industri kecil menengah dan kerajinan pada tahun 2017 sebesar 11.866 Unit atau mencapai 102.73 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 11.597 Unit capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja Tahun 2017 didukung dengan Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatannya yaitu : Pendataan Industri Kecil



Menengah Kabupaten Pacitan, Pembinaan Industri Kecil Menengah, Pengembangan Produk Unggulan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Pendataan Industri Kecil Menengah
2. Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil Menengah
3. Terlaksananya Kegiatan Promosi Industri Kerajinan Luar Daerah

## 2. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Indikator Kinerja cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2017 sebesar 5.85 % Atau mencapai 142.68 % dari target RPJMD tahun 2017 sebesar 4,1% capain tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2017 didukung dengan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian dengan kegitannya yaitu : Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Dan Masyarakat melalui Peningkatan SDM Bagi Pelaku IKM dengan output yang di hasilkan adalah Meningkatnya Keterampilan Teknis dan Wawasan IKM.

Untuk mewujudkan sasaran10 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.1.850.000.000,00 yang telah terealisasi senilai Rp 1.804.406.375,00 atau 97.54% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 45.593.602,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 10**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
10	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	400,000,000.00	381,013,100.00	95.25	18,986,900.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	1,450,000,000.00	1,423,393,275.00	98.17	26,606,725.00
			1,850,000,000.00	1,804,406,375.00	97.54	45,593,625.00



Dari tabel capaian kinerja sasaran 10 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 10 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 10 tahun 2017 mencapai 85.91% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 10 yang pada tahun 2017 mencapai 97.54% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 45.593.625,00



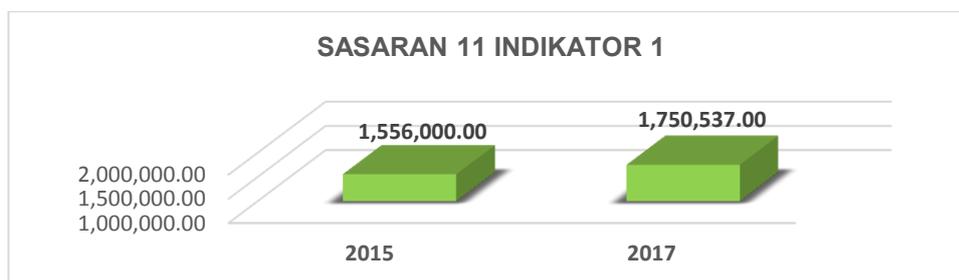
**SASARAN STRATEGIS 11**

**Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah**

Sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah” diarahkan untuk pengembangan potensi wisata di Kabupaten Pacitan. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel Kinerja Sasaran 11**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,556,000.00	1,750,000.00	1,750,537.00	100.03



Untuk Meningkatkan Kinerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, antara lain :

**a. Pariwisata**

**1. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 sebesar 30.% atau mencapai 71.% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum/tidak dapat mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan dengan adanya banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pacitan sehingga



mengakibatkan jumlah kunjungan wisata yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan sangat berkurang.

Pada Indikator kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Peningkatan Promosi wisata melalui media cetak dan elektronik
- Pelaksanaan Promosi pariwisata melalui pembuatan leaflet, booklet dan roadshow
- Pelaksanaan promosi wisata melalui pagelaran seni dan budaya
- Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun.
- Jumlah Sarana dan yang ditingkatkan/direhab
- Jumlah Sarana pariwisata dipantai taman
- Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun melalui dana DAK)
- Sosialisasi pengembangan SDM Pariwisata
- Sewa Lahan Parkir dan Goa Gong serta pembayaran honor petugas pendukung pariwisata

**b. Kebudayaan**

**1. Persentase Museum Geosite Yang Dikembangkan**

Indikator Kinerja Persentase museum Geosite yang dikembangkan sebesar 66,67% atau mencapai 113,34% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pemeliharaan benda situs dan cagar budaya
- Pameran museum dan sarasehan wayang beber



## 2. Persentase Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Di Kabupaten Pacitan Yang Difasilitasi

Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Pacitan yang difasilitasi sebesar 74,29% atau mencapai 104,63% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pengembangan Nilai Budaya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Festival seni budaya daerah
- Festival seni dan peringatan hari jadi Pacitan
- Lomba rontek

Untuk mewujudkan sasaran 11 tersebut didukung melalui 4 (empat) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.10.130.925.404,00 yang telah terealisasi senilai Rp 9.991.960.611,00 atau 98.63% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 138.964.793

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 11**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
11	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata Daerah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,713,371,750.00	7,629,026,100.00	98.91	84,345,650.00
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	285,362,781.00	282,347,611.00	98.94	3,015,170.00
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,588,642,123.00	1,539,947,500.00	96.93	48,694,623.00
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	543,548,750.00	540,639,400.00	99.46	2,909,350.00
			10,130,925,404.00	9,991,960,611.00	98.63	138,964,793.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 11 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 11 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 11 tahun 2017



mencapai 100.03% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 11 yang pada tahun 2016 mencapai 98,63% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 138.964.793,00



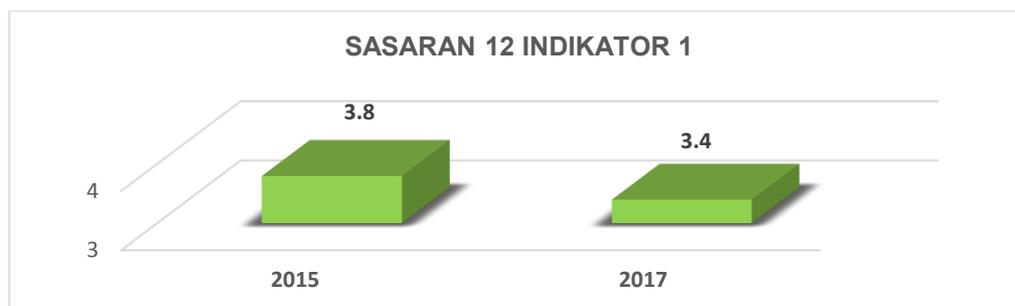
**SASARAN STRATEGIS 12**

*Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian*

Sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian**” diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan. Karena sampai dengan diterbitkannya LKj.IP Kabupaten Pacitan Tahun 2017 data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum dirilis, maka pencapaian sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian**” untuk realisasi indikator kinerjanya merupakan angka proyeksi dan dapat dilihat dari sebagai berikut

**Tabel Kinerja Sasaran 12**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Perikanan	3.8	3.8	3.4	89.47



Untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapabidang urusan, antara lain :

**a. Pertanian**

**1. Indeks Pertanaman Padi (IP)**

Indikator Kinerja pertanaman padi pada tahun 2017 sebesar 1,85 atau mencapai 105,71% dari target RPJMD



tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui program dan kegiatan yang terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana tanaman. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK), output Sarana dan Prasarana Pertanian yg dibangun yaitu dam parit (43 paket) dan Irigasi Tanah Dangkal (5 paket)
2. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan output
  - Pembangunan sarana prasarana pertanian 58paket, yang terdiri dari: jalan 19 paket, jaringan irigasi (29 paket), dam parit (9 paket), sumur dangkal (1 paket)
  - Fasilitasi alsin berupa pompa air (11 unit) dan traktor ( 10 unit )
3. Rehabilitasi Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan perbaikan dan pemeliharaan Sarana prasarana pertanian sebanyak 6 unit (100%).

Selain itu indikator kinerja indeks pertanaman juga didukung dengan kegiatan dari pusat dan provinsi melalui kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan output rehabilitasi jaringan irigasi 750 ha, irigasi permukaan 2 unit, bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim 5 unit, penyediaan alsintan (traktor roda dua 4 unit, pompa air 14 unit, rice transplanter 2 unit, handsprayer 22 unit).



## **2. Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani**

Indikator Kinerja Persentase diseminasi teknologi pertanian pada kelompok tani pada tahun 2017 sebesar 20,08% atau mencapai 115,20 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui program dan kegiatan yang terkait dengan diseminasi teknologi yang dilakukan pada kelompok tani. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) dengan output yang dihasilkan: peserta sosialisasi dan evaluasi PSP (80 orang), Penyusunan dan Workshop RDKK 12 paket, pertemuan verifikasi dan validasi pupuk 2 pertemuan.

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan dengan output yang dihasilkan terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknologi 100% yang dilakukan di 12 kecamatan

## **3. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani**

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani pada tahun 2017 sebesar 3,01% atau mencapai 101,35 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas kelompok. Capaian kinerja tahun 2017 ini dicapai melalui Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan



dengan output yang dihasilkan terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknologi 100% yang dilakukan di 12 kecamatan

Selain itu secara tidak langsung peningkatan kelas kelompok tani didukung dengan program Peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis dengan output yang dihasilkan Pembinaan dan pelatihan agribisnis sebanyak 2 kali
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan output yang dihasilkan Jumlah Kelompok Tani yang dibina sebanyak 600 orang
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan Bimbingan dan pelatihan teknis penyuluh sebanyak 1 paket
- Penyuluh Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan:
  - a. Peserta penyusunan program penyuluhan 300 orang
  - b. Pembinaan HIPPA 75 orang
  - c. Sosialisasi Pacitan Sehat 50 orang
  - d. Peserta pembinaan dan penyuluhan mendukung ATP 215 orang

#### **4. Persentase Diseminasi Teknologi Peternakan Pada Peternak**

Indikator Kinerja Persentase diseminasi teknologi peternakan pada peternak pada tahun 2017 sebesar 1,30% atau mencapai 104,84% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui kegiatan yang terkait dengan diseminasi teknologi. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Program Peningkatan Penerapan Teknologi



Petenakan dengan kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan output yang dihasilkan fasilitasi bibit HMT 13.000 batang, sarana pengolah pakan 7 unit, fasilitasi kandang 2 unit

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dengan output yang dihasilkan Gelar teknologi peternakan/kontes ternak sebanyak 1 even.

#### **5. Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Yang Mendapat Pembinaan**

Indikator Kinerja Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan pada tahun 2017 sebesar 6,01 atau mencapai 120,20% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan kapasitas Pelaku Usaha dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis dengan output yang dihasilkan Pembinaan dan pelatihan agribisnis sebanyak 2 kali
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan output yang dihasilkan Jumlah Kelompok Tani yang dibina sebanyak 600 orang
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan Bimbingan dan pelatihan teknis penyuluh sebanyak 1 paket
- Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan dengan output yang dihasilkan:
  - a. Peserta penyusunan programa penyuluhan 300 orang
  - b. Pembinaan HIPPA 75 orang



- c. Sosialisasi Pacitan Sehat 50 orang
- d. Peserta pembinaan dan penyuluhan mendukung ATP 215 orang

#### **6. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tembakau**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan produksi tanaman tembakau pada tahun 2017 sebesar 6,88% atau mencapai 137,60 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dengan kegiatan

- Standarisasi Kualitas Bahan Baku dengan output yang dihasilkan
- Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku dengan output yang dihasilkan

#### **7. Persentase Status Kesehatan Ternak**

Indikator Kinerja persentase status kesehatan ternak pada tahun 2017 sebesar 87,70% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui kegiatan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan ternak. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Sarana pelayanan kesehatan ternak (vaksin dan obat-obatan) 1 paket
- Pelayanan kesehatan ternak sebanyak 7.500 satuan ternak
- Pengawasan peredaran obat 48 kali



- Penyediaan Alat laboratotium (kulkas dan mikroskop LCD) masing-masing 1 unit

#### **8. Produksi Daging (kg)**

Indikator Kinerja Produksi daging pada tahun 2017 sebesar 3.323.367 kg atau mencapai 100,25% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui program/kegiatan yang terkait dengan populasi dan produksi daging. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan Bantuan bibit ternak kambing PE 75 (ekor) dan bantuan bibit ternak Sapi PO 82 ekor.
- Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) Yang ASUH dengan out put yang dihasilkan Unit asal hewan (BAH) yang di awasi sebanyak 48 kali/unit

#### **9. Produksi Telur (kg)**

Indikator Kinerja Produksi telur pada tahun 2017 sebesar 775.029 kg atau mencapai 152,46% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui program/kegiatan yang terkait dengan pendampingan/penyuluhan pada peternak. Capaian kinerja tahun 2017 ini belum didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang secara langsung meningkatkan produksi telur.

#### **10. Produksi Susu (litr)**

Indikator Kinerja produksi susu pada tahun 2017 sebesar 389.563 liter atau mencapai 1766,81% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Capaian kinerja tahun



2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Hasil ternak melalui kegiatan Pengembangan Agribisnis Pertenakan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pengembangan Bibit Sapi Perah 16 ekor
- Sarana pengolahan hasil peternakan/appo 2 unit
- Bimbingan pengolahan hasil 80 orang
- Pendampingan SPR 1 paket

#### **11. Populasi Ternak Potong Besar (ekor)**

Indikator Kinerja Populasi Ternak Potong Besar pada tahun 2017 sebesar 87.752 ekor atau mencapai 100,66% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output bantuan bibit ternak Sapi PO 82 ekor
- Pengembangan Inseminasi Buatan dengan output yang dihasilkan penyediaan sarana inseminasi buatan (1paket)

Disamping itu populasi ternak potong besar juga didukung oleh kegiatan provinsi dan pusat melalui UPSUS SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting)dengan kegiatan:

- Pengembangan Budidaya sapi potong dengan output fasilitasi 20 ekor sapi potong
- Pengembangan budidaya sapi perah dengan output fasilitasi 38 ekor sapi perah
- Peningkatan Produksi HPT dengan output fasilitasi HPT seluas 20 ha

#### **12. Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor)**

Indikator Kinerja Populasi Ternak Potong Kecil pada tahun 2017 sebesar 191.452 ekor atau mencapai 109,54%



dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dengan output yang dihasilkan sebagai berikut bantuan bibit ternak kambing PE 75 (ekor)

### **13. Populasi Unggas (Ekor)**

Indikator Kinerja populasi unggas pada tahun 2017 sebesar 1.964.806 ekor atau mencapai 173,12% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui kegiatan yang terkait dengan perunggasan. Capaian kinerja tahun 2017 ini belum didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang langsung terkait dengan indikator ini

#### **b. Kelautan dan Perikanan**

##### **1. Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)**

Indikator Kinerja produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2017 sebesar 11.250,51 ton atau mencapai 100,29% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dicapai melalui pembinaan kelompok nelayan, pemberian bantuan sarana perikanan tangkap dan sosialisasi pengelolaan sumberdaya laut yang baik optimal.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan, Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum, Pengembangan Sarana Penangkapan Ikan, Peningkatan Kapasitas KUB dan Pokmaswas, Pemberdayaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Pembangunan Pos Pengawasan dan Pengendalian



sumberdaya Kelautan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terbangunnya prasarana perikanan tangkap 5 paket
- Terlaksananya pengadaan sarana tangkap 5 paket
- Terlaksananya restocking ikan 12 kecamatan
- Terlaksananya studi banding dan pembinaan 230 orang
- Terbangunnya pos pengawasan sumberdaya kelautan 3 lokasi

## **2. Produksi Perikanan Budidaya (ton)**

Indikator Kinerja produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 sebesar 1.020,45 ton atau mencapai 115,75% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dicapai melalui pengembangan perikanan budidaya tambak, kolam, minapadi, karamba dan budidaya laut.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Budidaya Ikan, Anti Poverty Program (APP) Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat, Pengembangan Kawasan Budiadaya Air Laut, Air Payau Dan Air Tawar dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya bimbingan teknis budidaya ikan 11 kali
- Terlaksananya studi banding pembudidaya ikan 55 orang
- Terlaksananya pengadaan pakan ikan 22.500 kg
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana budidaya perikanan 44 paket
- Terlaksananya pengadaan induk ikan 5 paket
- Peralatan pendukung laboratorium 1 paket
- Terlaksananya uji proksimat pakan ikan 1 paket
- Pengadaan benih ikan 422.000 ekor



### **3. Produksi Hasil Olahan Perikanan (ton)**

Indikator Kinerja produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2017 mencapai 1.553,54 ton atau mencapai 105,81% dari target RPJMD tahun 2017. capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dicapai melalui diversifikasi olahan produk perikanan yang didukung dengan bahan baku yang memadai.

Capaian kinerja tahun 2017 didukung program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan kegiatan Bimbingan teknis pelaku utama perikanan, optimalisasi kelembagaan pelaku usaha, peningkatan mutu hasil perikanan dan promosi produk perikanan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Penguatan kelembagaan kelompok 12 kecamatan
- Terlaksananya gemarikan 12 kecamatan
- Peningkatan mutu produk hasil olahan perikanan 12 kecamatan

### **4. Cakupan Masyarakat Perikanan Yang Mandiri (orang)**

Indikator Kinerja capaian masyarakat perikanan yang mandiri pada tahun 2017 sebesar 4.740 orang atau mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017, dicapai melalui penguatan kelembagaan kelompok, sertifikasi hak atas nelayan dan pembudiadaya ikan dan kemudahan akses permodalan.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan Kegiatan sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi Bidang Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Sistem Informasi Perikanan, Pendampingan Program



Sertifikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Perikanan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

- Terlaksananya penguatan kelembagaan 12 kecamatan
- Terlaksananya sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya sebagai jaminan permodalan 200 orang
- Tercetaknya kartu nelayan dan terverifikasinya kelembagaan nelayan
- Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan 300 orang

Untuk mewujudkan sasaran 12 tersebut didukung melalui 10 (sepuluh) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.28.925.185.133,50 yang telah terealisasi senilai Rp 25.897.682.291,00 atau 89.53% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.027.502.842,50

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 12**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
12	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	15,909,419,563.50	15,697,282,615.00	98.67	212,136,948.50
		Program pengembangan perikanan tangkap	2,400,887,000.00	2,392,251,600.00	99.64	8,635,400.00
		Program pengembangan budidaya perikanan	2,282,257,125.00	2,246,582,625.00	98.44	35,674,500.00
		Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	713,918,938.00	689,894,987.00	96.63	24,023,951.00
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	675,557,500.00	649,910,550.00	96.20	25,646,950.00
		Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pertanian/Perkebunan	439,785,000.00	413,289,950.00	93.98	26,495,050.00
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	514,942,507.00	502,562,964.00	97.60	12,379,543.00



	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1,100,000,000.00	1,096,555,000.00	99.69	3,445,000.00
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	390,420,000.00	344,587,400.00	88.26	45,832,600.00
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4,497,997,500.00	1,864,764,600.00	41.46	2,633,232,900.00
		28,925,185,133.50	25,897,682,291.00	89.53	3,027,502,842.50

Dari tabel capaian kinerja sasaran 12 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 12 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 12 tahun 2017 mencapai 89.47% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 12 yang pada tahun 2017 mencapai 89.53% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.027.502.842,50



**TUJUAN 5 :**

**“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”**

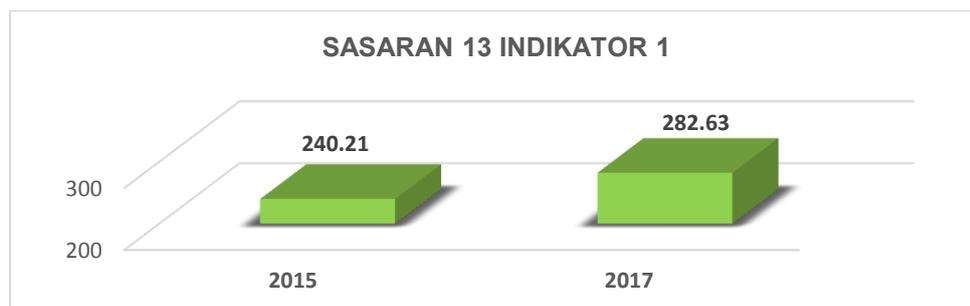
**SASARAN STRATEGIS 13**

**Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan**

Sasaran “**Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan**” diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas ketahanan pangan daerah. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel Kinerja Sasaran 13 Indikator 1**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita (%)	240.21	88.71	282.63	318.60



Untuk Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung bidang urusan, yaitu :



**a. Pangan**

**1. Ketersediaan Pangan**

- **Beras**

Target Indikator Kinerja ketersediaan beras pada tahun 2017 adalah sebesar 118.000 ton sedangkan capaian kinerja yaitu 129.848 ton sehingga melebihi target yang ada di RPJMD sebesar 11.848 ton (10,04%)

- **Jagung**

Target Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan (jagung) pada tahun 2017 sebesar 103.278 ton sedangkan capaian kinerja adalah 103.988 ton sehingga melebihi target sebesar 710 ton (0,69%)

- **Kedelai**

Target Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan (kedelai) pada tahun 2017 sebesar 6.086 ton sedangkan capaian kinerja adalah 6.092 ton sehingga melebihi target sebesar 6 ton (0,09%)

- **Daging**

Target Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan (Daging) pada tahun 2017 sebesar 1.771 ton sedangkan capaian kinerja adalah 2.565 ton sehingga melebihi target sebesar 794 ton (44,83%)

- **Telur**

Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan (Telur) pada tahun 2017 sebesar 377 ton, capaian kinerja adalah 702,88 ton sehingga melebihi target sebesar 325,88 ton (36,44%)

- **Ikan**

Indikator Kinerja Ketersediaan Pangan (Ikan) pada tahun 2017 sebesar 8.606 ton, capaian kinerja adalah 9.384 ton sehingga melebihi target sebesar 778 ton (9,04%).



Ketersediaan Pangan Beras, jagung, kedelai, daging, telur dan ikan di dukung dengan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Laporan Berkala Ketahanan pangan dengan Output : Laporan berkala sebanyak 2 buku
2. Kegiatan Pemantauan Analisis Akses Pangan Pokok dengan output : Buku analisis peta akses pangan pokok sejumlah 1 buku
3. Kegiatan Pemantauan Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan dengan output: Jumlah rantai pasokan pangan sejumlah 2 buku
4. Kegiatan Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan output :Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) sejumlah 2 buku
5. Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan dengan output : Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan pangan sebanyak 2 kali

## **2. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten**

Untuk capaian Kinerja Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten tahun 2017 yang mempunyai target 100 ton setara beras tidak dapat terpenuhi, hanya mampu menyediakan cadangan pangan 22,5 ton setara beras (22,5%). Hal ini disebabkan karena Anggaran dari APBD kabupaten belum dapat mencukupi untuk pengisian 100 ton

Indikator ini di dukung dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dengan output : Cadangan Pangan Pemerintah sebesar  $\geq 100$  ton
2. Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Desa dengan output : Pembinaan Lumbung Pangan Desa sebanyak 10 desa



3. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan output : Dokument Peta Rawan Pangan sebanyak 1 dokumen

### **3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 80,5 point dapat terpenuhi sebesar 80,6 point / melebihi target (0,1 point) didukung dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan dengan output : Jumlah Kelompok kelompok yang ditumbuhkan/dikembangkan sebanyak 3 Desa
2. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan output Jumlah PMTAS sebanyak 30 kali, Terlaksananya Apresiasi penganekaragaman konsumsi B2SA sebanyak 2 kali, Terlaksana lomba Cipta Menu 2 kali, Terlaksananya Pameran 1 kali
3. Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dengan output Jumlah laporan PPH 4 buku

### **4. Persentase Pangan Yang Aman**

Capaian Kinerja Prosentase Pangan yang Aman sebesar 91% yang ditargetkan di dalam RPJMD tahun 2017 adalah 89,2 % sehingga capaian kinerja melebihi target sebesar (1,8%) di dukung dengan program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pangan dengan output jumlah Pembinaan Mutu pangan sebanyak 2 kali
2. Peningkatan Keamanan pangan dengan output jumlah pembinaan keamanan pangan sebanyak 6 kali



**b. Pertanian**

**1. Produksi Hasil Perkebunan (Ton)**

Indikator Kinerja Produksi hasil perkebunan pada tahun 2017 sebesar 37.633 ton atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan produksi hasil perkebunan. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Kawasan Agropolitan dengan output pengadaan sarana budidaya bibit nilam sebanyak 50.000 batang dan pupuk organik 50.000 kg
2. Pembangunan Jalan Produksi dengan output 3 paket
3. Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi tanaman Perkebunan dengan output fasilitasi pupuk NPK(4.000 kg), bibit tanaman kelapa (250 batang),pupuk organik (42.000 kg), bibit lada (12.000 batang) dan bibit cengkeh (15.480 batang)
4. Optimalisasi Sumberdaya dan Sarana Prasarana Pengendalian OPT Perkebunan dengan output peserta bimtek (700 orang) dan SLPHT Pengendalian OPT Perkebunan (100 orang)

Disamping itu peningkatan produksi tanaman perkebunan juga didukung melalui program dan kegiatan dari pusat dan provinsi yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan kegiatan Intensifikasi Kelapa dengan output yang dihasilkan intensifikasi kelapa seluas 100 ha



2. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku kegiatan Sekolah Lapang Konservasi dengan output yang dihasilkan Sekolah Lapang sebanyak 3 kelompok
3. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan kegiatan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan output yang dihasilkan pengembangan tanaman kelapa seluas 150 ha

## **2. Produktifitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Sektor Lainnya Per Ha (kw/ha)**

Indikator Kinerja Produktifitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per ha (ku/ha) pada tahun 2017 sebesar 54,60 ku/ha atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan produktivitas padi. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Bantuan saprodi, yang terdiri dari 2 paket
2. Bimbingan teknik peningkatan produksi tanaman pangan pada kelompok sebanyak 9 kali

Di samping itu indikator kinerja ini didukung dengan program nasional UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) melalui program peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi dengan kegiatan pengelolaan produksi tanaman sereal dengan output kegiatan pengelolaan tanam padi hibrida 1.000 ha dan padi hibrida 100 ha.



### **3. Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton)**

Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija pada tahun 2017 sebesar 886.251 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan produktivitas padi dan tanaman pangan yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman pangan. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Bantuan saprodi, yang terdiri dari 2 paket
2. Bimbingan teknik peningkatan produksi tanaman pangan pada kelompok sebanyak 9 kali

Disamping itu peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) juga didukung dengan program nasional UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) melalui program peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sekaligus meningkatkan produksi tanaman pangan dengan kegiatan:

1. Pengelolaan produksi tanaman sereal dengan output kegiatan pengelolaan tanam padi hibrida 1.000 ha dan padi hibrida 100 ha.
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka kacang dan umbi dengan output peningkatan produksi kedelai 500 ha.
3. Fasilitasi Jagung hibrida seluas 1.894 ha.

### **4. Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija (Ton)**

Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan Padi dan Palawija pada tahun 2017 sebesar 886.251 atau mencapai



100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan produktivitas padi dan tanaman pangan yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman pangan. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Bantuan saprodi, yang terdiri dari 2 paket
2. Bimbingan teknik peningkatan produksi tanaman pangan pada kelompok sebanyak 9 kali

Disamping itu peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan palawija) juga didukung dengan program nasional UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) melalui program peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sekaligus meningkatkan produksi tanaman pangan dengan kegiatan:

1. Pengelolaan produksi tanaman sereal dengan output kegiatan pengelolaan tanam padi hibrida 1.000 ha dan padi hibrida 100 ha.
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka kacang dan umbi dengan output peningkatan produksi kedelai 500 ha.
3. Fasilitasi Jagung hibrida seluas 1.894 ha.

#### **5. Produksi Hortikultura (Ton)**

Indikator Kinerja produksi hortikultura pada tahun 2017 sebesar 137.082ton atau mencapai 191,90% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan produksi tanaman



hortikultura. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari

1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan output yang dihasilkan: bantuan saprodi (bibit durian 2.400 batang, bibit pisang 6.000 batang, bibit jeruk 800 batang dan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan 3 kali
2. Peningkatan produktifitas dan Mutu Produksi Pertanian Serta Pengembangan Kawasan dengan output yang dihasilkan:
  - Fasilitasi mesin pemotong rumput (8 buah), keranjang panen (30 buah), gunting pangkas (60 buah), sprayer (40 unit), pH meter (13 buah), pupuk NPK (13.000 kg)
  - Koordinasi dan sinkronisasi 6kali
  - Bimbingan teknologi 3 kali
  - SL GHP 7 kali

Disamping itu indikator produksi hortikultura didukung dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi melalui program dan kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan output pengembangan kawasan cabai seluas 100 ha
2. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Biofarmaka dengan output bantuan jahe 20 ton dan pupuk organik 4 ton
3. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Tanaman Buah dengan output bantuan bibit jeruk 2.000 batang dan pupuk organik 10 ton



Untuk mewujudkan sasaran 13 tersebut didukung melalui 2 (Dua) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp. 4.307.583.875,00 yang telah terealisasi senilai Rp. 4.135.474.360,00 atau 96% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 172.109.515,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 13**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
13	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1,930,864,875.00	1,902,420,960.00	98.53	28,443,915.00
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2,376,719,000.00	2,233,053,400.00	93.96	143,665,600.00
			4,307,583,875.00	4,135,474,360.00	96.00	172,109,515.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 13 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 13 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 13 tahun 2017 mencapai 318.60% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 13 yang pada tahun 2017 mencapai 96% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.495.350,00



**TUJUAN 6 :**

*“Meningkatkan Kualitas Dan Kerukunan Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat”*

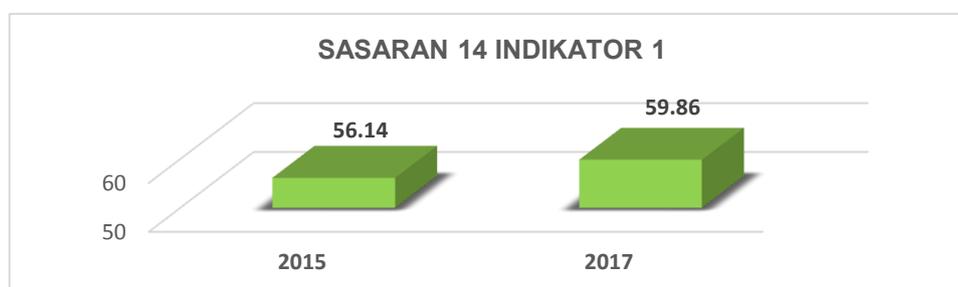
**SASARAN STRATEGIS 14**

**Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah**

Sasaran “**Meningkatnya Layanan Infrastuktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah**” diarahkan untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur dasar sebagai sarana penunjang produksi barang dan jasa sehingga mampu menunjang akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Layanan Infrastuktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai beriku

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 1**

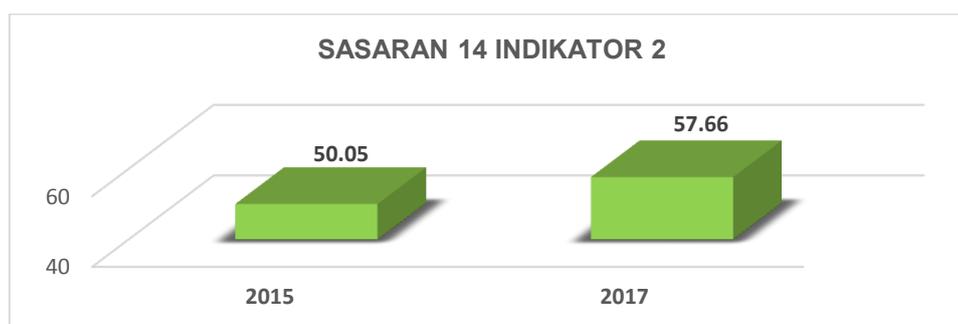
NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	56.14	59.84	59.86	100.03





**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 14 Indikator 2**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	50.05	52.55	57.66	109.72



Untuk Meningkatkan Layanan Infrastuktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung bidang urusan, yaitu :

**a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**1. Persentase Jalan Dan Jembatan Yang Dibangun**

**- Jalan**

Indikator Kinerja Persentase jalan yang dibangun pada tahun 2017 sebesar 77,17% atau mencapai 101,9%% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

**- Jembatan**

Indikator Kinerja Persentase jembatan yang dibangun pada tahun 2017 sebesar 77,5% atau mencapai 103% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

## **2. Persentase Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik**

### **- Jalan**

Indikator Kinerja Persentase Jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 sebesar 59,86 % mencapai 100,03 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Rehabitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan jalan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- Monitoring dan evaluasi jalan jembatan perdesaan

### **- Jembatan**

Indikator Kinerja Persentase Jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 sebesar 93,20 % atau mencapai 100,2 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Rehabitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan



Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan jembatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- Monitoring dan evaluasi jalan jembatan perdesaan

### **3. Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan**

#### **- Alat Berat**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk Alat berat pada tahun 2017 sejumlah 70% atau mencapai 101% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin alat-alat berat

#### **- Alat Laboratorium**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan untuk Alat Laboratorium pada tahun 2017 sejumlah 95,10% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan



- Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

#### **4. Persentase jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik**

##### **- Jalan**

Indikator Kinerja Persentase jalan poros desa perdesaan dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun 2017 sebesar 30,29% atau mencapai 103,7% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
- Monitoring dan evaluasi jalan dan jembatan perdesaan

##### **- Jembatan**

Indikator Kinerja Persentase jembatan poros desa perdesaan dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun 2017 sebesar 54,6% atau mencapai 101% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan



- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
  - Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
  - Monitoring dan evaluasi jalan dan jembatan perdesaan

#### **4. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih**

Indikator Kinerja Prosentase penduduk berakses air bersih pada Tahun 2017 sebesar 57,66 % atau mencapai 109,7% dari target RPJMD Tahun 2017. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
- Penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

#### **5. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2017 mencapai 100,01% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi



## 6. Drainase Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Prosentase drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2017 sebesar 82,1 % atau mencapai 100,1 % dari target RPJMD Tahun 2017. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong

- Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota
- Normalisasi Saluran Drainase Perbaikan saluran Tutup (Trotoar) Kota

## 7. Persentase Luas Sawah Beririgasi Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Persentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik pada Tahun 2017 adalah 51,16% adalah luas daerah irigasi dalam kondisi baik 4.232,99 ha dibandingkan dengan luas seluruh daerah irigasi kabupaten 8.274,00 ha. Capaian tersebut sudah mencapai target dari rencana 49,80 %.

Capaian kinerja 2017 ini didukung dengan program/kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Perencanaan Aset Irigasi

## 8. Persentase Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2017 adalah 42,36% adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik 281.414m



dibandingkan dengan panjang seluruh saluran irigasi kabupaten 664.339m. Capaian tersebut sudah mencapai target dari rencana 41,60 %.

Capaian kinerja 2017 ini didukung dengan program/kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)
- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
- Perencanaan Aset Irigasi

#### **9. Luas Sawah Baru Beririgasi (ha)**

Indikator Kinerja Luas sawah baru beririgasi pada Tahun 2017 adalah 162 ha merupakan pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi baru pada lokasi sawah yang belum termasuk dalam data luas baku sawah kabupaten. Capaian tersebut sudah mencapai target dari rencana 162 ha.

Capaian kinerja 2017 ini didukung dengan program/kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :

- Pembangunan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

#### **10. Jumlah Embung Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Jumlah embung dalam kondisi baik pada Tahun 2017 adalah 13 unit merupakan jumlah embung di Kabupaten Pacitan yang telah dibangun sampai dengan



pada Tahun 2017 dalam kondisi baik. Capaian tersebut sudah mencapai target dari rencana 13 unit.

Capaian kinerja 2017 ini didukung dengan program/kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan adalah Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

#### **11. Jumlah Dokumen Tata Ruang Yang Dihasilkan**

Indikator Kinerja Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan pada Tahun 2017 sejumlah 6 dokumen atau mencapai 100% dari target RPJMD Tahun 2017. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Perencanaan Tata Ruang

- Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Program Pemanfaatan ruang

- Survey Dan Pemetaan

#### **12. Persentase Bangunan Ber IMB Per Total Bangunan**

Indikator Kinerja Persentase bangunan ber IMB per total bangunan (%) Tahun 2017 sejumlah 74,22% atau mencapai 100% dari target RPJMD Tahun 2017. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017.

#### **13. Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Diterbitkan**

Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan pada tahun 2017 sejumlah 220



atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang

#### **14. Jumlah Penataan Kawasan Dan Penanda Kawasan**

Indikator Kinerja Jumlah penataan kawasan dan penanda kawasan pada Tahun 2017 sejumlah 2 unit atau mencapai 22,2 % dari target RPJMD Tahun 2017. Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program/ kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh : Pembangunan tugu batas

#### **b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **1. Persentase Permukiman Kumuh**

Indikator Kinerja Presentase luasan lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2017 sebesar 0,035 % atau mencapai 0,021 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 dikarenakan/dicapai melalui kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air bersih berupa Peningkatan Jalan Lingkungan kawasan kumuh. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pembinaan Lingkungan Sosial /Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah Sanitasi dan Air bersih dengan



output yang dihasilkan adalah Jumlah Lingkungan Permukiman yang tertata

## **2. Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan**

Indikator Kinerja Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 57,88 % atau mencapai 59,54 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2015 .dikarenakan/dicapai melalui kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, berupa Peningkatan jalan Lingkungan, Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman / Kegiatan Peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum dengan output yang dihasilkan adalah Meningkatnya jalan lingkungan yang memenuhi standart permukiman

## **3. Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

Indikator Kinerja Persentase layak huni pada tahun 2017 sebesar 99,79 % atau mencapai 99,83 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017 .dikarenakan/dicapai melalui kegiatan Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa Peningkatan jalan Lingkungan, Pembangunan Drainaser dan Pembangunan MCK . Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman / Kegiatan Peningkatan prasarana , sarana dan utilitas umum dengan output yang dihasilkan adalah Adanya sarana Permukiman yang layak

## **4. Persentase Peningkatan Prasarana Permukiman**

Indikator Kinerja Persentase peningkatan prasarana permukiman pada tahun 2017 sebesar 2,1 % atau mencapai 2,97 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun



2017 dikarenakan/dicapai melalui kegiatan Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa Peningkatan jalan Lingkungan, Pembangunan Drainase dan Pembangunan MCK. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman / Kegiatan Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan output yang dihasilkan adalah Adanya sarana Permukiman yang layak

**c. Perhubungan**

**1. Persentase Penerapan Norma Keselamatan Bidang Perhubungan**

Indikator Kinerja Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan pada tahun 2017 sebesar 43,73% atau mencapai 101,7% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan tahun 2017 ini didukung dengan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan antara lain :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan output yaitu jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi yang disusun
2. Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan dengan output yaitu jumlah obyek retribusi PAD Bidang Perhubungan yang diintegrasikan penerimaannya
3. Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan dengan output yaitu jumlah pemenuhan operasional pelayanan perhubungan.
4. Dari ketiga kegiatan tersebut mampu mencapai target outputnya masing – masing pada tahun 2017 ini maka



capaian kinerja akhir tahun 2017 mencapai 101,7% atau 43,73%.

## **2. Persentase Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 51% atau mencapai 102% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik tahun 2017 ini didukung dengan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan antara lain :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan output yaitu jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi/dipelihara
- Pemeliharaan Traffic Light (APILL) dengan output yaitu Jumlah trafic light dan warning light yang terpelihara.

Dari kedua kegiatan tersebut mampu mencapai target outputnya masing – masing pada tahun 2017 ini maka capaian kinerja akhir Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik tahun 2017 mencapai 101,7% atau 51%.

## **3. Persentase Angkutan Laik Jalan (lulus uji)**

Indikator Kinerja Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji) pada tahun 2017 sebesar 40% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik tahun 2017 ini didukung dengan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan antara lain :



- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan output yaitu jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi/dipelihara
- Pemeliharaan Traffic Light (APILL) dengan output yaitu Jumlah trafic light dan warning light yang terpelihara.

Dari kedua kegiatan tersebut mampu mencapai target outputnya masing – masing pada tahun 2017 ini maka capaian kinerja akhir Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik tahun 2017 mencapai 101,7% atau 51%

#### **4. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan**

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2017 sebesar 43% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2017 ini didukung dengan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan kegiatan antara lain :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan output yaitu jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi/dipelihara

Dari kegiatan tersebut mampu mencapai target outputnya pada tahun 2017 ini maka capaian kinerja akhir Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan tahun 2017 mencapai 100% atau 43%.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penyerahan aset tanah Pelabuhan Laut Pacitan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan harapan proses pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan dan pembangunan



akses jalan menuju Pelabuhan Laut Pacitan dapat segera dilanjutkan.

#### **5. Persentase Tersedianya Sarana Pengendali Dan Pengamanan Lalu Lintas**

Indikator Kinerja Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas pada tahun 2017 sebesar 70,21% atau mencapai 100,3% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas tahun 2017 ini didukung dengan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Kegiatan Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah pembangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas

Pada tahun 2017 ini telah terealisasi tiga (3) paket pembangunan sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas diantaranya :

- Pengadaan Guardrail 100m
- Pengadaan Rambu Lalu Lintas 60 buah
- Pengadaan Marka Jalan 556m<sup>2</sup>

Capaian kinerja Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas didapat dari rata – rata tersedianya sarana pengendali dan pengaman lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, marka, guardrail) yang dibangun setiap tahunnya.

Pembangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas pada tahun 2017 ini dipasang pada ruas jalan menuju destinasi wisata di wilayah barat Kabupaten Pacitan untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Pacitan.



Maka capaian kinerja akhir Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas tahun 2017 mencapai 100,3% atau 70,21%.

Untuk mewujudkan sasaran 14 tersebut didukung melalui 19 (Sembilanbelas) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.222.589.072.610,00 yang telah terealisasi senilai Rp.218.357.549.977,00 atau 98,10% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.231.522.633,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 14**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
14	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dasar Yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Program pembangunan jalan dan jembatan	21,953,000,000.00	21,388,750,900.00	97.43	564,249,100.00
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	58,858,146,000.00	57,534,455,350.00	97.75	1,323,690,650.00
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	626,263,400.00	591,507,500.00	94.45	34,755,900.00
		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	38,366,000,000.00	37,751,513,300.00	98.40	614,486,700.00
		Program Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	50,039,775,000.00	49,498,204,800.00	98.92	541,570,200.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman	2,928,203,000.00	2,890,283,150.00	98.71	37,919,850.00
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6,639,419,460.00	6,449,256,582.00	97.14	190,162,878.00
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	485,890,000.00	482,622,700.00	99.33	3,267,300.00
		Program peningkatan pelayanan	424,857,500.00	417,053,150.00	98.16	7,804,350.00



angkutan					
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	44,149,750.00	44,056,000.00	99.79	93,750.00	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,624,835,000.00	1,572,304,280.00	96.77	52,530,720.00	
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15,425,247,500.00	15,336,027,877.00	99.42	89,219,623.00	
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2,243,380,000.00	2,182,138,750.00	97.27	61,241,250.00	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	15,967,596,000.00	15,755,897,000.00	98.67	211,699,000.00	
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	5,270,000,000.00	4,871,100,700.00	92.43	398,899,300.00	
Program Perencanaan Tata Ruang	1,013,285,000.00	949,677,396.00	93.72	63,607,604.00	
Program Pemanfaatan Ruang	243,450,000.00	209,026,632.00	85.86	34,423,368.00	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	185,575,000.00	184,700,000.00	99.53	875,000.00	
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	250,000,000.00	248,973,910.00	99.59	1,026,090.00	
	222,589,072,610.00	218,357,549,977.00	98.10	4,231,522,633.00	

Dari tabel capaian kinerja sasaran 14 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 14 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 14 tahun 2017



mencapai 104.88% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 14 yang pada tahun 2017 mencapai 98.10 sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.231.522.633,00



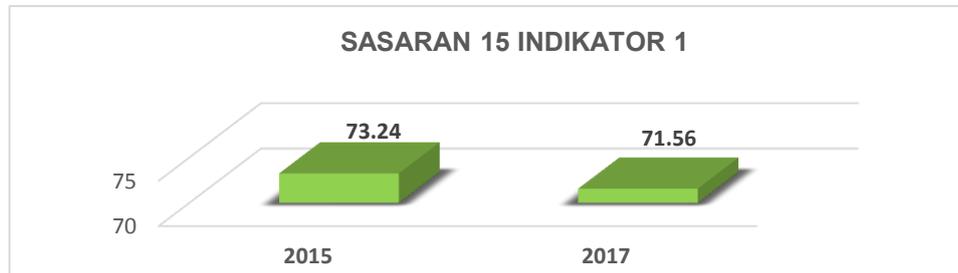
**SASARAN STRATEGIS 15**

**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**” diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 15**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.24	73.27	71.56	97.67



Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung bidang urusan, yaitu :

**a. Lingkungan Hidup**

**1. Persentase Pengolahan Sampah Akhir**

Indikator Kinerja Persentase Pengolahan Sampah Akhir pada tahun 2017 yaitu 27,2 atau mencapai 98,91% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan terjadi bencana banjir, sehingga mempengaruhi jumlah sampah yang masuk ke TPA.



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan output kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan output yang dihasilkan adalah jumlah atau volume sampah yang masuk ke TPA.

## **2. Persentase Penanganan Sampah**

Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah pada tahun 2017 yaitu 91,80 atau mencapai 99,95 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan terjadi bencana banjir, sehingga mempengaruhi prosentase penanganan sampah.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan output yang dihasilkan adalah jumlah atau volume sampah yang masuk TPA.

## **3. Penghargaan Kebersihan Nasional**

Indikator Kinerja Penghargaan Kebersihan Nasional pada tahun 2017 yaitu Ada atau mencapai target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan output yang dihasilkan adalah terainya Piala Adipura.

## **4. Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)**

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) pada tahun 2017 yaitu 58 sekolah atau belum mencapai target RPJMD 2017 dikarenakan banyaknya sekolah yang tidak lolos seleksi Adiwiyata.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan dengan output yang dihasilkan adalah kabupaten



Pacitan memiliki sekolah yang berwawasan lingkungan dan peduli dengan lingkungan.

#### **5. Penumbuhan Bank Sampah**

Indikator Kinerja Penumbuhan Bank Sampah pada tahun 2017 sebesar 25 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan output yang dihasilkan adalah :

- Terdapat 25 Bank Sampah di Kabupaten Pacitan
- Dapat menambah penghasilan bagi masyarakat
- Mengurangi timbulan sampah di TPA
- Memaksimalkan pemanfaatan barang bekas

#### **6. Persentase Industri Hasil Tembakau Yang Teruji Kualitas Lingkungan Hidupnya**

Indikator Persentase Industri Hasil Tembakau yang Teruji Kualitas Lingkungan Hidupnya pada tahun 2017 sebesar 50 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih dengan output yang dihasilkan adalah pabrik rokok yang memiliki surat izin usaha dan memiliki dokumen AMDAL.

#### **7. Jumlah Taman Kehati**

Indikator Kinerja Jumlah Taman Kehati pada tahun 2017 sebesar 1 atau mencapai 1 dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Penataan RTH dengan out put yang dihasilkan adalah memiliki satu Taman Kehati yang berada di kawasan TPA Dadapan.

#### **8. Persentase Taman Kota Yang Tertata**

Indikator Kinerja Persentase Taman Kota yang Tertata pada tahun 2017 sebesar 44,7 atau mencapai 2,50% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Penataan RTH dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Taman Kota yang Tertata (m).

#### **9. Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Disampling**

Indikator Kinerja Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan yang Disampling pada tahun 2017 sebesar 160 atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih dengan output yang dihasilkan adalah terdapat banyak titik yang disampling atau dipantau kualitas lingkungannya.

#### **10. Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 84 atau mencapai 84% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017 dikarenakan hanya terdapat 10 pengaduan masyarakat sedangkan target untuk tahun ini 12 pengaduan.



Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih dengan output yang dihasilkan adalah perusahaan yang melanggar peraturan ditindak tegas atau dikenai sanksi sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi.

### 11. Indeks Tutupan Hutan

Indikator Kinerja Indeks Tutupan Hutan pada tahun 2017 sebesar 66,19 atau kurang 6,15% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan kegiatan Pemeliharaan RTH dengan output yang dihasilkan adalah Indeks Tutupan Hutan (%).

Untuk mewujudkan sasaran 15 tersebut didukung melalui 5 (lima) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.5.851.471.250,00 yang telah terealisasi senilai Rp. 5.616.005.774,00 atau 95.98% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 235.465.476,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 15**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3,013,825,000.00	2,965,624,350.00	98.40	48,200,650.00
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	100,000,000.00	96,750,000.00	96.75	3,250,000.00
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1,780,000,000.00	1,767,864,850.00	99.32	12,135,150.00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	743,646,250.00	598,304,824.00	80.46	145,341,426.00
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	214,000,000.00	187,461,750.00	87.60	26,538,250.00
			5,851,471,250.00	5,616,005,774.00	95.98	235,465,476.00



Dari tabel capaian kinerja sasaran 15 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 15 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 15 tahun 2017 mencapai 197.67% atau lebih besar jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 15 yang pada tahun 2017 mencapai 95.98% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 235.465.476,00.



**Tujuan 7:**  
**Meningkatkan Kualitas Dan Kerukunan Kehidupan Beragama Dan Bermasyarakat**

**SASARAN STRATEGIS 16**

**Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban**

Sasaran “**Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban**” diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

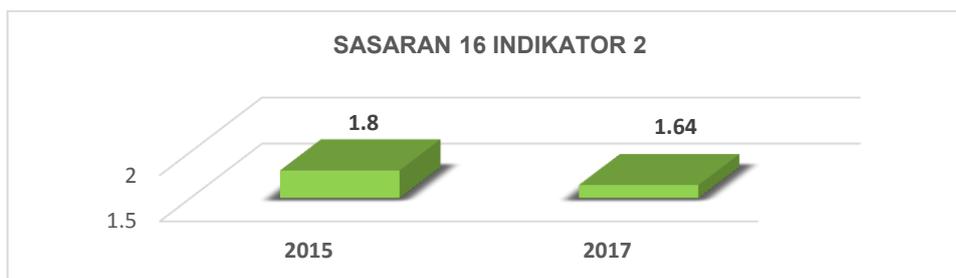
**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 1**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	100



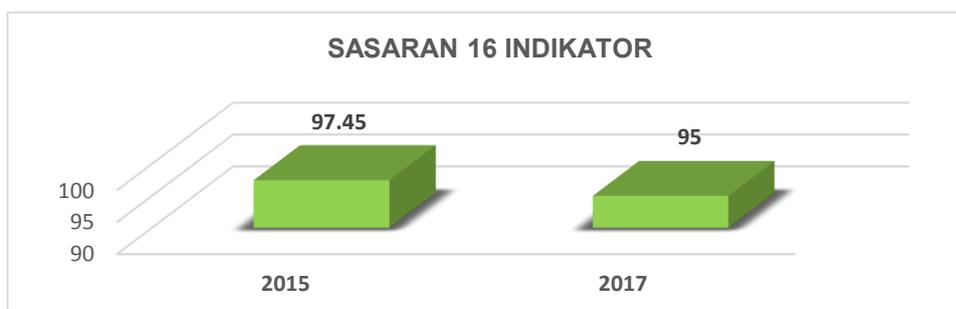
**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 2**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kriminalitas	1.8	1.4	1.64	85.37



**Tabel Capaian Kinerja Sasaran 16 Indikator 3**

NO	INDIKATOR	Awal Periode RPJMD (2015)	KINERJA 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	97.45	92	95	103.26



Untuk Meningkatkan Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya didukung beberapa bidang urusan, yaitu :

**a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**1. Jumlah Kejadian Terkait Konflik Keagamaan**

Indikator kinerja Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan pada tahun 2017 sebesar 0 atau tidak ada konflik keagamaan pada tahun 2017 dan hal tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017

**2. Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**

Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD



tahun 2017, capain tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Sosialisasi HAM dengan output Terselenggaranya Sosialisasi HAM.
  - Tanggal 27 September 2017 di Kecamatan Ngadirojo
  - Tanggal 28 September 2017 di Kecamatan Kebonagung
  - Tanggal 29 September 2017 di Kecamatan Pacitan
- b. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas dan Tokoh Masyarakat dengan output Terselenggaranya dan terlaksananya Sosialisasi wawasan Kebangsaan di Kalangan Pemuda, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat melalui media massa di 12 Kecamatan.
  - Tanggal 5 Oktober 2017 di Kecamatan Tegalombo
  - Tanggal 27 November 2017 di Nahdlatul Ulama Pacitan
  - Tanggal 13 Desember 2017 di Kecamatan Nawangan
  - Tanggal 28 Desember 2017 di Kecamatan Ngadirojo
- c. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ) dengan output Terlaksananya Sosialisasi Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tercukupinya operasional kegiatan FKUB.



- Tanggal 26 April 2017 di Kecamatan Ngadirojo
  - Tanggal 27 April 2017 di Kecamatan Nawangan
  - Tanggal 2 Mei 2017 di Kecamatan Donorojo
  - Tanggal 19 Juni 2017 di Kecamatan Tegalombo
  - Tanggal 20 Juni 2017 di Kecamatan Punung
  - Tanggal 7 November 2017 di Kecamatan Kebonagung
  - Tanggal 8 November 2017 di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo
- d. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan dengan output Terselenggaranya Sosialisasi Penghayatan PAKEM.
- Tanggal 6 Maret 2017 di Desa Nglaran Kecamatan Tulakan
  - Tanggal 7 Maret 2017 di Desa Jetak Kecamatan Tulakan
  - Tanggal 8 Maret 2017 di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan
  - Tanggal 9 Maret 2017 di Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan
  - Tanggal 10 Maret 2017 di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung
- e. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan output Terselenggaranya Sosialisasi dan kegiatan FKDM.
- Tanggal 4 April 2017 di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan
  - Tanggal 5 April 2017 di Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro



- Tanggal 6 April 2017 di Desa Kalak Kecamatan Donorojo
  - Tanggal 7 April 2017 di Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro
  - Tanggal 10 April 2017 di Desa Sendang Kecamatan Donorojo
- f. Kegiatan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dengan output Terlaksananya Sosialisasi Pembauran kebangsaan di kalangan pemuda dan tokoh masyarakat.
- Tanggal 18 Desember 2017 di Kecamatan Donorojo
  - Tanggal 19 Desember 2017 di Kecamatan Ngadirojo
  - Tanggal 21 Desember 2017 di Kecamatan Pringkuku
- g. Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan output Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan.
- Tanggal 8 Pebruari 2017 di Kecamatan Sudimoro
  - Tanggal 20 – 21 Maret 2017 di Yogyakarta
  - Tanggal 17 April 2017 di Kecamatan Donorojo
  - Tanggal 18 April 2017 di Kecamatan nawangan
  - Tanggal 3 Mei 2017 di kecamatan Pacitan
  - Tanggal 4 Mei 2017 di Kecamatan Pringkuku
  - Tanggal 4 Oktober di RM Larasati Klayar
- h. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme di kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat dengan output Terselenggaranya Sosialisasi bahaya Radikalisme dan



- Terorisme di Kalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat.
- Tanggal 5 Desember 2017 di Kecamatan Pacitan
  - Tanggal 12 Desember 2017 di kecamatan Donorojo
  - Tanggal 22 Desember 2017 di Kecamatan Pacitan
- i. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba ( P4GN ) dengan output Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba ( P4GN ) di Kalangan Pelajar, Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah.
- Tanggal Tanggal 4 Desember 2017 di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo
  - Tanggal 11 Desember 2017 di Desa Ketro Wonoyo Kecamatan Kebonagung
- j. Kegiatan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan output Terlaksananya kegiatan penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kegiatan rapat Tim dilaksanakan tiap 4 (empat ) bulan sekali di Ruang Rapat Bupati Pacitan.
- k. Kegiatan Kelompok Kerja Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ( PPWK ) dengan output Terselenggaranya lomba cerdas cermat tingkat SLTA, SMK, MA se Kabupaten Pacitan dan seminar Wasbang.
- Tanggal 6 September 2017 di SMKN 2 Nawangan
  - Tanggal 16 September 2017 di SMK Donorojo
  - Tanggal 29 September 2017 di Kecamatan Sudimoro
  - Tanggal 15 Oktober 2017 Ma Muhammadiyah Bandar



- Tanggal 17 Oktober 2017 di SMA Muhammadiyah Pacitan
  - Tanggal 25 Oktober 2017 di SMK 1 Donorojo
  - Tanggal 26 Oktober 2017 di SMA 1 Ngadirojo
  - Tanggal 9 November 2017 di MAN Pacitan
  - Tanggal 10 November 2017 di Ma al Qolam Pacitan
  - Tanggal 16 November 2017 di MAN Ketro Tulakan
  - Tanggal 17 November 2017 di SMAN Ngadirojo
  - Tanggal 20 November 2017 di Ma Ma'arif Bandar
- I. Kegiatan Komunitas Intelijend Daerah (KOMINDA) dengan output Terselenggaranya kegiatan monitoring/pemantauan, keamanan dan ketertiban dilaksanakan di 12 Kecamatan.

### **3. Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik**

Indikator Kinerja Persentase terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik pada tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2017, capain tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017.

Capaian Kinerja tahun 2017 ini didukung dengan Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dengan output Terwujudnya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017, bertempat di Hotel Remaja Pacitan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dengan output Terlaksananya pendaftaran, Pembinaan dan



Pengawasan Orkesmas yang dilaksanakan di 12 Kecamatan.

- c. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kepada Partai Politik dengan output Terselenggaranya Bimtek Partai Politik, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 November 2017 di Jogjakarta.
- d. Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dengan output Terselenggaranya Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan dilaksanakan pada tanggal :
  - Tanggal 18 September 2017 di Kecamatan Nawangan
  - Tanggal 18 September 2017 di Kecamatan Bandar
  - Tanggal 19 September 2017 di Kecamatan Kebonagung
  - Tanggal 19 September 2017 di Kecamatan Tulakan
  - Tanggal 20 September 2017 di Kecamatan Pringkuku
  - Tanggal 20 September 2017 di Kecamatan Arjosari
- e. Kegiatan Forum Lintas Partai Politik dengan output Terwujudnya Forum Lintas Partai Politik Tanggal 16 – 17 Mei 2017 di Hotel Srikandi.
- f. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan output terselenggaranya Verifikasi Administrasi Bantuan Dana Partai Politik, dilaksanakan 12 kali dalam 1 (satu) tahun.

**b. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**1. Persentase Petugas LINMAS terlatih**

Indikator Kinerja Persentase Petugas LINMAS terlatih pada tahun 2017 mencapai 45% atau mencapai 107% dari



target RPJMD tahun 2017, capaian indikator ini sudah melebihi 7% dari target RPJMD. Dari jumlah 5.402 orang petugas LINMAS yang sudah mendapatkan pelatihan Kelin masan sampai dengan Tahun 2017 ada 2.430 orang.

## **2. Persentase Jumlah Pembinaan, Pengawasan Dan Penyelesaian Pelanggaran PERDA dan PERKADA**

Indikator Kinerja Persentase Penegakan PERDA pada tahun 2017 mencapai 95% atau mencapai 101 % dari target RPJMD tahun 2017, capaian indikator ini sudah mencapai target RPJMD. Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2017 ada 118 pelanggaran, dari jumlah tersebut dapat diselesaikan 93 pelanggaran, dan untuk 5 pelanggaran masih dalam proses penyelesaian.

Capaian kinerja Persentase Penegakan PERDA tahun 2017 ini didukung dengan Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertibandan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan:

- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan output yang dihasilkan menurunnya pelanggaran Perda
- Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dengan output meningkatnya penyelesaian pelanggaran Perda

### **c. Kebudayaan**

#### **1. Persentase Seniman/ Budayawan Yang Dibina**

Indikator Kinerja Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebesar 86,94% festival atau mencapai 102,28% dari target RPJMD tahun 2017, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini didukung dengan program Pengembangan Nilai Budaya dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Festival seni budaya daerah



- Festival seni dan peringatan hari jadi Pacitan

Untuk mewujudkan sasaran 16 tersebut didukung melalui 7 (tujuh) program, dengan dukungan dana APBD tahun 2017 sebesar Rp.7.031.466.312,00 yang telah terealisasi senilai Rp. 6.914.826.853,00 atau 98.34% dari pagu anggarannya, dari pelaksanaan program ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 116.639.459,00

**Tabel Capaian Realisasi Anggaran Program Sasaran 16**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
16	Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban	Program peningkatan kerukunan umat beragama	1,155,305,312.00	1,136,281,023.00	98.35	19,024,289.00
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	969,423,000.00	953,697,000.00	98.38	15,726,000.00
		Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	413,247,750.00	404,410,750.00	97.86	8,837,000.00
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	836,556,750.00	818,262,750.00	97.81	18,294,000.00
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	1,688,119,000.00	1,652,161,830.00	97.87	35,957,170.00
		Program pendidikan politik masyarakat	374,012,000.00	372,500,000.00	99.60	1,512,000.00
		Program Pengembangan Nilai Budaya	1,594,802,500.00	1,577,513,500.00	98.92	17,289,000.00
			7,031,466,312.00	6,914,826,853.00	98.34	116,639,459.00

Dari tabel capaian kinerja sasaran 16 dan capaian kinerja anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 16 tahun 2017 dapat dilihat bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran 16 tahun 2017 mencapai 96.21% atau lebih kecil jika dibanding dengan akumulasi capaian kinerja keuangan yang mendukung pencapaian sasaran 16 yang pada tahun 2017 mencapai 98.34% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 116.639.459,00.



## **2. PERMASALAHAN UMUM DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan untuk dapat mendukung tercapainya sasaran sebagaimana diuraikan di atas antara lain adalah:

- 1) Perencanaan (planning) yang sistematis, selaras dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan; baik berupa Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- 4) Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang memadai;
- 5) Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
- 6) Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait yang terbina dengan baik dan harmonis.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2017 antara lain :

- 1) Masih kurang optimalnya koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan, sehingga keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah belum terjadi.



- 2) Kurang berkualitasnya indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga capaian dan hasil dari proram serta kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat dikur.
- 3) Masih terdapat Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang belum memiliki Program maupun kegiatan, sehingga pengukuran kinerja dari masing – masing pejabat tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang berakibat pada sasaran dan tujuan perangkat daerah tidak tercapai.
- 4) Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM masih kurang, masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya sehingga kinerjanya tidak optimal dan mempengaruhi kinerja organisasi, masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga kurang maksimal;
- 5) Belum dipelakukannya sistem reward and punishment dalam sistem kinerja di Kabupaten Pacitan.
- 6) Keterbatasan anggaran pemerintah daerah (APBD Kabupaten) sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan;
- 7) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya;
- 8) Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memiliki Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga sumber data kurang valid dan terukur; Kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil penelitian, pengembangan dan statistik sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.
- 9) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);



- 10) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

Suatu permasalahan atau masalah pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

- 1) Pembinaan dan pendampingan terus dilaksanakan secara simultan antara Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi kepada Perangkat Daerah sehingga dalam menyusun perencanaan (Renstra) Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD Kabupaten.
- 2) Diadakannya sosialisasi dan bimbingan teknis dengan nara sumber dari Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja.
- 3) Direncanakan adanya perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, sehingga nantinya dalam perencanaan setiap pejabat (eselon 3 dan eselon 4) mempunyai tanggungjawab dalam program dan kegiatan.
- 4) Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan baik melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai (mutasi) menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Perlu peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui diklat, seminar, studi banding, tugas belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);



- 5) Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- 6) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- 7) Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di Perangkat Daerah, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan;
- 8) Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi dan lintas sektor terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik; Hal ini sudah dirintis dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Bupati dengan Perangkat Daerah, Rapat Kerja Bupati dengan Instansi Vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa.
- 9) Perlu meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Pacitan. Meningkatkan kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Grindulu Mapan, Posdaya, Bulan Bhakti Gotong Royong dan lain-lain.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 yang dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 tahun 2017 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2017.

#### **1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telahterukur secara rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber – sumber pendapatan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2017 menekankan pada upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kemandirian daerah, disamping itu pemerintah daerah



juga berupaya membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber – sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
  - Pajak daerah;
  - Retribusi Daerah;
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan meliputi :
  - Dana bagi hasil pajak / bukan pajak;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus;
3. Lain – lain pendapatan daerah yang syah, meliputi :
  - Hibah;
  - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
  - Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
  - Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Adapun dalam pengelolaan pendapatan daerah upaya yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah beberapa diantaranya adalah melalui :

- a Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah



- b Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber – sumber pendapatan daerah
- c Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat
- d Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- e Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- f Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan politik

Berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerimaan daerah yang optimal, maka kesinambungan program/ kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan masyarakat tetap menjadi landasan utama target pendapatan sehingga pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai.

#### 1. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan sebesar Rp.1.683.793.675.192,74 dan dapat terealisasi sebesar Rp.1.655.537.179.548,19 kurang dari target sebesar Rp.28.256.495.644,55 atau mencapai 98,32 %.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 191.256.202.438,74;



- Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.128.832.445.754,00; dan
- Lain-lain Penerimaan yang sah sebesar Rp. 363.705.027.000,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu ditingkatkan sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan, penggalan potensi sumber pendapatan, pengendalian, pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran, disamping itu koordinasi baik dengan Pemerintah Propinsi maupun pusat guna meningkatkan dana transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima Pemerintah Kabupaten telah berjalan dengan baik, disamping peningkatan didukung pula kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Secara umum dalam rangka pemenuhan target APBD, hampir semua komponen pendapatan dapat melampaui target, kecuali dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dana alokasi khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat dikarenakan mensikapi kondisi perekonomian secara nasional yang mengalami ketidak menentuan karena ekonomi global yang belum stabil, berdasarkan data realisasi pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.655.537.179.548,19 mengalami kenaikan sebesar Rp. 128.005.968.577,60 atau 8,38% dibandingkan pendapatan tahun anggaran 2016 yang hanya mencapai Rp. 1.527.531.210.970,59. Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.624.603.940,60 atau 34,31 % dibandingkan



- tahun 2016 karena adanya intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp. 5.992.844.351,00 atau 0,55% dibandingkan tahun 2016 karena adanya rasionalisasi anggaran dari pemerintah Pusat.
  3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.374.208.988,00 atau 28,42% dibandingkan tahun 2016 karena adanya penambahan dari Dana bagi hasil pajak dari Propinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah lainnya.

Secara lengkap perbandingan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dan 2017, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2016 dan 2017**

NO	Pendapatan	Tahun				Growth (%)
		2016		2017		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	150.466.067.820,59	9,85	202.090.671.761,19	12,21	34,31
	Hasil Pajak Daerah	26.909.423.084,75	1,762	29.749.160.146,80	1,797	10,55
	Hasil Retribusi Daerah	25.854.036.796,69	1,693	25.972.787.390,63	1,569	0,46
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.425.176.653,00	0,159	2.439.361.626,44	0,147	0,58
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.277.431.286,15	6,237	143.929.362.597,32	8,694	51,06
2	Dana Perimbangan	1.087.172.953.668,00	71,17	1.081.180.109.317,00	65,31	(0,55)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.876.719.010,00	3,723	52.713.507.009,00	3,184	(7,32)
	Dana Alokasi Umum	807.907.686.000,00	52,89	793.715.346.000,00	47,94	(1,76)
	Dana Alokasi Khusus	222.388.548.658,00	14,56	234.751.256.308,00	14,18	5,56
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	289.892.189.482,00	18,98	372.266.398.470,00	22,49	28,42
	Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	0,655	0	0	(100)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.636.665.482,00	4,231	84.159.547.470,00	5,084	30,20



Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	144.932.284.000,00	9,488	213.591.851.000,00	12,9	47,37
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	70.323.240.000,00	4,604	74.515.000.000,00	4,501	5,96
<b>JUMLAH</b>	<b>1.527.531.210.970,59</b>	<b>100</b>	<b>1.655.537.179.548,19</b>	<b>100</b>	<b>8,38</b>

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

- % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah

- Growth : Pertumbuhan (persen) tahun 2016 ke tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam jumlah yang relatif cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.081.180.109.317,00 dari seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2016 yang meliputi :

- Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak Rp. 52.713.507.009,00
- Dana Alokasi Umum Rp. 793.715.346.000,00
- Dana Alokasi Khusus Rp. 234.751.256.308,00

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 202.090.671.761,19 atau 12,21 % dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi terciptanya kemandirian daerah agar tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.

Upaya yang dilakukan dalam memacu peningkatan PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;



- c. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada masyarakat;
- d. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- e. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah.
- f. Pendapatan lain – lain yang syah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan serta meningkatkan perluasan sumber – sumber pendapatan daerah;
- g. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang syah terus diupayakan dalam bentuk koordinasi ke pusat dan propinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK, Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dan Bantuan Keuangan
- h. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.655.537.179.548,19 atau mencapai 98,32 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.683.793.675.192,74 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**

URAIAN	TARGET ( Rp )	REALISASI ( Rp )	Capaian %
Pendapatan Asli Daerah	191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	105,66



- Hasil Pajak Daerah	27.043.865.200,00	29.749.160.146,80	110
- Hasil Retribusi Daerah	26.063.380.959,00	25.972.787.390,63	99,65
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.439.361.626,44	2.439.361.626,44	100
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.709.594.653,30	143.929.362.597,32	106,06
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.128.832.445.754,00</b>	<b>1.081.180.109.317,00</b>	<b>95,78</b>
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	72.056.244.754,00	52.713.507.009,00	73,16
- Dana Alokasi Umum	793.715.346.000,00	793.715.346.000,00	100
- Dana Alokasi Khusus	263.060.855.000,00	234.751.256.308,00	89,24
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>363.705.027.000,00</b>	<b>372.266.398.470,00</b>	<b>102,35</b>
- Pendapatan Hibah	0	0	0
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	75.598.176.000,00	84.159.547.470,00	111,32
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	213.591.851.000,00	213.591.851.000,00	100
- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	74.515.000.000,00	74.515.000.000,00	100
<b>JUMLAH</b>	<b>1.683.793.675.192,74</b>	<b>1.655.537.179.548,19</b>	<b>98,32</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp 202.090.671.761,19 atau mencapai 105,66 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 191.256.202.438,74. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari :

- Pajak Daerah sebesar Rp. 29.749.160.146,80
- Retribusi daerah sebesar Rp. 25.972.787.390,63
- Pengelolaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.439.361.626,44
- Lain – lain PAD yang sah sebesar Rp. 143.929.362.597,32

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Pajak Hotel	505.000.000,00	511.711.754,00	101,33
2	Pajak Restoran	1.568.760.000,00	1.551.553.355,80	98,90
3	Pajak Hiburan	70.000.000,00	69.881.699,00	99,83
4	Pajak Reklame	465.000.000,00	545.053.517,00	117,22
5	Pajak Penerangan Jalan	8.550.000.000,00	10.964.687.699,00	128,24
6	Pajak Parkir	22.472.000,00	22.997.000,00	102,34
7	Pajak Air Tanah	62.133.200,00	62.675.833,00	100,87
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	150.000.000,00	72.924.728,00	48,62
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14.650.000.000,00	14.731.063.240,00	100,55
10	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.500.000,00	1.216.611.321,00	121,60
JUMLAH		27.043.865.200,00	29.749.160.146,80	110,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Retribusi Jasa Umum	12.246.113.000,00	12.527.317.300,00	102,30
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.522.625.000,00	7.497.627.800,00	99,67
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.500.000,00	29.124.000,00	92,46
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.694.633.000,00	1.792.726.000,00	105,79
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.150.225.000,00	2.351.135.000,00	109,34
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	445.000.000,00	425.740.000,00	95,67
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.130.000,00	7.250.500,00	340,40
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	423.714.000,00	105,93
B	Retribusi Jasa Usaha	11.834.272.959,00	11.187.694.449,00	94,54
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	372.857.500,00	515.671.225,00	138,30
2	Retribusi Tempat Pelelangan	703.067.459,00	704.122.224,00	100,15
3	Retribusi Terminal	51.748.000,00	49.978.000,00	96,58
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.600.000,00	1.744.000,00	109,00



5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	21.500.000,00	27.575.000,00	128,26
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	17.420.000,00	17.555.000,00	100,77
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.666.080.000,00	9.871.049.000,00	92,55
C	Retribusi Perizinan Tertentu	1.982.995.000,00	2.257.775.641,63	113,86
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	306.511.941,13	97,31
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.600.000.000,00	1.898.213.700,50	118,64
4	Retribusi Izin Trayek	37.995.000,00	23.050.000,00	60,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.063.380.959,00</b>	<b>25.972.787.390,63</b>	<b>99,65</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK

**Tabel 3.5**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		(Rp)	(Rp)	
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD			
1	Bank Jatim	2.335.624.626,44	2.335.624.626,44	100
2	Bank Perkreditan Rakyat	103.737.000,00	103.737.000,00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.439.361.626,44</b>	<b>2.439.361.626,44</b>	<b>100</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realiasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	Capaian %
A	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	145.450.000,00	163.450.000,00	112,38
	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00
	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	143.550.000,00	161.550.000,00	112,54
B	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	974.429.925,47	88,58
	Jasa Giro Kas Daerah	1.100.000.000,00	974.429.925,47	88,58
C	Pendapatan Bunga Deposito	6.451.260.000,00	8.275.434.060,19	128,28
	Rekening Deposito pada BPD	5.000.000.000,00	6.476.027.396,78	129,52
	Rekening Deposito Pada BRI	700.000.000,00	901.489.950,00	128,78
	Rekening Deposito Pada BNI	600.000.000,00	652.952.056,00	108,83
	Pendapatan Bunga Piutang	1.260.000,00	2.040.000,00	161,90
	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	150.000.000,00	242.924.657,41	161,95



D	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	136.096.316,50	0,00
	Bidang Pekerjaan Umum	-	136.096.316,50	0,00
	Pendapatan Denda Pajak 1	649.466,00	23.051.807,00	3549,35
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	649.466,00	23.051.807,00	3549,35
E	Pendapatan dari Pengembalian	744.505.937,39	752.012.785,39	101,01
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	29.248.527,00	36.755.375,00	125,67
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan	695.857.410,39	695.857.410,39	100,00
F	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14
G	Pendapatan dari BLUD	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	110,36
	Pendapatan Dari BLUD	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	110,36
H	Pendapatan Lain-lain	1.543.512.552,91	1.211.300.141,91	78,48
	Pendapatan Lain-Lain	897.114.552,91	279.262.852,91	31,13
	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	646.398.000,00	932.037.289,00	144,19
I	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	16.301.889.126,00	16.412.279.327,00	100,68
	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	16.301.889.126,00	16.412.279.327,00	100,68
J	Dana Bos	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00
	Dana BOS Pada Satuan Pendidikan	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>135.709.594.653,30</b>	<b>143.929.362.597,32</b>	<b>106,06</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK

### 3. Permasalahan dan Solusi

#### a. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Terbatasnya kemampuan SDM pengelola PBB utamanya terkait penentuan basis data PBB (NJOP tanah dan Bangunan)
2. Tingkat akurasi data pajak PBB dan BPHTB yang berpengaruh terhadap data wajib pajak belum akurat mengingat penetapan NJOP belum sesuai dengan harga pasar.



3. Ketidakjelasan aturan yang menyatakan tentang penerimaan daerah yang tidak melalui Kas Daerah.
4. Infrastruktur yang ada kurang memadai, khususnya akses jalan yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Pacitan.
5. Pengelolaan pariwisata yang belum maksimal dengan belum adanya sistem yang transparansi dan akuntabel terhadap pemungutan retribusi masuk tempat wisata dan promosi wisata, maka pendapatan dari sektor pariwisata masih relatif kecil.

**b. Solusi**

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan solusi/ langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat – diklat teknis terkait dengan pengelolaan PBB.
- b. Penyusunan regulasi yang terkait dengan penetapan NJOP PBB dan BPHTB melalui pemutakhiran data zona nilai tanah sebagai dasar penetapan besarnya PBB dan BPHTB;
- c. Melakukan Konsultasi dan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait dengan mekanisme pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur, dalam rangka menarik investor agar menanamkan investasinya di Kabupaten Pacitan.



- e. Dibentuk manajemen pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

## **2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Secara definitif belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri, pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini demikian penting karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.



Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2017 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pengelolaanbelanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya meliputi :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;



2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;



3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;
4. Meningkatkan akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2017 lebih menekankan pada upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2017 dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang 9 Tahun 2015;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



16. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2017;

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7 struktur APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2016 proporsi belanja langsung mendapat alokasi sebesar 40,47% dari total belanja daerah.

**Tabel 3.7**  
**Struktur Belanja APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	PROPORSI (%)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.018.377.245.181,72</b>	<b>59,53</b>
1	Belanja Pegawai	656.164.770.665,72	38,36
2	Belanja Hibah	32.213.471.500,00	1,88
3	Belanja Bantuan Sosial	14.148.845.416,00	0,83
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	5.114.791.546,00	0,30
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Parpol	307.386.235.919,00	17,97
6	Belanja Tidak Terduga	3.349.130.135,00	0,20
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>692.272.911.633,00</b>	<b>40,47</b>
1	Belanja Pegawai	61.241.220.349,00	3,58
2	Belanja Barang Dan Jasa	265.827.123.461,29	15,54
3	Belanja Modal	365.204.567.822,71	21,35
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.710.650.156.814,72</b>	<b>100,00</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK



## 2. Target dan Realisasi Belanja

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.710.650.156.814,72 realisasinya mencapai Rp. 1.629.539.754.070,35 atau 95,26 % yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 970.051.810.279,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 659.487.943.791,35 sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 81.110.402.744,37

Dari kelompok belanja tidak langsung selain dipergunakan untuk belanja pegawai, pada tahun 2017 juga dialokasikan untuk:

1. Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non – profesional.
2. Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;



3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.  
Belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/ RW, bantuan Operasional BPD, bantuan semen, Purna Tugas Perangkat Desa, bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;
5. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung di alokasikan untuk :

1. Belanja Pegawai yaitu untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam



melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada :

1. Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
2. Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsipertanggung jawaban urusan pemerintahan;
3. Menitikberatkan pada Urusan Wajib yang terkait pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
5. Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain : pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
6. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
  - a Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat
  - b Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.



Setelah dilakukan operasionalisasi kebijakan belanja daerah dengan memperhatikan Kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah dan faktor lain, maka target dan realisasi belanja daerah tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	JENIS BELANJA	TARGET		REALISASI	
		JUMLAH	PRO PORSI (%)	JUMLAH	PRO PORSI (%)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.018.377.245.181,72</b>	<b>59,53</b>	<b>970.051.810.279,00</b>	<b>59,53</b>
1	Belanja Pegawai	656.164.770.665,72	38,36	613.359.536.719,00	37,64
2	Belanja Hibah	32.213.471.500,00	1,88	30.704.144.100,00	1,88
3	Belanja Bantuan Sosial	14.148.845.416,00	0,83	12.912.131.865,00	0,79
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	5.114.791.546,00	0,30	3.916.790.996,00	0,24
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	307.386.235.919,00	17,97	306.057.342.384,00	18,78
6	Belanja Tidak Terduga	3.349.130.135,00	0,20	3.101.864.215,00	0,19
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>692.272.911.633,00</b>	<b>40,47</b>	<b>659.487.943.791,35</b>	<b>40,47</b>
1	Belanja Pegawai	61.241.220.349,00	3,58	62.613.687.539,41	3,84
2	Belanja Barang Dan Jasa	265.827.123.461,29	15,54	250.271.954.108,94	15,36
3	Belanja Modal	365.204.567.822,71	21,35	346.602.302.143,00	21,27
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.710.650.156.814,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.629.539.754.070,35</b>	<b>100,00</b>

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.683.793.675.192,74</b>	<b>1.655.537.179.548,19</b>	<b>98,32</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	191.256.202.438,74	202.090.671.761,19	105,66
2	Dana Perimbangan	1.128.832.445.754,00	1.081.180.109.317,00	95,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	363.705.027.000,00	372.266.398.470,00	102,35
	<b>BELANJA</b>	<b>1.710.650.156.814,72</b>	<b>1.629.539.754.070,35</b>	<b>95,26</b>
1	Belanja tidak langsung	1.018.377.245.181,72	970.051.810.279,00	95,25
2	Belanja langsung	692.272.911.633,00	659.487.943.791,35	95,26
	Surplus/ Defisit	(26.856.481.621,98)	25.997.425.477,84	-96,80
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>26.856.481.621,98</b>	<b>27.387.331.621,98</b>	<b>101,98</b>
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.306.481.621,98	28.337.331.621,98	100,11
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	950.000.000,00	65,52
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	53.384.757.099,82	0,00

Keterangan : Data sebelum audit BPK

Sesuai Target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang diharapkan dapat memberikan semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat Pacitan.

Sedangkan alokasi pendapatan dan belanja per Satuan kerja menurut urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum dapat disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 3.10**  
**Rekapitulasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi**  
**Tahun Anggaran 2017**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	133.340.559.197,00	140.171.719.726,30	105,12	537.311.983.760,04	505.205.591.711,00	94,02	507.233.618.213,00	487.164.835.813,35	96,04	1.044.545.601.973,04	992.370.427.524,35	95,00
1.01.	PENDIDIKAN	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00	455.951.685.821,31	427.456.757.596,00	93,75	95.070.352.815,00	86.734.599.124,00	91,23	551.022.038.636,31	514.191.356.720,00	93,32
1.01.1	DINAS PENDIDIKAN	46.913.327.571,00	46.913.327.571,00	100,00	455.951.685.821,31	427.456.757.596,00	93,75	94.413.462.815,00	86.078.625.611,00	91,17	550.365.148.636,31	513.535.383.207,00	93,31
1.01.2	DINAS PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	656.890.000,00	655.973.513,00	99,86	656.890.000,00	655.973.513,00	99,86
1.02.	KESEHATAN	85.824.514.126,00	92.335.839.714,17	107,59	63.085.120.186,16	61.080.429.842,00	96,82	161.957.090.603,00	155.267.611.156,35	95,87	225.042.210.789,16	216.348.040.998,35	96,14
1.02.1	DINAS KESEHATAN	23.824.514.126,00	23.909.907.127,00	100,36	44.229.978.839,88	42.387.068.156,00	95,83	79.389.250.701,00	67.453.784.067,60	84,97	123.619.229.540,88	109.840.852.223,60	88,85
1.02.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	62.000.000.000,00	68.425.932.587,17	110,36	18.855.141.346,28	18.693.361.686,00	99,14	82.567.839.902,00	87.813.827.088,75	106,35	101.422.981.248,28	106.507.188.774,75	105,01
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600.587.500,00	915.301.941,13	152,40	4.123.573.822,52	3.919.121.359,00	95,04	175.956.742.900,00	171.917.809.702,00	97,70	180.080.316.722,52	175.836.931.061,00	97,64
1.03.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	600.587.500,00	915.301.941,13	152,40	4.123.573.822,52	3.919.121.359,00	95,04	175.956.742.900,00	171.917.809.702,00	97,70	180.080.316.722,52	175.836.931.061,00	97,64
1.04.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	6.420.993.194,02	6.021.379.648,00	93,78	57.467.986.375,00	56.648.838.160,00	98,57	63.888.979.569,02	62.670.217.808,00	98,09
1.04.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	6.420.993.194,02	6.021.379.648,00	93,78	56.580.953.250,00	55.773.173.685,00	98,57	63.001.946.444,02	61.794.553.333,00	98,08
1.04.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-	-	-	887.033.125,00	875.664.475,00	98,72	887.033.125,00	875.664.475,00	98,72
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.130.000,00	7.250.500,00	340,40	4.808.001.853,40	4.033.644.817,00	83,89	14.438.986.000,00	14.282.550.981,00	98,92	19.246.987.853,40	18.316.195.798,00	95,16
1.05.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.130.000,00	7.250.500,00	340,40	3.220.547.996,26	3.281.865.745,00	101,90	3.250.485.000,00	3.195.890.301,00	98,32	6.471.032.996,26	6.477.756.046,00	100,10
1.05.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	1.587.453.857,14	751.779.072,00	47,36	11.188.501.000,00	11.086.660.680,00	99,09	12.775.954.857,14	11.838.439.752,00	92,66
1.06.	SOSIAL	-	-	-	2.922.608.882,63	2.694.258.449,00	92,19	2.342.459.520,00	2.313.426.690,00	98,76	5.265.068.402,63	5.007.685.139,00	95,11
1.06.1	DINAS SOSIAL	-	-	-	2.922.608.882,63	2.694.258.449,00	92,19	2.342.459.520,00	2.313.426.690,00	98,76	5.265.068.402,63	5.007.685.139,00	95,11



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR	4.771.476.000,00	5.286.337.776,19	110,79	22.691.724.347,88	19.482.807.277,00	85,86	49.401.270.792,50	46.407.389.617,00	93,94	72.092.995.140,38	65.890.196.894,00	91,40
2.01.	TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	1.280.559.000,00	1.223.176.080,00	95,52	1.280.559.000,00	1.223.176.080,00	95,52
2.01.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	-	-	-	-	-	-	1.280.559.000,00	1.223.176.080,00	95,52	1.280.559.000,00	1.223.176.080,00	95,52
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	5.301.985.789,38	5.252.236.163,00	99,06	549.437.500,00	537.427.315,00	97,81	5.851.423.289,38	5.789.663.478,00	98,94
2.02.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	5.301.985.789,38	5.252.236.163,00	99,06	549.437.500,00	537.427.315,00	97,81	5.851.423.289,38	5.789.663.478,00	98,94
2.03.	PANGAN	-	-	-	1.192.563.223,76	1.105.721.659,00	92,72	510.483.825,00	492.903.076,00	96,56	1.703.047.048,76	1.598.624.735,00	93,87
2.03.1	DINAS PANGAN	-	-	-	1.192.563.223,76	1.105.721.659,00	92,72	510.483.825,00	492.903.076,00	96,56	1.703.047.048,76	1.598.624.735,00	93,87
2.04.	PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	5.070.000.000,00	3.669.281.962,00	72,37	5.070.000.000,00	3.669.281.962,00	72,37
2.04.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	5.070.000.000,00	3.669.281.962,00	72,37	5.070.000.000,00	3.669.281.962,00	72,37
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	1.631.500.000,00	1.927.337.700,50	118,13	1.096.915.435,00	1.008.233.302,00	91,92	6.607.089.261,00	6.237.634.780,00	94,41	7.704.004.696,00	7.245.868.082,00	94,05
2.05.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.631.500.000,00	1.927.337.700,50	118,13	1.096.915.435,00	1.008.233.302,00	91,92	6.607.089.261,00	6.237.634.780,00	94,41	7.704.004.696,00	7.245.868.082,00	94,05
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	1.954.407.145,02	1.595.580.210,00	81,64	2.940.822.627,00	2.804.146.773,00	95,35	4.895.229.772,02	4.399.726.983,00	89,88
2.06.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	1.954.407.145,02	1.595.580.210,00	81,64	2.940.822.627,00	2.804.146.773,00	95,35	4.895.229.772,02	4.399.726.983,00	89,88
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	3.020.476.978,64	2.310.973.830,00	76,51	3.655.977.457,50	3.305.673.598,00	90,42	6.676.454.436,14	5.616.647.428,00	84,13
2.07.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	3.020.476.978,64	2.310.973.830,00	76,51	3.655.977.457,50	3.305.673.598,00	90,42	6.676.454.436,14	5.616.647.428,00	84,13



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	5.172.415.125,00	5.103.225.118,00	98,66	5.172.415.125,00	5.103.225.118,00	98,66
2.08.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	5.172.415.125,00	5.103.225.118,00	98,66	5.172.415.125,00	5.103.225.118,00	98,66
2.09.	PERHUBUNGAN	2.230.976.000,00	2.293.238.000,00	102,79	2.989.016.501,89	2.557.731.114,00	85,57	10.016.350.460,00	9.760.572.997,00	97,45	13.005.366.961,89	12.318.304.111,00	94,72
2.09.1	DINAS PERHUBUNGAN	2.230.976.000,00	2.293.238.000,00	102,79	2.989.016.501,89	2.557.731.114,00	85,57	10.016.350.460,00	9.760.572.997,00	97,45	13.005.366.961,89	12.318.304.111,00	94,72
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	400.000.000,00	423.714.000,00	105,93	353.736.547,89	129.042.015,00	36,48	3.310.635.149,00	3.141.224.910,00	94,88	3.664.371.696,89	3.270.266.925,00	89,24
2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	400.000.000,00	423.714.000,00	105,93	353.736.547,89	129.042.015,00	36,48	3.310.635.149,00	3.141.224.910,00	94,88	3.664.371.696,89	3.270.266.925,00	89,24
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14	3.420.516.513,02	2.404.530.895,00	70,30	1.774.402.000,00	1.739.698.436,00	98,04	5.194.918.513,02	4.144.229.331,00	79,77
2.11.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	509.000.000,00	642.048.075,69	126,14	3.420.516.513,02	2.404.530.895,00	70,30	1.774.402.000,00	1.739.698.436,00	98,04	5.194.918.513,02	4.144.229.331,00	79,77
2.12.	PENANAMAN MODAL	-	-	-	1.971.623.480,39	1.909.830.002,00	96,87	1.464.445.146,00	1.435.859.497,00	98,05	3.436.068.626,39	3.345.689.499,00	97,37
2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	1.971.623.480,39	1.909.830.002,00	96,87	1.464.445.146,00	1.435.859.497,00	98,05	3.436.068.626,39	3.345.689.499,00	97,37
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	2.551.975.213,00	2.538.207.681,00	99,46	2.551.975.213,00	2.538.207.681,00	99,46
2.13.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	2.551.975.213,00	2.538.207.681,00	99,46	2.551.975.213,00	2.538.207.681,00	99,46
2.14.	STATISTIK	-	-	-	-	-	-	137.400.000,00	135.188.000,00	98,39	137.400.000,00	135.188.000,00	98,39
2.14.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	137.400.000,00	135.188.000,00	98,39	137.400.000,00	135.188.000,00	98,39
2.15.	PERSANDIAN	-	-	-	-	-	-	47.900.000,00	47.866.250,00	99,93	47.900.000,00	47.866.250,00	99,93
2.15.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	47.900.000,00	47.866.250,00	99,93	47.900.000,00	47.866.250,00	99,93
2.16.	KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	3.468.807.404,00	3.399.808.611,00	98,01	3.468.807.404,00	3.399.808.611,00	98,01
2.16.1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	3.468.807.404,00	3.399.808.611,00	98,01	3.468.807.404,00	3.399.808.611,00	98,01
2.17.	PERPUSTAKAAN	-	-	-	1.390.482.732,89	1.208.928.087,00	86,94	569.043.350,00	565.608.233,00	99,40	1.959.526.082,89	1.774.536.320,00	90,56



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN	-	-	-	1.390.482.732,89	1.208.928.087,00	86,94	569.043.350,00	565.608.233,00	99,40	1.959.526.082,89	1.774.536.320,00	90,56
2.18.	KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	273.527.275,00	269.886.300,00	98,67	273.527.275,00	269.886.300,00	98,67
2.18.1	DINAS PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	273.527.275,00	269.886.300,00	98,67	273.527.275,00	269.886.300,00	98,67
3	URUSAN PILIHAN	13.923.375.459,00	13.232.679.724,00	95,04	17.714.046.754,44	16.505.606.527,00	93,18	50.507.528.958,50	47.044.119.204,00	93,14	68.221.575.712,94	63.549.725.731,00	93,15
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	805.820.459,00	820.192.224,00	101,78	2.857.285.724,52	2.494.112.569,00	87,29	6.593.249.195,00	6.510.143.889,00	98,74	9.450.534.919,52	9.004.256.458,00	95,28
3.01.1	DINAS PERIKANAN	805.820.459,00	820.192.224,00	101,78	2.857.285.724,52	2.494.112.569,00	87,29	6.593.249.195,00	6.510.143.889,00	98,74	9.450.534.919,52	9.004.256.458,00	95,28
3.02.	PARIWISATA	10.900.000.000,00	9.993.107.500,00	91,68	3.692.613.188,27	3.577.111.289,00	96,87	8.256.920.500,00	8.169.616.100,00	98,94	11.949.533.688,27	11.746.727.389,00	98,30
3.02.1	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.900.000.000,00	9.993.107.500,00	91,68	3.692.613.188,27	3.577.111.289,00	96,87	8.256.920.500,00	8.169.616.100,00	98,94	11.949.533.688,27	11.746.727.389,00	98,30
3.03.	PERTANIAN	18.680.000,00	19.595.000,00	104,90	10.143.084.346,14	10.159.402.943,00	100,16	28.362.721.876,50	25.152.408.613,00	88,68	38.505.806.222,64	35.311.811.556,00	91,71
3.03.1	DINAS PERTANIAN	18.680.000,00	19.595.000,00	104,90	10.143.084.346,14	10.159.402.943,00	100,16	26.431.857.001,50	23.249.987.653,00	87,96	36.574.941.347,64	33.409.390.596,00	91,35
3.03.2	DINAS PANGAN	-	-	-	-	-	-	1.930.864.875,00	1.902.420.960,00	98,53	1.930.864.875,00	1.902.420.960,00	98,53
3.04.	PERDAGANGAN	2.198.875.000,00	2.399.785.000,00	109,14	1.021.063.495,51	274.979.726,00	26,93	4.358.500.387,00	4.338.646.800,00	99,54	5.379.563.882,51	4.613.626.526,00	85,76
3.04.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.198.875.000,00	2.399.785.000,00	109,14	1.021.063.495,51	274.979.726,00	26,93	4.358.500.387,00	4.338.646.800,00	99,54	5.379.563.882,51	4.613.626.526,00	85,76
3.05.	PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-	2.850.000.000,00	2.788.326.802,00	97,84	2.850.000.000,00	2.788.326.802,00	97,84
3.05.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	2.850.000.000,00	2.788.326.802,00	97,84	2.850.000.000,00	2.788.326.802,00	97,84
3.06.	TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	86.137.000,00	84.977.000,00	98,65	86.137.000,00	84.977.000,00	98,65
3.06.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	-	-	-	-	-	-	86.137.000,00	84.977.000,00	98,65	86.137.000,00	84.977.000,00	98,65
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.531.758.264.536,74	1.496.846.442.321,70	97,72	440.659.490.319,36	428.857.804.764,00	97,32	85.130.493.669,00	78.871.599.157,00	92,65	525.789.983.988,36	507.729.403.921,00	96,57
4.01.	PERENCANAAN	-	-	-	2.964.503.817,52	2.839.802.424,00	95,79	7.313.176.000,00	7.198.561.464,00	98,43	10.277.679.817,52	10.038.363.888,00	97,67
4.01.1	BADAN PERENCANAAN DAERAH	-	-	-	2.964.503.817,52	2.839.802.424,00	95,79	7.313.176.000,00	7.198.561.464,00	98,43	10.277.679.817,52	10.038.363.888,00	97,67
4.02.	KEUANGAN	39.220.791.782,74	43.399.934.534,70	110,66	13.368.416.209,75	11.374.402.748,00	85,08	16.860.165.475,00	16.584.671.794,00	98,37	30.228.581.684,75	27.959.074.542,00	92,49
4.02.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.054.277.116,74	13.603.642.855,90	112,85	10.002.199.128,87	8.923.750.828,00	89,22	12.603.967.025,00	12.383.615.833,00	98,25	22.606.166.153,87	21.307.366.661,00	94,25
4.02.2	BADAN PENDAPATAN	27.166.514.666,00	29.796.291.678,80	109,68	3.366.217.080,88	2.450.651.920,00	72,80	4.256.198.450,00	4.201.055.961,00	98,70	7.622.415.530,88	6.651.707.881,00	87,27
4.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	7.607.125.275,50	6.442.739.492,00	84,69	4.558.968.378,00	4.399.259.272,00	96,50	12.166.093.653,50	10.841.998.764,00	89,12



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pendapatan			Belanja								
		Target	Realisasi	%	Tidak Langsung			Langsung			Jumlah Belanja		
					Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
4.03.1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	7.607.125.275,50	6.442.739.492,00	84,69	4.558.968.378,00	4.399.259.272,00	96,50	12.166.093.653,50	10.841.998.764,00	89,12
4.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	1.703.814.850,64	1.494.730.297,00	87,73	1.997.013.000,00	1.986.317.087,00	99,46	3.700.827.850,64	3.481.047.384,00	94,06
4.04.1	BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN	-	-	-	1.703.814.850,64	1.494.730.297,00	87,73	1.997.013.000,00	1.986.317.087,00	99,46	3.700.827.850,64	3.481.047.384,00	94,06
4.05.	PEMERINTAHAN UMUM	1.492.537.472.754,00	1.453.446.507.787,00	97,38	415.015.630.165,95	406.706.129.803,00	98,00	54.401.170.816,00	48.702.789.540,00	89,53	469.416.800.981,95	455.408.919.343,00	97,02
4.05.1	INSPEKTORAT	-	-	-	2.560.436.820,77	2.502.919.352,00	97,75	2.884.351.350,00	2.659.208.468,00	92,19	5.444.788.170,77	5.162.127.820,00	94,81
4.05.2	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	12.072.845.443,63	11.767.800.155,00	97,47	18.080.035.466,00	16.952.544.982,00	93,76	30.152.880.909,63	28.720.345.137,00	95,25
4.05.3	PPKD	1.492.537.472.754,00	1.453.446.507.787,00	97,38	362.212.474.516,00	356.692.273.560,00	98,48	-	-	-	362.212.474.516,00	356.692.273.560,00	98,48
4.05.4	BUPATI/ WAKIL BUPATI	-	-	-	820.917.659,00	728.367.328,00	88,73	-	-	-	820.917.659,00	728.367.328,00	88,73
4.05.5	DPRD	-	-	-	12.331.039.128,00	10.970.718.486,00	88,97	-	-	-	12.331.039.128,00	10.970.718.486,00	88,97
4.05.6	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	2.474.912.123,51	2.441.960.453,00	98,67	24.579.200.000,00	20.464.251.255,00	83,26	27.054.112.123,51	22.906.211.708,00	84,67
4.05.7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	1.581.805.027,14	1.538.256.722,00	97,25	2.669.781.000,00	2.629.281.513,00	98,48	4.251.586.027,14	4.167.538.235,00	98,02
4.05.8	KECAMATAN DONOROJO	-	-	-	1.611.341.237,38	1.491.967.067,00	92,59	352.105.000,00	349.992.030,00	99,40	1.963.446.237,38	1.841.959.097,00	93,81
4.05.9	KECAMATAN PUNUNG	-	-	-	1.681.907.378,26	1.616.371.320,00	96,10	357.919.000,00	356.429.664,00	99,58	2.039.826.378,26	1.972.800.984,00	96,71
4.05.10	KECAMATAN PRINGKUKU	-	-	-	1.243.474.494,89	1.172.834.459,00	94,32	357.919.000,00	357.790.482,00	99,96	1.601.393.494,89	1.530.624.941,00	95,58
4.05.11	KECAMATAN PACITAN	-	-	-	4.279.372.199,76	4.222.088.260,00	98,66	2.180.454.000,00	2.032.558.124,00	93,22	6.459.826.199,76	6.254.646.384,00	96,82
4.05.12	KECAMATAN KEBONAGUNG	-	-	-	1.372.647.663,51	1.281.998.299,00	93,40	401.405.000,00	399.120.926,00	99,43	1.774.052.663,51	1.681.119.225,00	94,76
4.05.13	KECAMATAN ARJOSARI	-	-	-	1.498.763.355,26	1.419.070.849,00	94,68	379.141.000,00	378.127.096,00	99,73	1.877.904.355,26	1.797.197.945,00	95,70
4.05.14	KECAMATAN NAWANGAN	-	-	-	1.329.664.483,01	1.273.484.338,00	95,77	346.033.000,00	342.551.307,00	98,99	1.675.697.483,01	1.616.035.645,00	96,44
4.05.15	KECAMATAN BANDAR	-	-	-	1.498.497.218,14	1.419.848.237,00	94,75	336.959.000,00	334.005.445,00	99,12	1.835.456.218,14	1.753.853.682,00	95,55
4.05.16	KECAMATAN TEGALOMBO	-	-	-	1.513.696.818,64	1.453.516.881,00	96,02	355.842.000,00	355.801.000,00	99,99	1.869.538.818,64	1.809.317.881,00	96,78
4.05.17	KECAMATAN TULAKAN	-	-	-	1.878.982.338,89	1.812.339.609,00	96,45	395.723.000,00	394.370.483,00	99,66	2.274.705.338,89	2.206.710.092,00	97,01
4.05.18	KECAMATAN NGADIROJO	-	-	-	1.772.213.872,02	1.722.244.803,00	97,18	384.857.000,00	372.491.665,00	96,79	2.157.070.872,02	2.094.736.468,00	97,11
4.05.19	KECAMATAN SUDIMORO	-	-	-	1.280.638.388,14	1.178.069.625,00	91,99	339.446.000,00	324.265.100,00	95,53	1.620.084.388,14	1.502.334.725,00	92,73
	JUMLAH	1.683.793.675.192,74	1.655.537.179.548,19	98,32	1.018.377.245.181,72	970.051.810.279,00	95,25	692.272.911.633,00	659.487.943.791,35	95,26	1.710.650.156.814,72	1.629.539.754.070,35	95,26

Keterangan :

Data

sebelum

audit

BPK



### 3. Permasalahan dan Solusi :

#### a. Permasalahan

1. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang – undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat;
2. Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS, Blockgrand dan sejenisnya), terdapat ketidakjelasan aturan yang mengatur terkait penyalurannya, disamping masih kurang jelasnya petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan belanja BOS;
3. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kementerian Dalam Negeri dan jaringan *on line* antar SKPD mulai dari penganggaran, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan serta panatausahaan aset daerah karena belum seluruhnya aplikasi yang ada dimanfaatkan untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Alokasi Belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;
5. Adanya alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan pagu alokasi bantuan keuangannya setelah Perda APBD Kabupaten ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;



6. Terbatasnya jumlah personil di Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**b. Solusi**

- a. Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan perubahan Peraturan Perundang – undangan pengelolaan keuangan dan solusi dalam upaya mengantisipasi dan menindaklanjuti perubahan Peraturan tersebut;
- b. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan optimalisasi modul aplikasi SIPKD dalam rangka peningkatan keakuratan dan kecepatan penyiakan data keuangan;
  - Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi SIPKD secara *on line* antar SKPD;
  - Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan jaringan *on line* antar SKPD baik di server maupun jaringannya;
  - Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan



- pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui Aplikasi SIPKD sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
- Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi SIPKD sehingga mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;
- c. Mengoptimalkan penyusunan perencanaan penganggaran belanja sesuai dengan keluaran (*out put*) yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut dapat segera dilaksanakan;
- e. Dalam rangka peningkatan jumlah personil SKPD yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditempuh langkah – langkah sebagai berikut :
- Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi mengenai



Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Pengelolaan Aset Daerah;

- Memberikan Pembinaan dan Bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di SKPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, mengenai Pengelolaan Aset Daerah



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan selama Tahun 2017. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait daam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun 2017. Merupakan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021, pada tahun 2017 melaksanakan 16 (enam belas) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama yang dalam pencapaiannya didukung oleh APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pacitan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 16 (enam belas) sasaran yang akan dicapai, 18 diantaranya capaian indikatornya “*SANGAT BAIK*” dan sedangkan satu sasaran yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan indikator kinerja utama opini audit BPK masih belum diketahui hasilnya karena masih dalam proses audit / pemeriksaan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya



yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran. Pengendalian belanja daerah dilaksanakan dalam rangka mencapai 3 target yaitu:

1. Alokasi belanja yang tepat sasaran.
2. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial.
3. Efisiensi pengadaan barang dan jasa.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.683.793.675.192,74 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.655.537.179.548,19 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.256.495.644,55 atau mencapai 98,32 %.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2017 yang juga dituangkan dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.